

2025

PROFIL

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
Tanjungpinang
Email : disdik@kepripov.go.id
Website <https://dinaspendidikan.kepripov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjangkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Ridho dan kehendak-Nya sehingga kami dapat menuntaskan penyusunan Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini dengan baik.

Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada kemajuan pendidikan. Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan merupakan salah satu cara melaksanakan analisis terhadap data pendidikan, khususnya pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus memberikan informasi dan gambaran singkat mengenai keadaan Pendidikan dan Kinerja Dinas Pendidikan. Data Pendidikan digunakan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau supaya pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung secara konsisten. Data Pendidikan disusun berdasarkan data Dapodik serta hasil pendataan pendidikan yang berasal dari satuan Pendidikan dan diolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Kami berharap agar Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini dapat menjadi media yang mampu menjembatani dan menyediakan informasi serta manfaat yang seluas-luasnya bagi pembangunan pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang.

Tanjungpinang, Desember 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Ruang Lingkup	8
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Geografi.....	9
2.2. Demografi	13
2.3. Sosial Budaya	18
2.4. Transportasi	21
BAB III GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	22
3.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	23
3.3. Sumber Daya Dinas Pendidikan	44
3.3.1. Jumlah ASN dan Non ASN.....	44
3.3.2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	47
3.3.3. Satuan Pendidikan	56
3.3.4. Akreditasi Sekolah	58
3.3.5. Peserta Didik.....	60
3.3.6. Kelompok Umur Peserta didik	64
3.3.7. Rombongan Belajar	68
3.3.8. Ruang Kelas Belajar	70
3.3.9. Ruang Perpustakaan	72
3.3.10 Laboratorium, Laboratorium Bahasa, Laboratorium IPA, Laboratorium Fisika dan Laboratorium Biologi	73
BAB IV PENETAPAN KINERJA PENDIDIKAN	75
4.1 Visi dan Misi	75
4.2 Tujuan Strategis Dinas Pendidikan	78
4.3 Kebijakan Pembangunan	79
4.4 Program Tahun 2024	80
4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	80
4.6 Capaian Indikator Kinerja Utama	81
4.6.1. Rata-Rata lama Sekolah	82
4.6.2. Harapan Lama Sekolah	83
4.6.3. Angka Partisipasi Sekolah	84
4.7. Capaian Kinerja Indikator	86
4.7.1. SMA/SMK/SLB yg terakreditasi Minimal B	87

4.7.2.	SMKN yg terevitalisasi	89
4.7.3.	Tingkat Lulusan SMA yg Melanjutkan ke PTN/Kedinasan	90
4.7.4.	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yg Bekerja di IDUKA.....	92
4.7.5.	Persentase PTK Yg Mengikuti Diklat	93
4.7.6.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	94
4.7.7.	Angka Partisipasi Murni (APM)	95
4.7.8.	Angka Partisipasi Kasar SLB	96
4.7.9.	Rasio Siswa Perkelas	97
4.8	Kinerja SPM	98
4.8.1	Kemampuan Literasi	98
4.8.2	Kemampuan Numerasi	100
4.8.3	Iklim Inklusivitas	101
4.8.4	Iklim Keamanan	103
4.8.5	Iklim Kebhinekaan	106
4.8.6	Tingkat penyerapan Luusan SMK	107
4.8.7.	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	108
4.9	Kinerja Anggaran	109
BAB V	PENUTUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Luas wilayah (KM ²) Daratan dan Lautan Provinsi Kepulauan Riau	11
Tabel 2.2	:	Letak Astronomis Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.....	11
Tabel 2.3	:	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau	12
Tabel 2.4	:	Jumlah Pulau Kecil dan Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	12
Tabel 3.1	:	PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	44
Tabel 3.2	:	Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	45
Tabel 3.3	:	Jumlah SDM Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	46
Tabel 3.4	:	Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	48
Tabel 3.5	:	Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	47
Tabel 3.6	:	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	50
Tabel 3.7	:	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	51
Tabel 3.8	:	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	51
Tabel 3.9	:	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	52
Tabel 3.10	:	Jumlah Guru Berdasarkan Sertifikasi Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	55
Tabel 3.11	:	Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMAS/SMKS/SLBS di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	56
Tabel 3.12	:	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026..	57

Tabel3.13	: Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2025	60
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	81
Tabel 4.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	86
Tabel 4.3	: Sma/Smk/Slb Negeri Yang Terakreditasi Minimal B....	88
Tabel 4.4	: Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024	90
Tabel 4.5	: Persentase siswa SMA yang diterima di Perguruan Tinggi Tahun 2024	91
Tabel 4.6	: Analisa Pencapaian Kinerja Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja di IDUKA Tahun 2024	93
Tabel 4.7	: Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	95
Tabel 4.8	: Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	96
Tabel 4.9	: Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	96
Tabel 4.10	: Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	97

DAFTAR GRAFIK

Gambar 2.1	:	Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.....	10
Gambar 2.2	:	Penyebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	14
Gambar 2.3	:	Prosentase Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	14
Gambar 2.4	:	Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sd 2024	15
Gambar 2.5	:	Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2024..	15
Gambar 2.6	:	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	16
Gambar 2.7	:	Prosentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	16
Gambar 2.8	:	Penduduk Berdasarkan Umur di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	17
Gambar 2.9	:	Persentase Penduduk Berdasarkan Umur di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	17
Gambar 2.10	:	Penduduk Disabilitas (4-18 Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	17
Gambar 2.11	:	Sebaran Penduduk Disabilitas Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	18
Gambar 2.12	:	Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	19
Gambar 2.13	:	Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	19
Gambar 2.14	:	Jumlah Tempat Ibadah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	18
Gambar 2.15	:	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	21
Gambar 3.1	:	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Tahun 2025	45
Gambar 3.2	:	Persentase PNS Berdasarkan Golongan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tahun 2025	45
Gambar 3.3	:	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Tahun 2025	46
Gambar 3.4	:	Persentase SDM Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	46
Gambar 3.5	:	Persentase Jenis Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	47

Gambar 3.6	:	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan (SMA/SMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	48
Gambar 3.7	:	Persentase Sebaran Guru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	48
Gambar 3.8	:	Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026.....	48
Gambar 3.9	:	Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan (SMA/SMK) Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026.....	49
Gambar 3.10	:	Persentase Sebaran Guru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	49
Gambar 3.11	:	Persentase Sebaran Guru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	49
Gambar 3.12	:	Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Atasi (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	49
Gambar 3.13	:	Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	50
Gambar 3.14	:	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB)di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	50
Gambar 3.15	:	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	51
Gambar 3.16	:	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	52
Gambar 3.17	:	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	52
Gambar 3.18	:	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan SLB (SMA/SMK dan SLB) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	55
Gambar 3.19	:	Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Tempat Tugas di Provinsi Kepulauan Riau tahun Ajaran 2025/2025	53

Gambar 3.20	:	Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan SLB (SMA/SMK dan SLB) Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	53
Gambar 3.21	:	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAN/SMKN/SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	54
Gambar 3.22	:	Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAN, SMKN dan SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	54
Gambar 3.23	:	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAS/SMKS/SLBS Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	54
Gambar 3.24	:	Jumlah Guru Bersertifikasi pada SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	55
Gambar 3.25	:	Persentase Sertifikasi SMA/SMK dan SLB Tahun Ajaran 2025/2026	55
Gambar 3.26	:	Persentase Guru Bersertifikat Pendidikn Sertifikasi Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	56
Gambar 3.27	:	Sebaran Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	57
Gambar 3.28	:	Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenis Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	58
Gambar 3.29	:	Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	58
Gambar 3.30	:	Akreditasi Satuan Pendidikan SMK/SMA/SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	59
Gambar 3.31	:	Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	59
Gambar 3.32	:	Akreditasi Satuan Pendidikan SMK/SMA/SLBN Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	59
Gambar 3.33	:	Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	60
Gambar 3.34	:	Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	61
Gambar 3.35	:	Persentase Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	61
Gambar 3.36	:	Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	62
Gambar 3.37	:	Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026...	62

Gambar 3.38	:	Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026...	63
Gambar 3.39	:	Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	64
Gambar 3.40	:	Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur Pada SMA dan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	64
Gambar 3.41	:	Persentase Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur Pada SMA dan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	65
Gambar 3.42	:	Sebaran Peserta Didik pada SMAN Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	65
Gambar 3.43	:	Sebaran Peserta Didik Pada SMKN Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	66
Gambar 3.44	:	Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAN dan SMKN Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	66
Gambar 3.45	:	Sebaran Peserta Didik pada SMAS dan SMKS Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	66
Gambar 3.46	:	Sebaran Peserta Didik pada SMAS Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	67
Gambar 3.47	:	Sebaran Peserta Didik Pada SMKS Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	67
Gambar 3.48	:	Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAS dan SMKS Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	67
Gambar 3.49	:	Jumlah Rombongan Belajar Pada SMA/SMK dan SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026..	68
Gambar 3.50	:	Persentase Sebaran Rombongan Belajar Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	68
Gambar 3.51	:	Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	69
Gambar 3.52	:	Persentase Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	69
Gambar 3.53	:	Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	70

Gambar 3.54	:	Percentase Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	70
Gambar 3.55	:	Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	71
Gambar 3.56	:	Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	71
Gambar 3.57	:	Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	71
Gambar 3.58	:	Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS di Provinsi Kepulauan RiauTahun Ajaran 2025/2026	72
Gambar 3.59	:	Jumlah Ruang Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	72
Gambar 3.60	:	Jumlah laboratorium Komputer Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	73
Gambar 3.61	:	Jumlah laboratorium Bahasa Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	74
Gambar 3.62	:	Jumlah laboratorium IPA Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan RiauTahun Ajaran 2025/2026	74
Gambar 3.63	:	Jumlah laboratorium Fisika Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026	74
Gambar 3.64	:	Jumlah laboratorium Biologi Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran Tahun Ajaran 2025/2026	74
Gambar 4.1	:	Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	82
Gambar 4.2.	:	Realisasi Kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	83
Gambar 4.3	:	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	84
Gambar 4.4	:	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	84
Gambar 4.5	:	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	85
Gambar 4.6	:	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	85
Gambar 4.7	:	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	89

Gambar 4.8	:	Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	92
Gambar 4.9	:	Capaian Kinerja Kemampuan Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	99
Gambar 4.10	:	Capaian Kinerja Kemampuan Numerasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	101
Gambar 4.11	:	Capaian Kinerja Iklim Inklusivitas SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	103
Gambar 4.12	:	Capaian Kinerja Iklim Keamanan SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	105
Gambar 4.13	:	Capaian Kinerja Iklim Kebhinnekaan SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	107
Gambar 4.14	:	Capaian Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Pada DUDI Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	108
Gambar 4.15	:	Capaian Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	109
Gambar 4.16	:	Jenis Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membangun peradaban sutau bangsa. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus selalu bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan, dan kelangsungannya sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional. Pendidikan selain mengarahkan pada peningkatan pengetahuan dan pengembangan pola pikir, juga mengarah pada peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup (*life skills*) masyarakat sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global. Persaingan global yang tinggi menuntut penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara profesional agar dapat diakses seluruh masyarakat dengan mutu yang baik.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang didalamnya menjelaskan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pembangunan pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan pendidikan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas

bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari pernyataan tersebut fungsi pendidikan untuk negara yaitu untuk membentuk dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dewasa ini makin disadari bahwa Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan pendidikan pada khususnya harus diselesaikan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan umum pendidikan di susun oleh pemerintah pusat dan daerah mendukung pelaksanaannya dengan tidak menghilangkan kebijakan local dalam mendukung tercapainya pendidikan secara nasional

Dalam konteks pembangunan nasional, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten/Kota merupakan unit yang sangat strategis untuk keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan Pendidikan. Oleh karena itu, aparat di Kabupaten/Kota harus dapat memperkuat sumber daya pembangunan (baik dana, SDM, sarana/prasarana maupun informasi) kabupaten/kota sehingga diharapkan pembangunan nasional akan jauh lebih berhasil tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa, melainkan juga dalam pemerataan serta penurunan kesenjangan antar daerah. Langkah ke arah itu sudah dimulai melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan mengadakan penggeseran baik dalam bentuk dana maupun tanggungjawab dari pusat ke daerah melalui upaya otonomi Kabupaten/Kota. Langkah positif ini seharusnya diimbangi dengan kesiapan Kabupaten/Kota dalam mengemban tugas Pendidikan yang penuh dengan tantangan. Kesiapan Kabupaten/Kota termasuk juga tersedianya data yang selalu *up to date* dan akurat dengan

analisis yang efektif. Untuk itu, Penyusunan Profil Dinas Pendidikan perlu dilakukan dan disosialisasikan ke daerah.

Dalam rencanaan pembangunan urusan pendidikan direncanakan tidak ada lagi penduduk yang tidak bersekolah di tingkat pendidikan menengah, dengan demikian akan terwujud derajat pendidikan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan yang kondusif dan dengan prilaku yang rasional dalam kehidupan sosial.

Untuk merealisasikan salah satu maksud di atas disusun Profil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami reformasi dalam tampilan datanya guna memperoleh kesempurnaan. Melalui beberapa proses perubahan dimaksud hanya ditujukan untuk menyediakan data yang reliabel dan komunikatif sehingga sistem informasi Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sepenuhnya dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam menunjang program-program pendidikan.

Profil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berisi data dan informasi Pendidikan kondisi tahun pelajaran 2025/2026 yang terdiri atas kondisi data sekolah, jumlah murid dan data guru jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan Luar Biasa. Dimana data pendidikan tersebut juga didukung oleh keadaan Demografi yang meliputi jumlah penduduk, tenaga kerja, Jumlah desa dan Kelurahan yang nanti akan diperoleh gambaran APK, APM per jenjang pendidikan.

Penyusunan Profil Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini berpedoman pada target pencapaian sasaran Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2021-2026 dirangkum dalam ruang lingkup indikator yaitu 1) Mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu dan relevansi dan 3) Penguatan tata kelola dan pencitraan Publik, serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Dalam mengembangkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kepulauan Riau mengacu pada perundang – undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 369/VI/1995 tentang Wajib Belajar;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Nasional;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasyah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasyah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kualifikasi Guru;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2007 tentang Ujian Kesetaraan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan dan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951).

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan umum disusunnya Profil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan dan kinerja pendidikan daerah yang bersangkutan pada Tahun 2024. Gambaran menyeluruh tersebut diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan pembangunan pendidikan seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda, Bupati, DPRD, kalangan industri, lingkungan Dinas Pendidikan dan Masyarakat. Mereka sangat memerlukan ilustrasi lengkap mengenai pendidikan di daerahnya untuk berbagai keperluan, antara lain dalam rangka pengembangan daerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Dialog antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Pemda Kabupaten/Kota dan diskusi dengan sektor-sektor lain akan lebih berbobot apabila pihak Dinas Pendidikan memiliki kemampuan analisis yang handal dan didukung oleh data dan informasi pendidikan yang aktual, relevan, dan dapat dipercaya.

Penyusunan Profil Dinas Pendidikan ini secara khusus bertujuan untuk menyajikan keadaan data dan kinerja nonpendidikan dan pendidikan setiap tahun pada tingkat kabupaten/kota untuk Profil Dinas Pendidikan

Provinsi, Berdasarkan kinerja yang ada, dapat dilakukan analisis sehingga akan diketahui permasalahan yang ada dan dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pendidikan kedepan

1.4 Ruang Lingkup

Profil Dinas Pendidikan adalah suatu gambaran menyeluruh tentang keadaan pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi dalam kaitannya dengan faktor lingkungan pendidikan, seperti keadaan penduduk, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya pada suatu saat tertentu. Profil Dinas Pendidikan menyajikan empat hal, yaitu :

1. Gambaran umum keadaan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Gambaran keadaan pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi dengan data yang sudah diverifikasi;
3. Analisis kinerja pendidikan.

Pendekatan ini dilakukan karena masalah-masalah pendidikan bersifat kompleks, yang seringkali tidak mampu secara sendirian dipecahkan melalui pendekatan sektoral. Jika masalah itu dapat dipecahkan maka pemecahan tersebut hanya bersifat sementara, parsial dan kurang mendasar. Oleh karena itu, Penyusunan Profil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan pendekatan sistemik dan integral, yang memandang pendidikan tidak semata-mata ditinjau dari aspek pendidikan melainkan juga dari aspek lain di luar pendidikan (kondisi nonpendidikan) yang dianggap banyak berpengaruh terhadap keberhasilan program pendidikan.

Dalam banyak hal masalah-masalah pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar pendidikan, misalnya angka putus sekolah, angka partisipasi anak usia sekolah dalam pendidikan dan prestasi belajar sangat erat kaitannya dengan psikososial, kemiskinan, gizi dan kesehatan. Oleh karena keterkaitannya yang erat dengan aspek-aspek tersebut, Profil Dinas Pendidikan mengintegrasikannya ke dalam suatu analisis yang tidak terpisahkan.

BAB II **GAMBARAN UMUM**

2.1. Geografi

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi $0^{\circ}29'$ Lintang Selatan (LS) dan $4^{\circ}40'$ Lintang Utara (LU) dan $103^{\circ}22'$ Bujur Timur (BT) - $109^{\circ}40'$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.269,708 Km². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Provinsi ke 32 (tiga puluh dua) di Indonesia dengan 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Natuna.

Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Tahun 2024, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.271.890 jiwa, dengan kepadatan 272 jiwa/km², dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Luas wilayah daratan seluas 8.269,708 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

Kepri memiliki potensi sumber daya alam mineral, dan energi yang relatif cukup besar, dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi, dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2036. Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

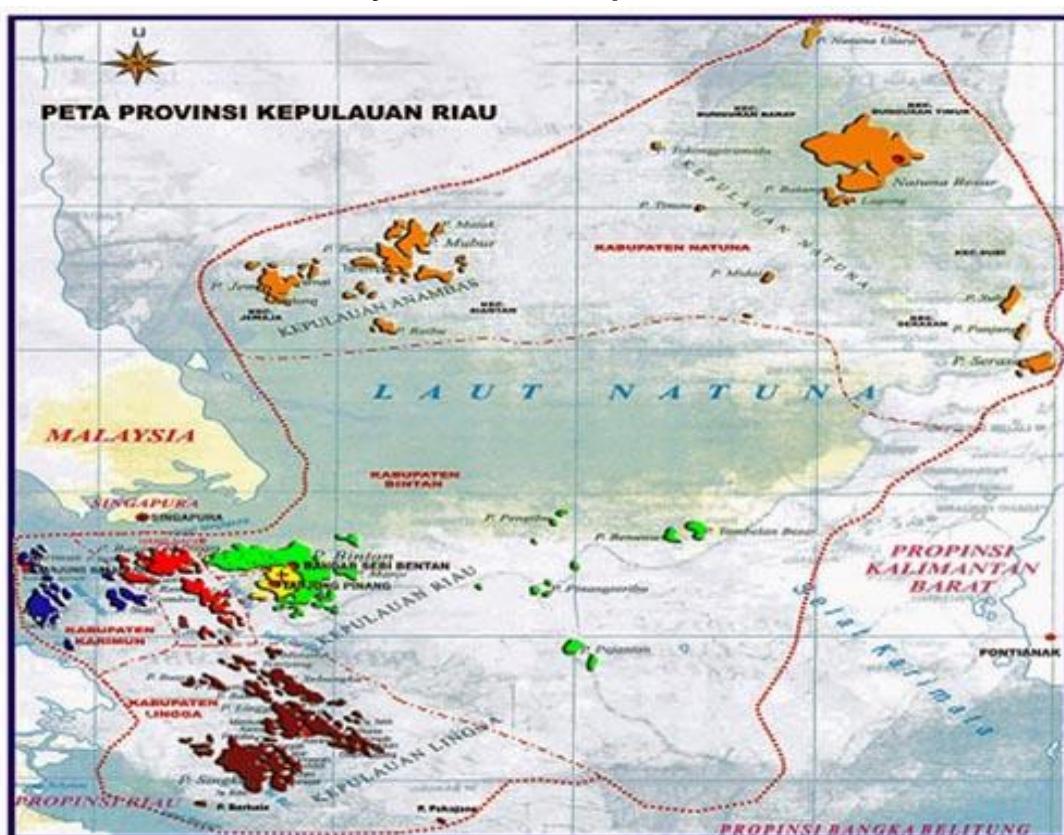
Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja

Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

**Gambar 2.1
Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Riau**



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, rincian luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1.
Luas wilayah (KM²) Daratan dan Lautan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/kota	Luas Daratan	Luas lautan	total
1.	Tanjungpinang	150,373	149,13	
2.	Bintan	1.317.149	102.964,08	
3.	Batam	1.034,732	3.679,25	
4.	Karimun	930,453	4.698,09	
5.	Lingga	2.2108,819	43.339	
6.	Natuna	1.999,155	216.113,42	
7.	Kep. Anambas	627.027	46.074	
	Kep. Riau	8.269,708	417.012,97	

Berlandaskan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 mengenai Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, melalui interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000, letak kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau secara astronomis sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Letak Astronomis Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/kota	Lintang	Bujur
1.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26'27,62" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28'56,23" BT
3.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03'18,84" BT
4.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22'32,84" BT
5.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36'18,79" BT
6.	Natuna	3°56'28,26" LU	108°22'38,53" BT
7.	Kep. Anambas	3°12'54,00" LU	106°13'04,80" BT

Sumber : RPJMD Prov Kepri 2025-2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, jumlah pulau pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.3.
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1.	Tanjungpinang	8	3
2.	Bintan	263	32
3.	Batam	454	80
4.	Karimun	248	45
5.	Lingga	630	82
6.	Natuna	172	30
7.	Kep. Anambas	239	21
	Kep. Riau	2028	294

Sumber : RPJMD Prov Kepri 2025-2029

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 22 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah Pulau Kecil dan Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1.	Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun, Pulau Sentut
2.	Batam	4	Pulau batu berantai, pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Putri
3.	Karimun	2	Pulau Karimun Anak, Pulau Tokong Hiu kecil
4.	Natuna	7	Pulau kepala, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Semiun, pulau Senoa, Pulau subi Kecil, Pulau Tokong Boro
5.	Kep. Anambas	5	Pulau Damar, Pulau Mangkai, pulau Tokong belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau tokong Nanas

Sumber : RPJMD Prov Kepri 2025-2029

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa;

Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.

Rata-rata suhu udara tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 36,80C sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 31,50C. Curah Hujan tertinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 3.968,5 mm³ dan terendah di Kabupaten Karimun 2.132,8 mm³. Secara umum wilayah Kepulauan Riau beriklim laut tropis basah, terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba, Suhu rata-rata tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 28,10C, sedangkan rata-rata terendah ada di Kota Tanjungpinang 27,20C, Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Ranai (Kabupaten Natuna) sebesar 88,40%, sedangkan rata-rata terendah di Tarempa (Kabupaten Anambas) sebesar 81,80%, jumlah hari hujan tertinggi berada di Dabo (Kabupaten Lingga) dengan sebanyak 230 hari, sedangkan hari hujan terendah berada di Tarempa (Kabupaten Kepulauan Anambas) yakni sejumlah 155 hari, tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Kota Batam) sebesar 1,011,70 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Kota Tanjungpinang sebesar 1,009,00 mb, kecepatan angin tertinggi di Tarempa (Kabupaten Anambas) sebesar 4,10 knot, terendah di Kabupaten Karimun sebesar 1,3 knot, penyinaran matahari tertinggi di Kabupaten Ranai (Kabupaten Natuna) sebesar 65,0 %, terendah di Kabupaten Karimun dengan sebesar 38,9 %.

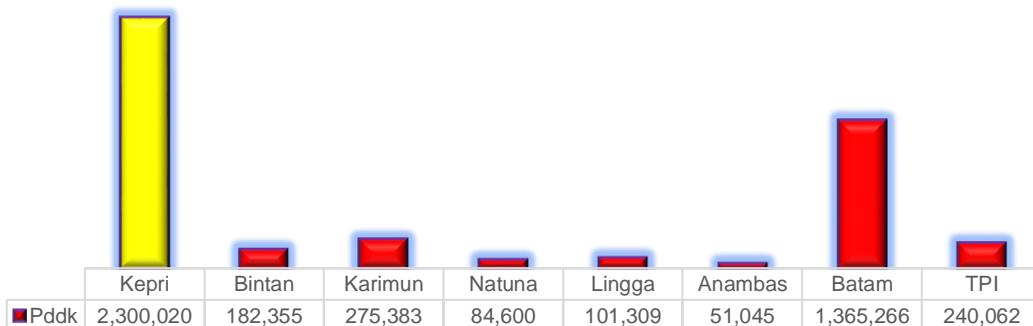
2.2. Demografi

Pendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendidikan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Demografi berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan karena jumlah dan distribusi penduduk mempengaruhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga berpengaruh, seperti tingkat pendapatan yang memengaruhi akses terhadap pendidikan. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai

kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Karena itu aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Jadi, aspek kependudukan perlu sangat mempengaruhi pendidikan.

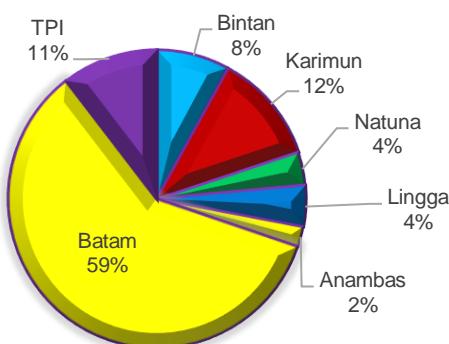
Penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang terhimpun pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada Desember tahun 2024 berjumlah 2.271.890 jiwa dibandingkan dengan kondisi pada Desember tahun 2022.

Gambar 2.2
Penyebaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 2.3
Prosentase Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

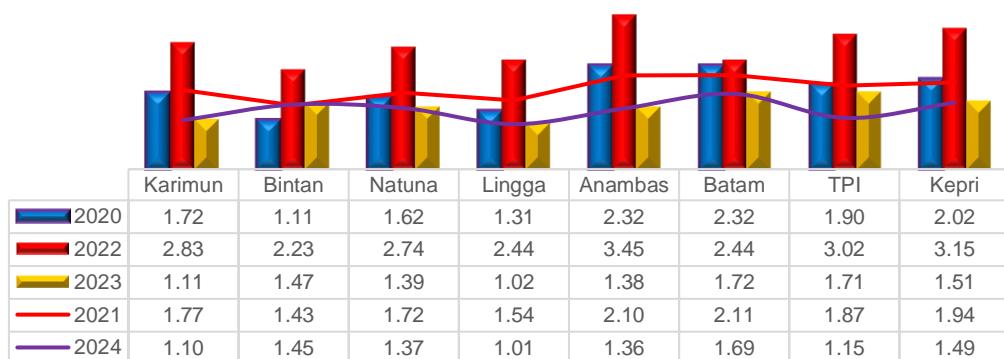


Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 2.4 Laju pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020- 2024 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Laju

pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,49%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,51%. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terendah adalah Kabupaten Lingga dan tertinggi Kota Batam. Gambaran Laju Pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun terlihat pada grafik berikut ini.

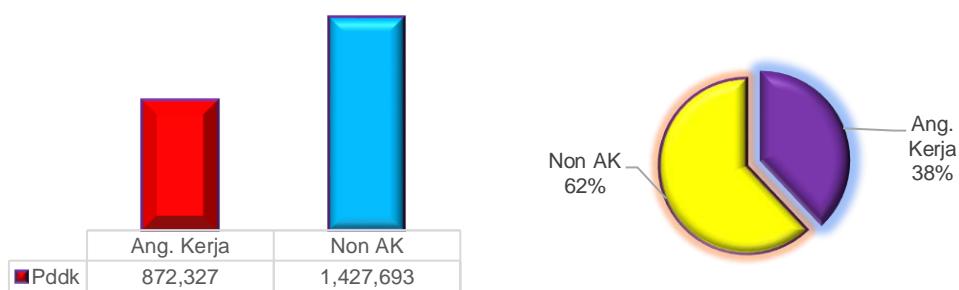
Gambar 2.4
Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020 sd 2024



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

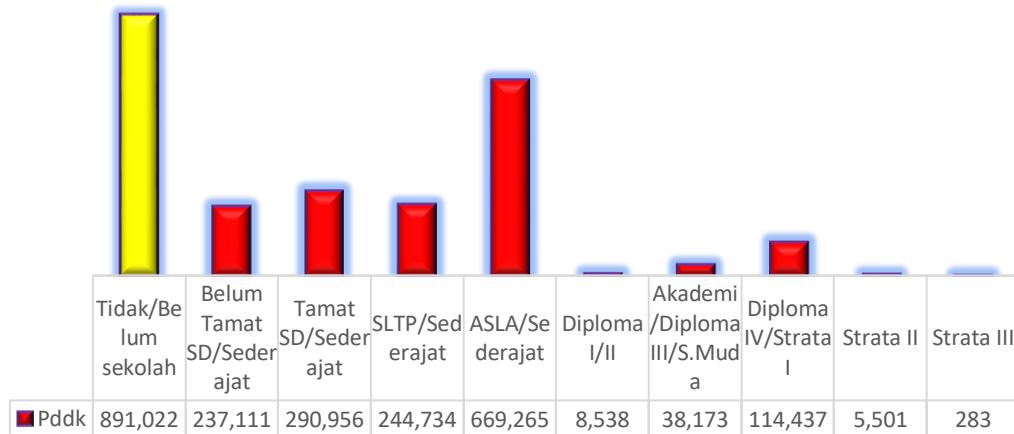
Gambar 2.5 menjelaskan bahwa angkatan kerja aktif sebesar 38% dari penduduk dengan usia kerja yang sedang aktif bekerja atau sedang mencari kerja. Jika membahas tentang angkatan kerja maka bisa dikatakan mereka adalah penduduk usia produktif, baik yang bekerja ataupun pengangguran.

Gambar 2.5
Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2024



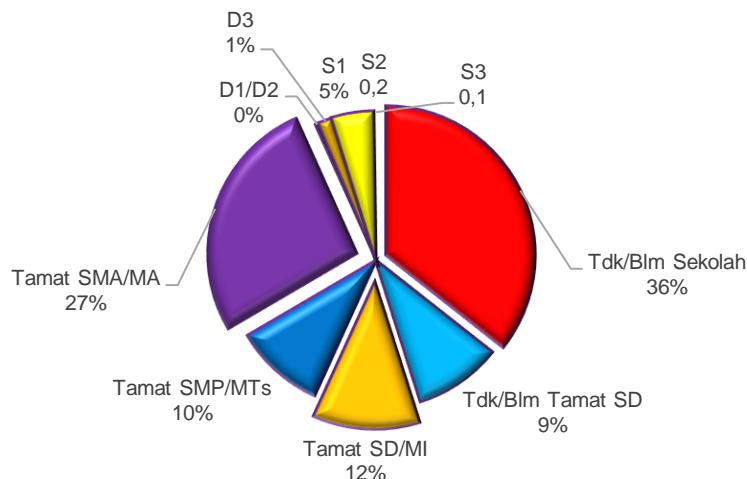
Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 2.6
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber : RPJMD Prov Kepri 2025-2029

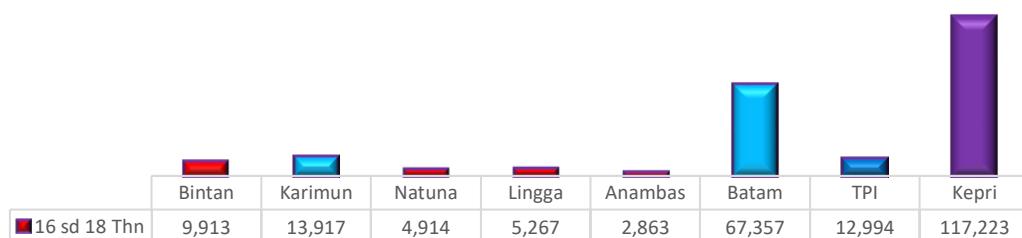
Gambar 2.7
Prosentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber : RPJMD Prov Kepri 2025-2029

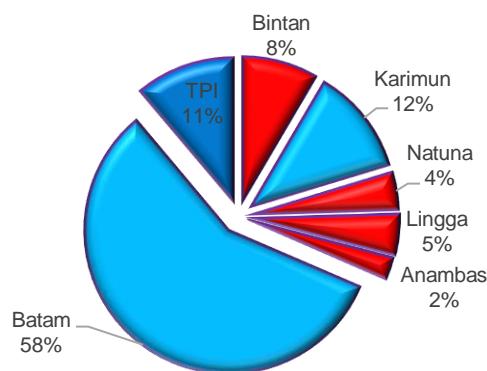
Gambar 2.7 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 27% merupakan tamatan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA), proporsi terbesar penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih/belum sekolah dengan provorsi sebesar 36%atau setara dengan 891.022 jiwa.

Gambar 2.8
Penduduk Berdasarkan Umur di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

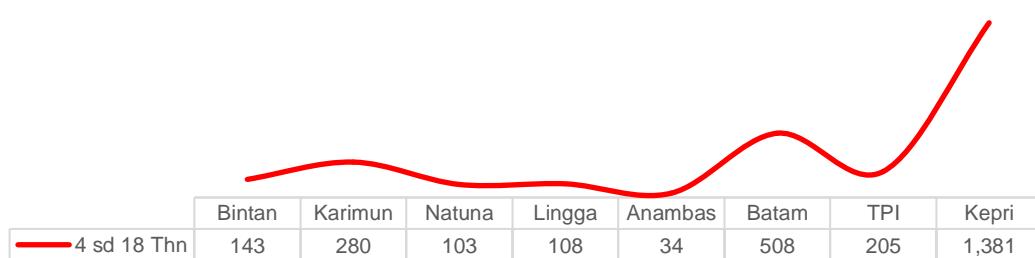
Gambar 2.9
Persentase Penduduk Berdasarkan Umur di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

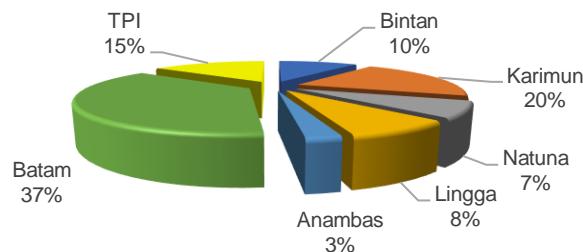
Gambar 2.8 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan umur 16-18 tahun pada tahun 2025 sebanyak 117.233 jiwa. Penduduk berumur 16-18 tahun terbanyak berada di Kota Batam tercatat sebanyak 67.357 jiwa atau setara dengan 58% dari total penduduk berusia 16-18 tahun yang berada di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025.

Gambar 2.10
Penduduk Disabilitas (4-18 Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 2.11
Sebaran Penduduk Disabilitas Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : DPMDUKCAPIL Kepri 2025

Gambar 2.11 menjelaskan bahwa sebaran penduduk disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 berjumlah 1.381, Kota Batam dengan proporsi terbesar dengan jumlah penduduk disabilitas tercatat sebanyak 508 jiwa atau setara dengan 37% , dengan jumlah penduduk disabilitas terkecil berada di Kabupaten Anambas tercatat sebanyak 34 jiwa atau setara dengan 3% dari total penduduk disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025.

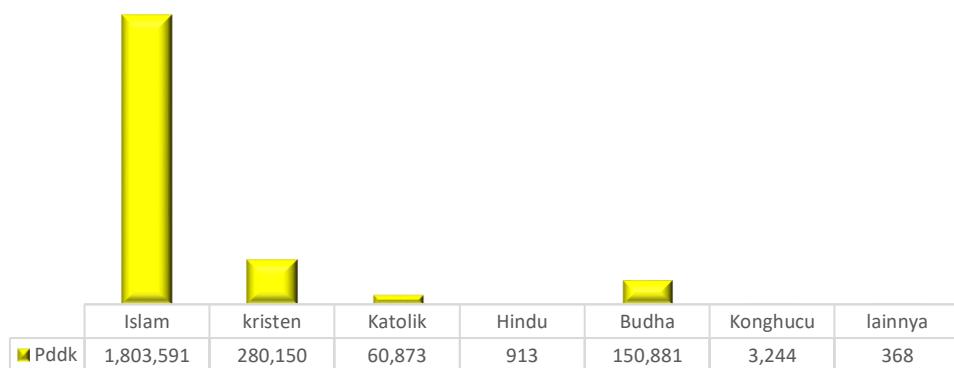
2.3. Sosial Budaya

Budaya didefinisikan sebagai seperangkat perilaku dan keyakinan yang dipelajari yang menjadi ciri suatu masyarakat atau kelompok masyarakat . Lembaga, keyakinan, dan sikap, baik yang nyata maupun tidak nyata, yang membentuk suatu kelompok masyarakat. Budaya mencakup norma, standar, atau aturan tentang perilaku yang dapat diterima.

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup dimasyarakat Provinsi Kepulauan Riau bersifat majemuk seperti adat melayu, Jawa, Minang, Batak, Bugis, Ambon, Cina dan lain-lain karena kebanyakan penduduknya adalah pendatang, akan tetapi mayoritas adat istiadat Melayu masih terlihat jelas dan berpusat di pulau penyengat dan Kota Tanjungpinang sekitarnya. Masyarakat pendatang tetap menghargai kebudayaan melayu, dapat dilihat dari setiap kegiatan adat istiadat yang didahulukan dengan adat istiadat

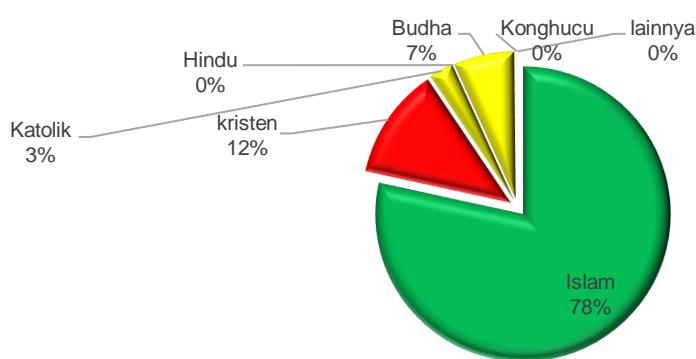
melayu, seperti tari persembahan. Di pulau penyengat masih terdapat peninggalan bersejarah yang sampai saat ini masih dilestarikan

Gambar 2.12
Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dinas Sosial Prov. Kepri 2025

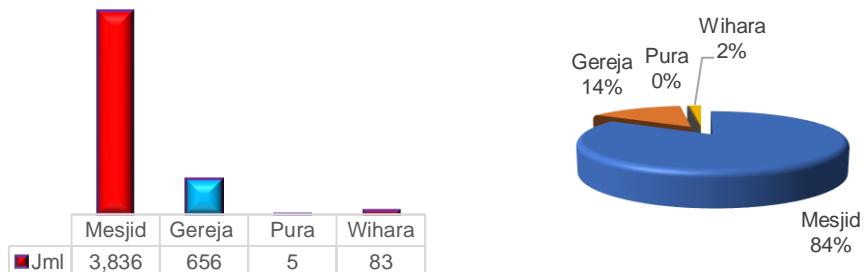
Gambar 2.13
Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dinas Sosial Prov. Kepri 2025

Gambar 2.13 dan Gambar 2.14 menjelaskan bahwa sebanyak 1.803.591 jiwa [enduduk Provinsi Kepulauan Riau beragama Islam atau setara dengan 78% dari total penduduk. Agama khonghucu merupakan persentase terkecil dari pemeluk agama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada tahun 2025 jumlah pemeluk agama Khonghucu tercata sebanyak 3,244 jiwa atau setara dengan 0,01 % dari seluruh penduduk beragama yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 2.14
Jumlah Tempat Ibadah di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Dinas Sosial Prov. Kepri 2025

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari beragam suku bangsa juga diberi kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinanya yang penting saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya. Dari Gambar 2.5 di atas dapat dilihat gambaran keadaan tempat ibadah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menurut Data Profil Kabupaten/Kota berjumlah 3.836 yang terdiri dari Mesjid/mushalla atau setara dengan 84%, Gereja Protestan 579, Gereja Katolik 80, Pura 5 dan Wihara berjumlah 83 atau setara dengan 2% dari total jumlah tempat ibadah.

Tantangan dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan jangkauan pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan medis. Sarana dan prasarana kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) relatif tersebar di Kabupaten/Kota dan untuk data tahun 2024 Sarana kesehatan masih terkonsentrasi di kota Batam sebagai kota yang berpenduduk paling banyak di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rumah sakit yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 36 unit, Puskesmas Induk berjumlah 96 unit dan puskesmas pembantu berjumlah 225 unit, untuk poli klinik 71 unit.

Gambar 2.15
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : LKJIP Dinkes Prov. Kepri 2024

2.4 Transporasi

Sarana Transportasi Provinsi kepulauan Riau diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, mencakup didalamnya kegiatan pemerintah, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, kegiatan pertahanan-keamanan dan kegiatan-kegiatan utama perkotaan yang lainnya. Rencana pengembangan sistem transportasi di Kepulauan Riau, terbagi atas:

1. Sistem transportasi darat yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi darat dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah, meliputi Lalu lintas dan Angkutan jalan serta Lalu lintas Angkutan penyebrangan, mengenai jumlah sarana transportasi di daerah perkotaan cukup baik, pada umumnya masyarakat menggunakan Angkutan Roda Empat (Mobil) dan sepeda motor.
2. Sistem transportasi laut, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi laut dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah.
3. Sistem jaringan transportasi udara, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi udara dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah.

BAB III

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi ini, pembagian kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan nasional, termasuk kurikulum, standar pendidikan, dan pengelolaan perguruan tinggi.
2. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus.
3. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan anak usia dini (PAUD).

Dinas Pendidikan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,

- Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

3.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

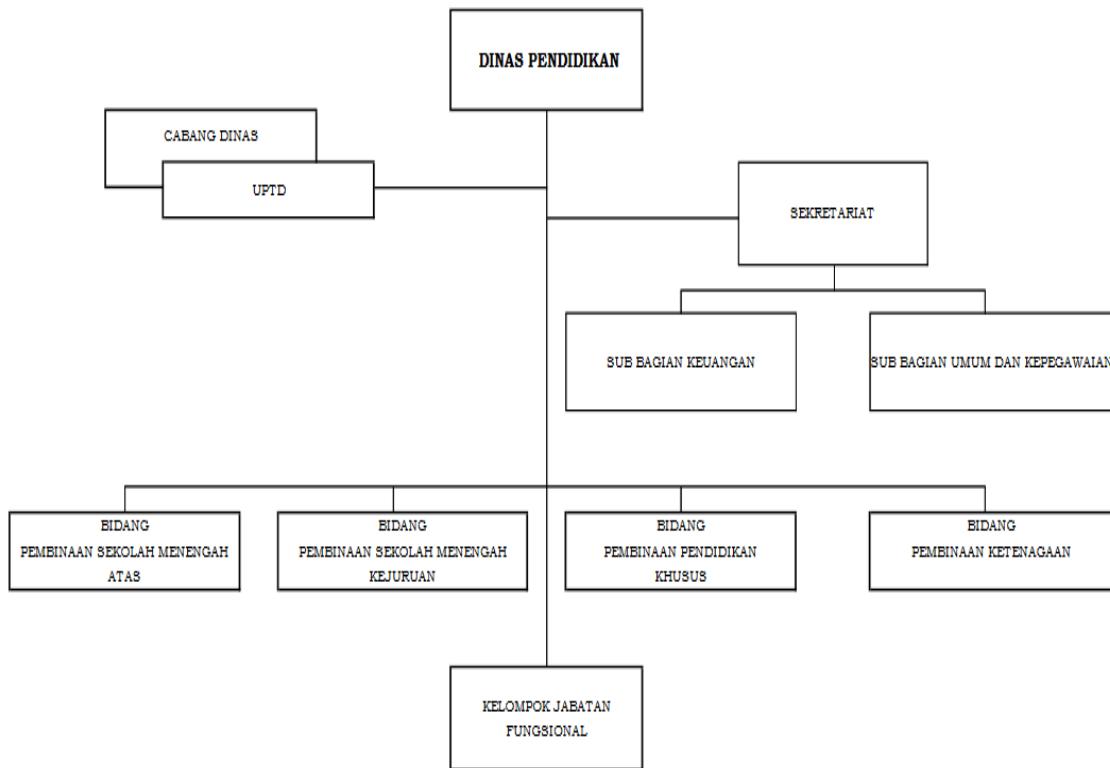
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
7. Cabang Dinas;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Satuan Pendidikan dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



1. Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut.

1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- b. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- c. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- d. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- e. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- f. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Atas, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. Sekolah Menengah Atas. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Atas, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Atas.
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian SMA;

- c. penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SMA;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMA;
- e. pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas;
- f. pelaksanaan pengesahan (legalisir) ijazah dan dokumen peserta didik lainnya;
- g. pelaksanaan penerbitan surat pindah Sekolah Menengah Atas dan sekolah kerjasama;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas;
- i. penyusunan basis data pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMA;
- j. pelaksanaan koordinasi kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas.
- k. penyiapan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas;
- l. penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas;
- m. penyiapan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas;
- n. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan aset Sekolah Menengah Atas;
- o. penyusunan basis data di Sub Koordinator kelembagaan dan sarana prasarana SMA;
- p. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Sekolah Menengah Atas;
- q. penyiapan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Sekolah Menengah Atas;

- r. penyiapan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Sekolah Menengah Atas;
- s. pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik SMA;
- t. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas;
- u. penyusunan basis data peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas;
- v. pelaksanaan dukungan pengembangan program SMA yang terbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- w. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. pemeriksaan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan penyelarasan kurikulum dan penilaian

Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);

- d. penyiapan bahan penyusunan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. penyiapan bahan penyusunan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;
- g. pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. pelaksanaan pengesahan (legalisir) ijazah dan dokumen peserta didik lainnya;
- i. pelaksanaan penerbitan surat pindah Sekolah Menengah Kejuruan dan penyelenggaraan Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan;
- j. penyusunan basis data kurikulum dan penilaian SMK;
- k. pelaksanaan koordinasi kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
- l. penyiapan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
- m. penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan;
- n. penyiapan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
- o. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan aset Sekolah Menengah Kejuruan;
- p. penyusunan basis data di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
- q. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik SMK;

- r. penyiapan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan;
- s. penyiapan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan;
- t. pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan;
- u. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan;
- v. penyusunan basis data peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;
- w. pelaksanaan dukungan pengembangan program Sekolah Menengah Kejuruan yang terbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PK)

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PK/LK) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus.
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Khusus;

- c. penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Pendidikan Khusus;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Khusus;
- e. pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Khusus;
- f. pelaksanaan pengesahan (legalisir) ijazah dan dokumen peserta didik lainnya;
- g. pelaksanaan penerbitan surat pindah Pendidikan Khusus dan sekolah kerjasama;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan Asesmen Nasional Pendidikan Khusus;
- i. penyusunan basis data pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Khusus;
- j. pelaksanaan koordinasi kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana Pendidikan Khusus;
- k. penyiapan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Khusus;
- l. penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Khusus;
- m. penyiapan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, sarana dan prasarana Pendidikan Khusus;
- n. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan aset Pendidikan Khusus;
- o. penyusunan basis data di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Khusus;
- p. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Pendidikan Khusus;
- q. penyiapan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Pendidikan Khusus;
- r. penyiapan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Pendidikan Khusus;

- s. pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik Pendidikan Khusus;
- t. pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Khusus;
- u. penyusunan basis data peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus;
- v. pelaksanaan dukungan pengembangan program Pendidikan Khusus yang terbitkan oleh Kementerian Pendidikan;
- w. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5 Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

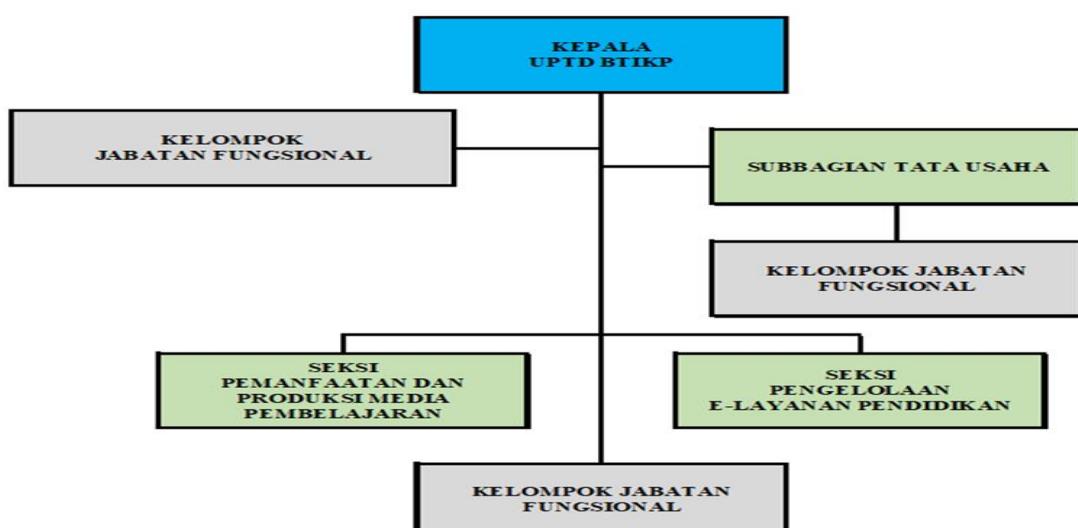
- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus;
- b. penyiapan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan Non ASN sekolah menengah atas;
- c. penyiapan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan Non ASN sekolah menengah atas;
- d. penyiapan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas ASN dan Non ASN;

- e. penyiapan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan Non ASN lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
- f. pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas ASN dan Non ASN;
- g. pelaksanaan pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- h. pelaksanaan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan pendidik sekolah menengah atas;
- i. pelaksanaan Pengelolaan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas ASN dan Non ASN;
- j. pelaksanaan pengurusan kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan karir guru sekolah menengah atas;
- l. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan Non ASN sekolah menengah kejuruan;
- m. penyiapan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan Non ASN sekolah menengah kejuruan;
- n. penyiapan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan Non ASN sekolah menengah kejuruan;
- o. penyiapan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan ASN dan Non ASN lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan ASN dan Non ASN;
- q. pelaporan pelaksanaan kinerja di Sub Koordinator pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;

- r. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan ASN dan Non ASN;
- s. pelaksanaan pengelolaan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan pendidik;
- t. pelaksanaan pengelolaan kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan ASN dan Non ASN;
- u. pelaksanaan fasilitasi pengembangan karir guru sekolah menengah kejuruan;
- v. penyiapan bahan penyusunan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- w. penyiapan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- x. penyiapan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- y. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik pendidikan khusus;
- z. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- aa. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan Tenaga kependidikan Pendidikan Khusus ASN dan Non ASN;
- bb. pelaksanaan pengelolaan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan pendidik;
- cc. pelaksanaan fasilitasi pengembangan karir guru Tenaga kependidikan Pendidikan Khusus;
- dd. melaksanakan pengelolaan kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus ASN;
- ee. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- ff. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.6 Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) merupakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. UPTD BTIKP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan pemanfaatan dan produksi media pembelajaran serta pengelolaan e-layanan Pendidikan. Struktur Organisasi UPTD BTIKP terdiri dari :



Uraian terhadap rincian tugas pada masing masing jabatan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPTD;

Kepala UPTD BTIKP mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun bahan operasional di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;

- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
 - d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
 - e) menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait bagian Tata Usaha;
 - f) menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
 - g) menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - h) mendistribusikan tugas kepada Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
 - j) menyusun laporan pelaksanaan tugas di UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Subbagian Tata Usaha;
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ke tata usahaan.
- Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a) merencanakan kegiatan Subbag Tata Usaha;
 - b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha;

- e) melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian, pelaporan, pengelolaan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Subbag Tata Usaha;
- f) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
- g) melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran

Seksi Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan kegiatan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
- d) memeriksa hasil kerjabawahan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
- e) melaksanakan pemantauan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran di sekolah SMA/SMK se-Provinsi Kepulauan Riau;
- f) menyiapkan sarana dan prasarana Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran di sekolah SMA/SMK se-Provinsi Kepulauan Riau;
- g) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
- h) melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;

- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Seksi Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
- Seksi Pengelolaan E-Layanan Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan. Seksi Pengelolaan E-Layanan Pendidikan mempunyai rincian tugas :
- a) merencanakan kegiatan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - e) melaksanakan pemantauan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - f) menyiapkan sarana dan prasarana Pengelolaan E-Layanan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - g) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - h) melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Cabang Dinas

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Cabang Dinas dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pembentukan Cabang Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas cabang dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- 3) koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik, cabang dinas pendidikan mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Cabang dinas pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas pendidikan. Cabang Dinas terbagi dua akelas, yakni Kelas A dan Kelas B.

Cabang Dinas Kelas A terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas dari kepala dinas. Kepala Cabang Dinas Pendidikan mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan cabang dinas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan cabang dinas;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan cabang dinas;

- d) menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan terkait ketatausahaan;
- e) menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan terkait pengelolaan Pendidikan;
- f) menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan terkait pelayanan di bidang pendidikan;
- g) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan cabang dinas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan cabang dinas;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan cabang dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, tata laksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan dan perumusan kebijakan teknis serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan kawasan kantor cabang dinas Pendidikan. Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e) melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan manajemen kepegawaian dan Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;

- f) melaksanakan pengelolaan barang milik Negara/Daerah, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
 - g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan cabang dinas serta Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
 - h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - i) imelaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK) mempunyai tugas: memimpin, melaksanakan tugas dan koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan terkait pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK). Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK) mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK);
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK);
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK);
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK);
- e) melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait teknis Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;

- f) melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait kelembagaan, sarana dan prasarana pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
- g) melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait teknis peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK);
- i) melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (PK) ; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

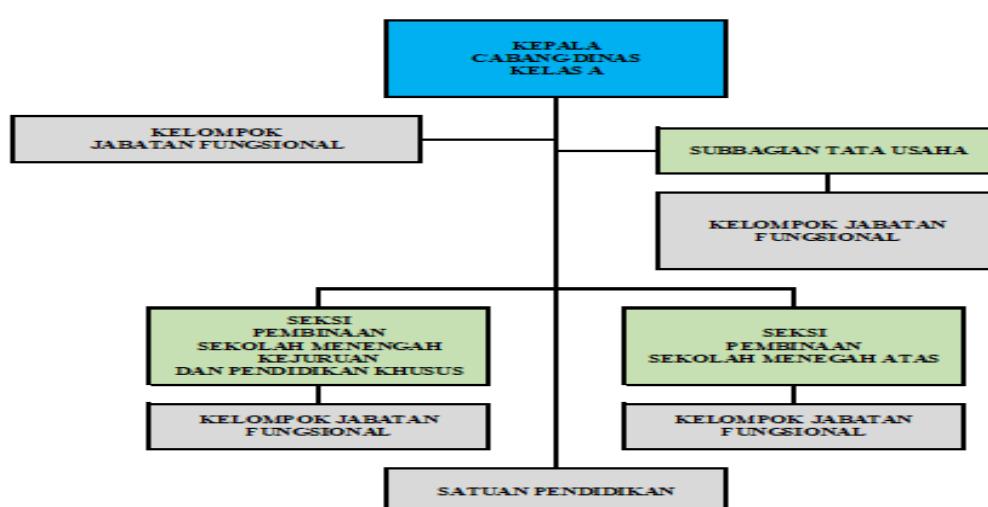
4. Seksi Pembinaan Sekolah Menegah Atas

Seksi Pembinaan Sekolah Menegah Atas mempunyai tugas: memimpin, melaksanakan tugas dan koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan terkait pembinaan Sekolah Menengah Atas. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
- e. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait teknis Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas;
- f. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait teknis kelembagaan, sarana dan prasarana pembinaan Sekolah Menengah Atas;

- g. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait teknis peserta didik dan pembangunan karakter pembinaan Sekolah
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kelompok Jabatan Fungsional



6. Satuan Pendidikan

Cabang Dinas Kelas B, terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas dari kepala dinas. Kepala Cabang Dinas Pendidikan mempunyai rincian tugas:

- a) menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan cabang dinas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan cabang dinas;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan cabang dinas;
- d) menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan terkait ketatausahaan;

- e) menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan terkait pengelolaan Pendidikan;
- f) menyusun bahan-bahan tugas dan kebijakan terkait pelayanan di bidang pendidikan;
- g) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan cabang dinas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan cabang dinas;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan cabang dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, tata laksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan dan perumusan kebijakan teknis serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan kawasan kantor cabang dinas Pendidikan. Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e) melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan manajemen kepegawaian dan Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
- f) melaksanakan pengelolaan barang milik Negara/Daerah, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;

- g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan cabang dinas serta Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- i) melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

3. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Satuan Pendidikan

3.3. Sumber Daya Dinas Pendidikan

3.3.1 Jumlah ASN dan Non ASN

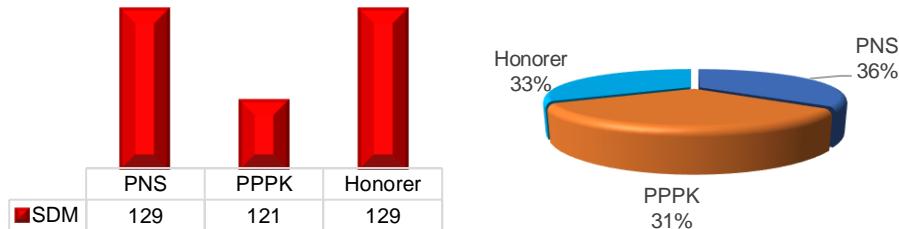
Jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Tabel 3.1) pada tahun 2025 sebanyak 376 orang, dengan rincian PNS 129, PPPK 119 dan Honorer 128 terbanyak PNS golongan III sejumlah 73 orang, selanjutnya golongan IV sebanyak 48 orang, golongan II sebanyak 8 orang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.1.
PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

NO	Jabatan	PNS Golongan (Orang)								TOTAL	
		IV		III		II		I			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	KEPALA DINAS	1								1	
2	SEKRETARIS	1								1	
3	KABID/KABALAI	2	2		1					5	
4	KACABDIS	2		3						5	
5	KASUBBAG/KASI		1	8	2					11	
6	FUNGSIONAL	18	14	12	5	1	1			51	
7	PELAKSANA	5	2	24	18	4	2			55	
JUMLAH		29	19	47	26	5	3			129	

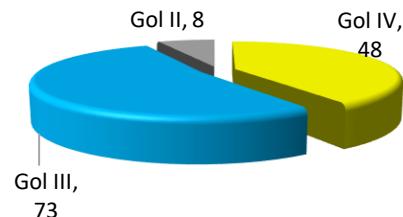
Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kepri 2025

Gambar 3.1
Jumlah Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

Gambar 3.2
Persentase PNS Berdasarkan Golongan
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan
Tahun 2025



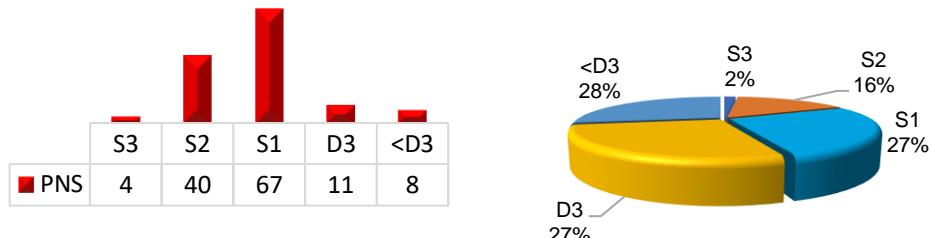
Sumber : Dinas Pendikan Prov. Kepri 2025

Dilihat dari tingkat pendidikan, dari sejumlah 129 orang PNS, terbanyak berpendidikan S-1/D-IV sejumlah 67 orang, S-2 sebanyak 39 orang selanjutnya S-3 sebanyak 4 orang, D-III sebanyak 11 orang, dan lebih rendah dari D-III sebanyak 8 orang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

NO	Jabatan	PNS Golongan (Orang)										Total	
		S-3		S-2		S-1/D-IV		D-III		<D-III			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	KEPALA DINAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	SEKRETARIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	KABID/KABALAI	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	5	
4	KACAB	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	5	
5	KASUBBAG/KASI	0	0	3	2	4	2	0	0	0	0	11	
6	FUNGSIONAL	1	0	9	12	19	7	2	1	0	0	51	
7	PELAKSANA	1	0	6	2	17	13	3	5	6	2	55	
JUMLAH		4	0	21	18	45	22	5	6	6	2	129	

Gambar 3.3
Jumlah Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status
Tahun 2025



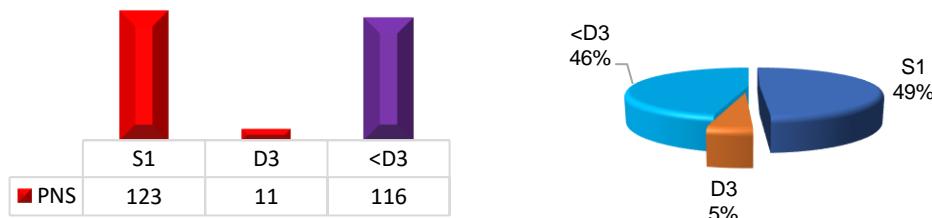
Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2025

Selain PNS, di Dinas Pendidikan juga terdapat pegawai non PNS sebanyak 250 orang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 121 orang, dan Jasa Tenaga Administrasi (JTA) sebanyak 129 orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar berpendidikan kurang dari D-III sebanyak 117 orang, selanjutnya S-1 sebanyak 121 orang, D-III sebanyak 10 orang, berpendidikan S-2 sebanyak 2 orang. Perincian berdasarkan pendidikan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 3.3
Jumlah SDM Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

NO	Jabatan	Non PNS Jenjang Pendidikan (orang)										TOTAL	
		S-3		S-2		S-1		D-III		<D-III			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	PPPK	0	0	0	0	56	61	5	6	75	35	238	
2	THL	0	0	0	0	2	4	0	0	5	1	12	
JUMLAH		0	0	0	0	58	65	5	6	80	36	250	

Tabel dan Gambar 3.4
Persentase SDM Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kepri 2025

3.3.2 Guru dan Tenaga Kependidikan

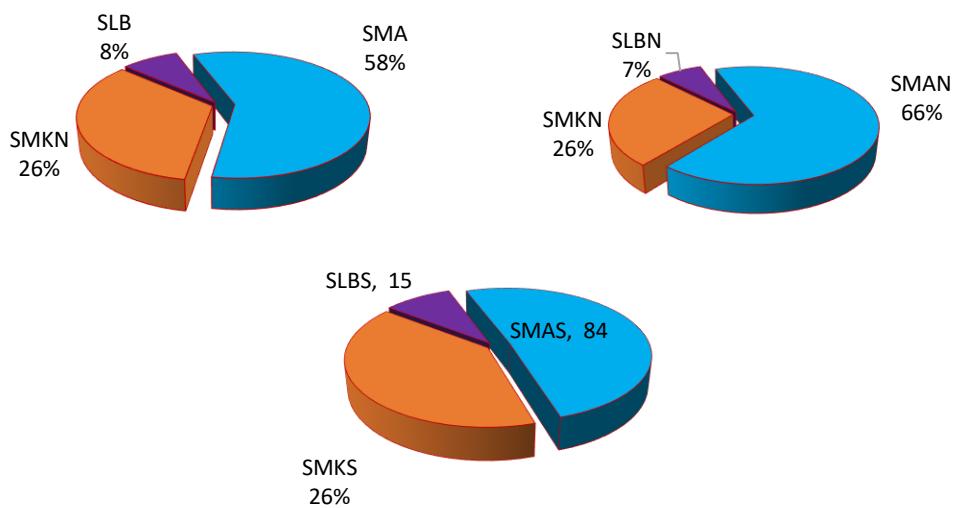
Definisi guru menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada, baik dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Guru harus mampu menjunjung tinggi etika, mengembangkan, dan menerapkan keutamaan yang menyangkut kebudayaan dan keilmuan.

Tabel 3.5
Jumlah Satuan Pendidikan
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Sekolah						Jumlah
		SMAN	SMKN	SLBN	SMAS	SMKS	SLBS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Batam	29	12	1	60	54	8	164
2	Tanjungpinang	6	5	2	7	4	2	26
3	Bintan	10	4	2	7	4	2	29
4	Karimun	16	5	2	5	4	3	35
5	Natuna	15	5	1	1	0	0	22
6	Lingga	15	4	1	3	1	0	24
7	Anambas	6	4	1	1	0	0	12
	Kep. Riau	97	39	10	84	66	15	312

Sumber : Dapodiki 2025

Gambar 3.5
Persentase Jenis Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Gambar 3.5 menjelaskan bahwa persentase sekolah menengah umum (SMA) lebih besar dari sekolah menengah kejuruan (SMK), 58% atau setara

dengan 181 satuan pendidikan merupakan pendidikan menengah umum (SMA), 26% atau setara 105 satuan pendidikan merupakan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sebanyak 8% atau 25 satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan khusus (SLB).

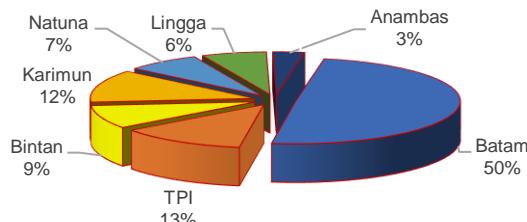
Jumlah tenaga guru dan kependidikan yang tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sampai akhir tahun 2025 tercatat pada Pendidikan menengah sebanyak 8.277 dimana sebanyak 6.168 pendidik dan sisanya 2.109 sebagai tenaga kependidikan.

Gambar 3.6
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan (SMA/SMK) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

	Batam	Tanjungpinang	Bintan	Karimun	Natuna	Lingga	Anambas	Kepri
Guru	3058	771	539	759	453	395	193	6168
Tendik	805	305	191	343	221	170	74	2109

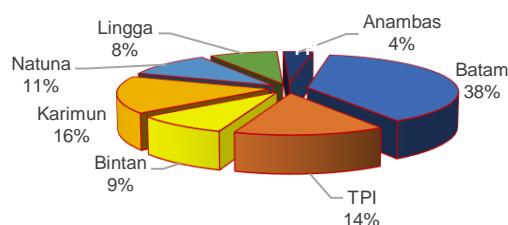
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.7
Persentase Sebaran Guru
Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.8
Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan
Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



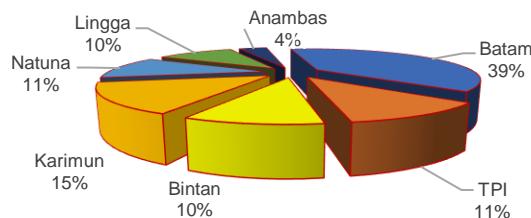
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.9
Sebaran Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan SMA/SMK Negeri di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

	Batam	Tanjungpinang	Bintan	Karimun	Natuna	Lingga	Anambas	Kepri
Guru SMAN	1169	333	291	436	346	303	112	2990
Guru SMKN	799	316	187	205	107	63	76	1753
Tendik SMAN	281	146	112	201	152	128	49	1069
Tendik SMKN	212	117	51	100	69	28	23	600

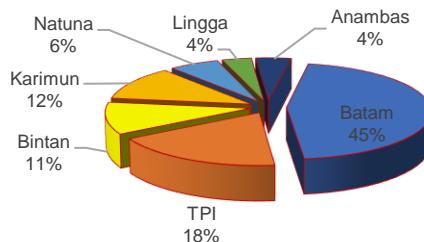
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.10
Persentase Sebaran Guru
Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



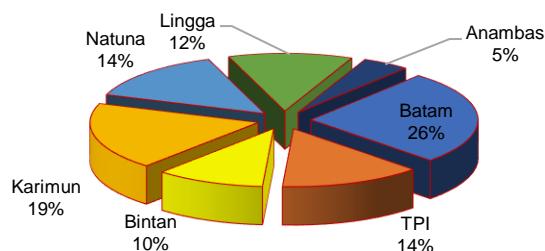
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.11
Persentase Sebaran Guru
Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



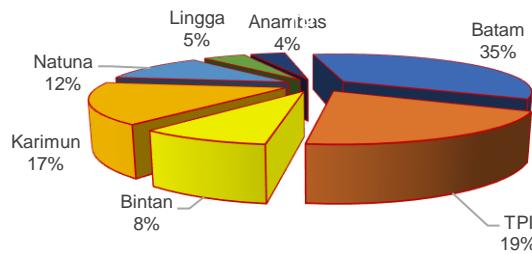
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.12
Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan
Pada Sekolah Menengah Atasi (SMAN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.13
Persentase Sebaran Tenaga Kependidikan
Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



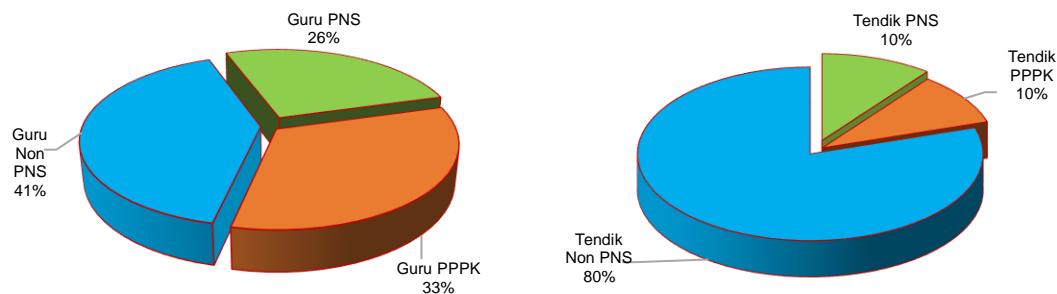
Sumber : Dapodik 2025

Tabel 3.6
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Guru				Jumlah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	546	973	1,624	3,143	14	50	773	837
2	Tanjungpinang	281	293	266	840	21	25	291	337
3	Bintan	202	198	168	568	14	27	162	203
4	Karimun	264	267	292	823	38	43	287	369
5	Natuna	181	161	120	462	36	36	158	230
6	Lingga	158	149	102	409	9	34	132	175
7	Anambas	55	76	67	198	11	11	58	80
Kepulauan Riau		1687	2117	2639	6443	243	226	1861	2231
Total		8,674							

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.14
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa (SMA/SMK/SLB)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

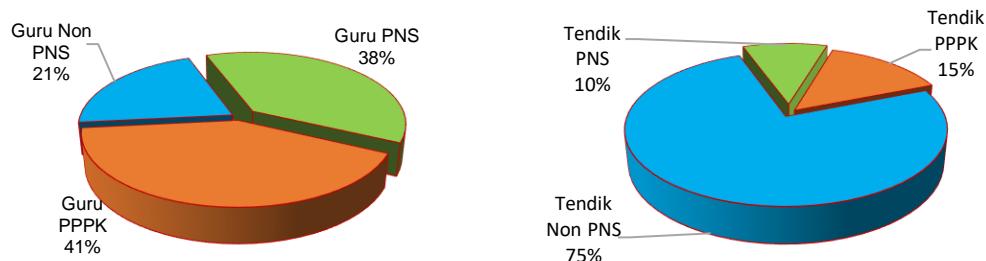


Tabel 3.7
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Guru				Jumlah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	360	551	258	1,169	10	37	234	281
2	Tanjungpinang	136	136	61	333	14	12	120	146
3	Bintan	141	90	60	291	13	19	80	112
4	Karimun	187	165	84	436	26	29	146	201
5	Natuna	136	124	86	346	27	25	100	152
6	Lingga	128	119	56	303	9	25	94	128
7	Anambas	36	51	25	112	10	7	32	49
Kepulauan Riau		1124	1236	630	2990	109	154	806	1069
Total						4059			

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.15
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

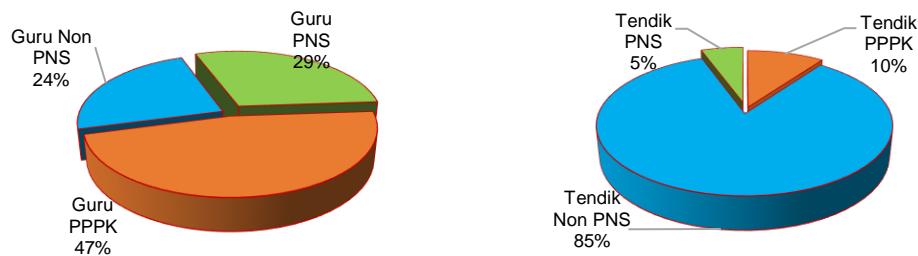


Tabel 3.8
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Guru				Jumlah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	176	414	209	799	4	11	197	212
2	Tanjungpinang	131	139	46	316	7	9	101	117
3	Bintan	55	101	31	187	1	8	42	51
4	Karimun	67	82	56	205	11	10	79	100
5	Natuna	42	36	29	107	9	10	50	69
6	Lingga	26	26	11	63	0	8	20	28
7	Anambas	19	25	32	76	1	4	18	23
Kepulauan Riau		516	823	414	1735	33	60	507	600
Total						2353			

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.16
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan SMKN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

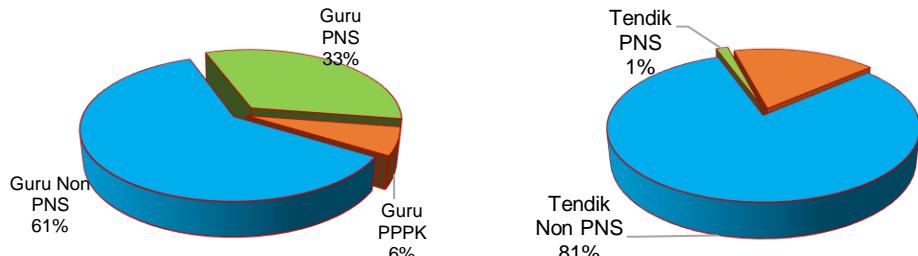


Tabel 3.9
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Guru				Jumlah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	7	8	9	27	0	2	21	25
2	Tanjungpinang	10	18	26	58	0	4	6	25
3	Bintan	6	7	9	22	0	0	7	6
4	Karimun	7	20	8	38	1	4	8	12
5	Natuna	3	1	5	9	0	1	4	9
6	Lingga	4	4	6	14	0	1	6	5
7	Anambas	0	0	5	5	0	0	21	6
Kepulauan Riau		37	7	68	173	1	12	55	68
Total					241				

Sumber : Dapodik 2025

Grafik 3.17
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Khusus Negeri (SLBN) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Guru dikategorikan berdasarkan pendidikannya yang mencakup jenjang pendidikan formal dari Strata 3 (S3), Strata 2 (S2), Strata Satu/Diploma IV (S1/D4) serta Diploma III , secara keseluruhan jumlah guru berpendidikan S3 sebanyak 5 guru, S2 Sebanyak 308 guru , S1 sebanyak

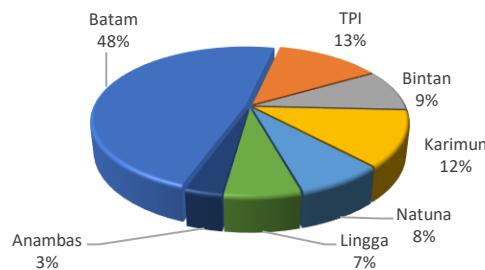
5968 guru, Diploma III sebanyak 48 guru dan sisanya Diploma III kebawah sebanyak 114 guru. Berikutjumlah guru berdasarkan pendidikan sbb :

Gambar 3.18
Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pada SMA/SMK dan SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

	Batam	Tanjungpinang	Bintan	Karimun	Natuna	Lingga	Anambas	Kepri
S3	3	2	0	0	0	0	0	5
S2	200	44	19	33	5	5	2	308
D3	35	3	3	4	2	1	0	48
<D3	66	11	10	14	4	7	2	114
S1	2839	780	536	772	451	396	194	5968

Sumber : Dapodik 2025

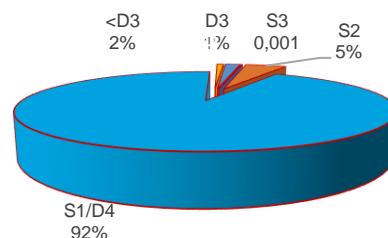
Gambar 3.19
Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Tempat Tugas
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan Gambar 3.19 diketahui jumlah guru terbesar mengajar di Kota Batam sebanyak 2.839 atau setara dengan 48% dari jumlah guru yang mengajar, diurutan kedua berada di Kota Tanjungpinang sebanyak 780 guru atau setara dengan 13% dan yang terendah berada di Kabupaten Anambas sebanyak 194 atau setara dengan 3% dari total seluruh guru.

Gambar 3.20
Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pada SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



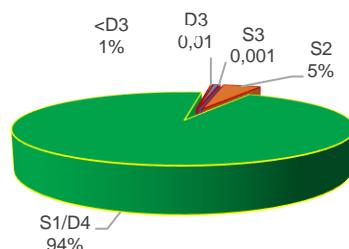
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.21
Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAN/SMKN/SLBN
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

	Batam	Tanjungpinang	Bintan	Karimun	Natuna	Lingga	Anambas	Kepri
S3	3	2	0	0	0	0	0	5
S2	144	39	17	17	5	4	2	228
S1	1830	660	476	647	451	372	190	4626
D3	4	2	3	1	2	0	0	12
<D3	14	4	5	1	4	4	1	33

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.22
Sebaran Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pada SMAN, SMKN dan SLBN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.23
Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada SMAS/SMKS/SLBS
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

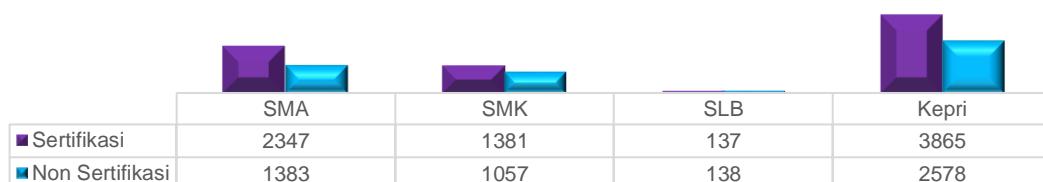
	Batam	Tanjungpinang	Bintan	Karimun	Natuna	Lingga	Anambas	Kepri
S3	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	56	5	2	3	0	1	0	67
S1	1009	120	60	125	0	24	4	1342
D3	31	1	0	3	0	1	0	36
<D3	52	7	6	13	0	3	1	82

Sumber : Dapodik 2025

Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara, sertifikasi diberikan apabila seorang guru telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Gambar 3.24
Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik
Pada SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



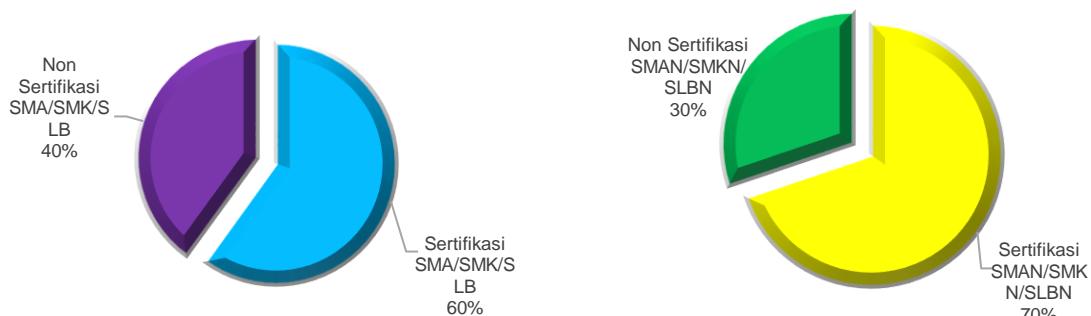
Sumber : Dapodik 2025

Tabel 3.10
Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik
Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

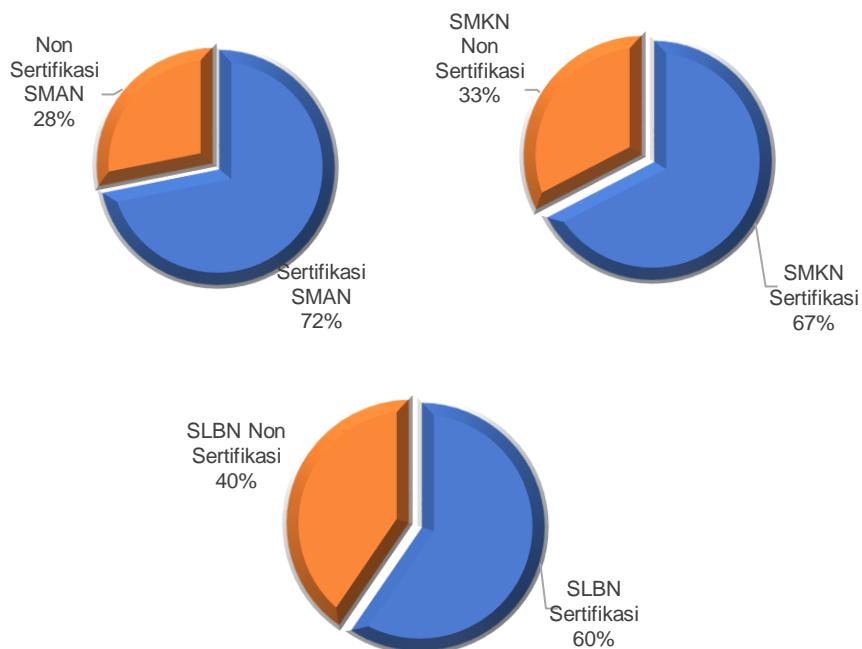
No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan					
		SMAN		SMKN		SLB	
		Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Batam	781	338	497	303	16	11
2	Tanjungpinang	252	81	233	82	33	25
3	Bintan	236	55	144	43	13	9
4	Karimun	350	86	152	53	29	9
5	Natuna	230	116	65	42	5	4
6	Lingga	228	75	48	15	7	7
7	Anambas	71	41	42	34	0	5
	Kep.Riau	2148	842	1181	572	103	70

Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.25
Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik Pada SMA/SMK dan SLB
Tahun Ajaran 2025/2026



Gambar 3.26
Persentase Guru Bersertifikasi Pendidik
Pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Tabel 3.11
Jumlah Guru Bersertifikasi Pendidik
Pada SMAS/SMKS/SLBS di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan					
		SMAS		SMKS		SLBS	
		Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Batam	154	380	159	397	25	33
2	Tanjungpinang	15	63	17	27	0	11
3	Bintan	5	35	5	16	1	6
4	Karimun	23	42	17	36	8	18
5	Natuna	0	0	0	0	0	0
6	Lingga	2	16	2	9	0	0
7	Anambas	0	5	0	0	0	0
	Kep.Riau	199	547	200	485	34	68

Sumber : Dapodik 2025

3.3.3 Satuan Pendidikan

Jumlah penduduk di suatu wilayah berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, luas wilayah menjadi faktor pendukung dalam memprediksi kebutuhan sarana pendidikan dimasa yang akan datang.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk provinsi berbentuk kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km², dan 58% penduduknya berada di Kota Batam. dan pada akhir tahun 2024, penduduk Kepulauan Riau sebanyak 2.378.541 jiwa. Pada Tahun 2025 jumlah satuan Pendidikan menengah dan khusus di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 351, dengan rincian sbb :

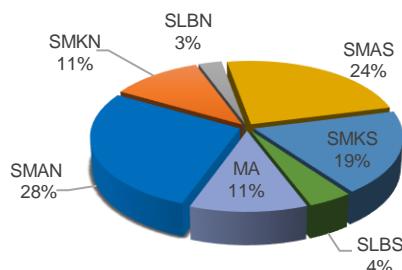
Tabel 3.12
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Satuan Pendidikan							Jumlah
		SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	SLBN	SLBS	MA	
1	Batam	29	60	12	54	1	8	15	179
2	Tanjungpinang	6	7	5	4	2	2	2	28
3	Bintan	10	7	4	4	2	2	4	33
4	Karimun	16	5	5	4	2	3	6	41
5	Natuna	15	1	5	0	1	0	4	26
6	Lingga	15	3	4	1	1	0	4	28
7	Anambas	6	1	4	0	1	0	5	17
	Kepulauan Riau	97	84	39	66	10	15	40	352

Sumber : Dapodik 2025

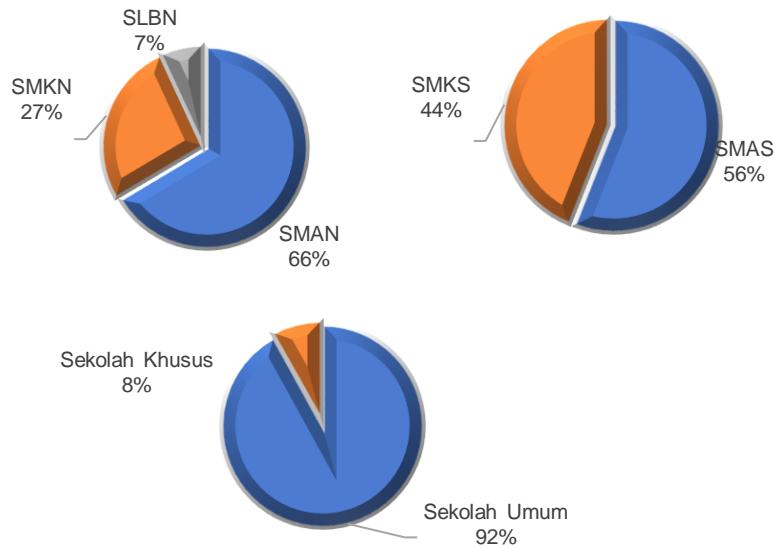
Tabel 3.12 menjelaskan sebanyak 146 satuan pendidikan atau setara dengan 41,60% merupakan satuan pendidikan yang dimiliki pemerintah sedangkan sisanya 205 satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa sebanyak 28% satuan pendidikan berstatus sebagai sekolah menengah atas negeri, 24% berstatus sebagai sekolah menengah kejuruan negeri sisanya 3% merupakan sekolah pendidikan khusus negeri.

Gambar 3.27
Sebaran Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

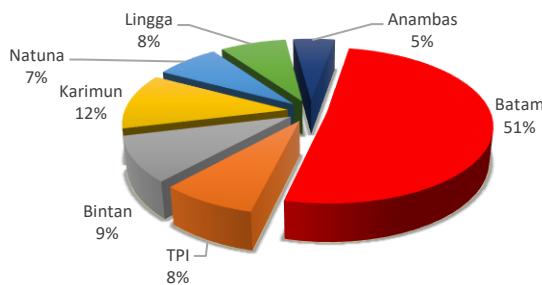


Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.28
Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenis Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Gambar 3.29
Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

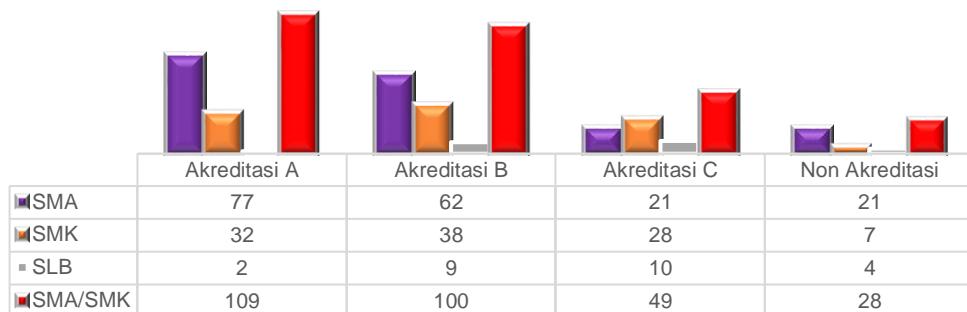


Sumber : Dapodik 2025

3.3.4 Akreditasi Sekolah

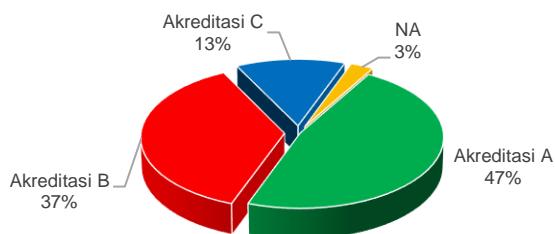
Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (*assesmen*) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (*visitasi*) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Berikut akreditasi SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Gambar 3.30
Akreditasi Satuan Pendidikan SMK/SMA/SLB
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



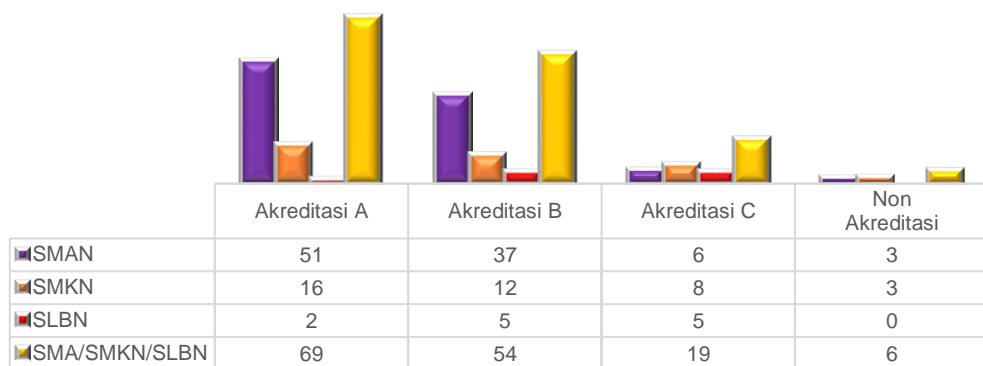
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.31
Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



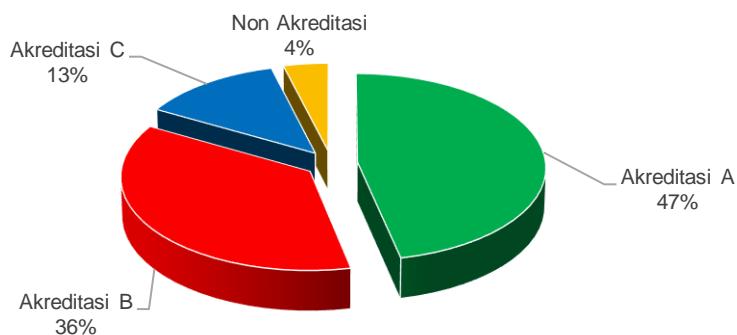
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.32
Akreditasi Satuan Pendidikan SMKN/SMAN/SLBN Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.33
Persentase Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



3.3.5 Peserta Didik

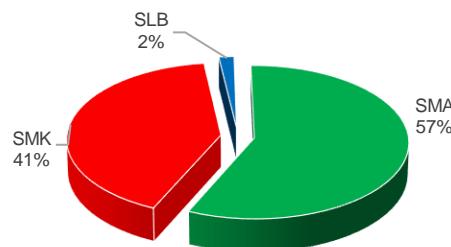
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.. Berikut peserta didik yang tersebar pada satuan Pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sbb :

Tabel 3.13
Jumlah Peserta Didik
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA	Jumlah Siswa SMK	Jumlah Siswa SLB	Jumlah Siswa	Jumlah Pendudk (16-18 Thn)
1.	Batam	31818	29655	668	62141	67357
2.	Tanjungpinang	6475	5612	411	12498	12994
3.	Bintan	4295	3197	152	7644	9913
4.	Karimun	8143	3256	374	11773	13917
5.	Natuna	3288	397	75	3760	4914
6.	Lingga	3564	464	50	4078	6267
7.	Anambas	1677	365	14	2056	2863
	Kepulauan Riau	59260	42946	1744	103950	117225

Sumber : Dapodik 2025

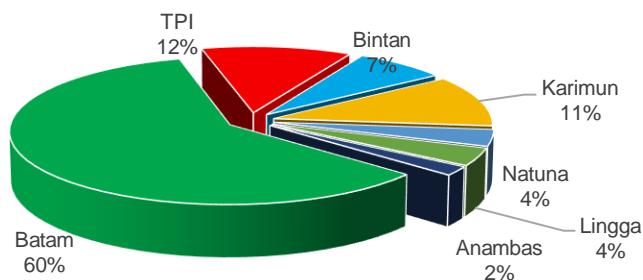
Gambar 3.34
Persentase Sebaran Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.34 menjelaskan bahwa sebanyak 57% atau setara dengan 59.260 peserta didik berasal dari satuan pendidikan menengah atas dan sebanyak 42.946 atau setara dengan 41% merupakan peserta didik yang berasal dari pendidikan vokasi.

Gambar 3.35
Persentase Sebaran Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

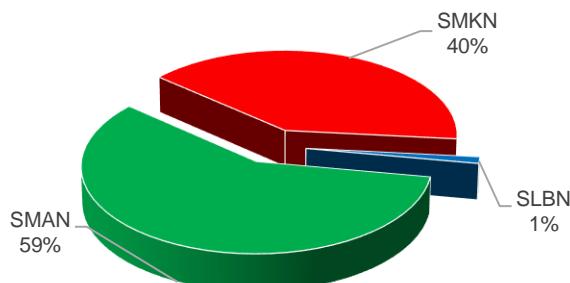


Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.35 secara jelas menggambarkan, dimana jumlah peserta didik terbesar berada di Kota Batam sebanyak 60% atau setara dengan 67.357 peserta didik, selanjutnya untuk posisi kedua terbesar jumlah peserta didik berada di Kota Tanjungpinang sebanyak 12% atau setara dengan 12994 peserta didik. Kabupaten Karimun verada di urutan selanjutnya yang memiliki peserta didik sebanyak 13917 jiwa atau setara dengan 11% dari total peserta didik serta Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah terkecil yang memiliki peserta didik yaitu sebanyak 2863

peserta didik atau setara dengan 2% dari total peserta didik uang ada di Kepulauan Riau.

Grafik 3.36
Percentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 3.36 menjelaskan sebaran peserta didik yang bersekolah pada satuan pendidikan menengah negeri tercatat sebanyak 86.495 peseta didik, dari data tersebut sebanyak 59% atau setara dengan 50.675 peserta didik bersekolah pada satuan pendidikan menengah atas dan sebanyak 34.783 atau 40% bersekolah pada satuan pendidikan vokasi dan sisanya sekitar 1% atau sebanyak 1.037 peserta didik berada di satuan pendidikan khusus negeri. Secara lengkap sebaran peserta didik pada satuan pendidikan negeri di kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan pada Gambar 3.37 di bawah ini.

Gambar 3.37
Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLB Negeri
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat penting karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial secara luas. Peranan masyarakat tersebut diwujudkan dalam penyedian sarana dan prasarana pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang modern dan telah banyak menghasilkan peserta didik yang berhasil. Pada tahun 2025 jumlah satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 185 satuan pendidikan, yang terdiri dari satuan pendidikan menengah umum sebanyak 84 satuan pendidikan, 66 satuan pendidikan vokasi dan 15 satuan pendidikan khusus.

Berikut sebaran peserta didik pada satuan pendidikan swasta di Provinsi Kepulauan Riau sbb :

Gambar 3.38
Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Swasta
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026

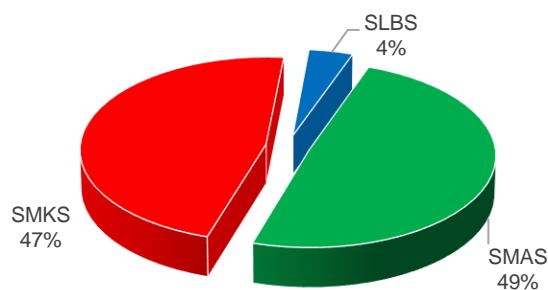


Sumber : Dapodik 2025

Pada Gambar 3.38 menjelaskan sebaran peserta didik yang bersekolah pada satuan pendidikan menengah yang dikelola masyarakat tercatat sebanyak 17.455 peseta didik, dari data tersebut sebanyak 49% atau setara dengan 8.585 peserta didik bersekolah pada satuan pendidikan menengah atas dan sebanyak 8.163 atau setara dengan 47% bersekolah pada satuan pendidikan vokasi dan sisanya sekitar 4% atau sebanyak 707 peserta didik berada di satuan pendidikan khusus.

Secara lengkap sebaran peserta didik berdasarkan pada jenis satuan pendidikan negeri di kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan pada Gambar 3.39 di bawah ini.

Gambar 3.39
Persentase Sebaran Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

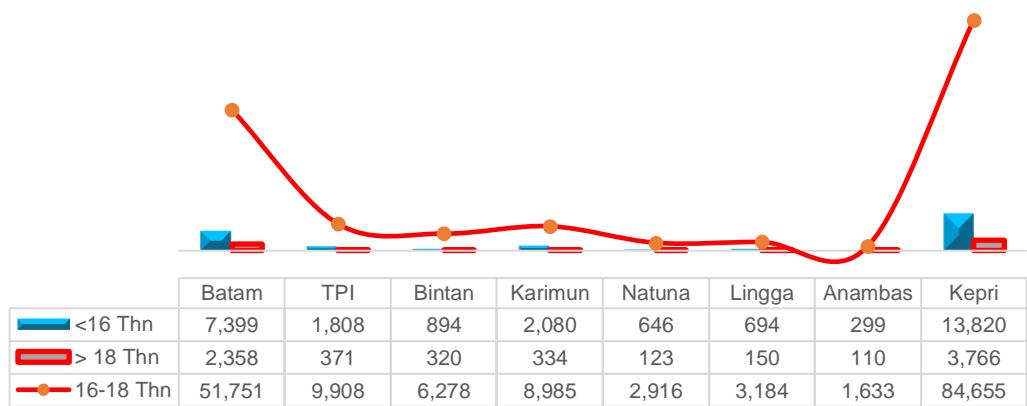


3.3.6. Kelompok Umur Peserta Didik

Kewenangan pendidikan pada satuan pendidikan menengah atas, pendidikan vokasi dan pendidikan khusus merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, sesuai UU No. 23 Tahun 2014, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta manajemen pendidik, tenaga kependidikan (guru, mutasi, gaji, pangkat), kurikulum, akreditasi, dan infrastruktur, dengan tujuan pemerataan pendidikan, meskipun ada wacana pengembalian ke Kabupaten/Kota untuk efektivitas lokal.

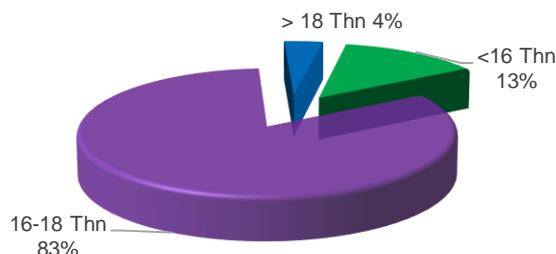
Kelompok umur sasaran pada pendidikan menenengah atas dan kejuruan meliputi kelompok umur 16-18 tahun dan kelumpok umur pada pendidikan khusus 4-17 tahun. Berikut jumlah pesertra didik berdasarkan kelompok umur sbb :

Gambar 3.40
Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur Pada SMA dan SMK
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

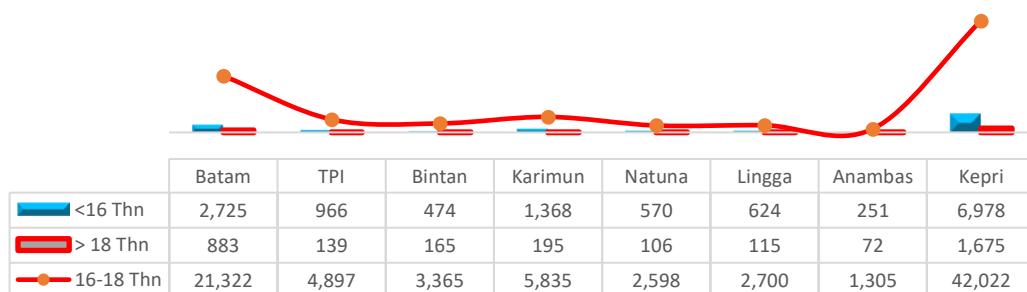
Gambar 3.41
Persentase Sebaran Peserta Didik Berdasarkan Kelompok Umur
Pada SMA dan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan pada Gambar 3.41 masih terdapat peserta didik dibawah kelompok umur 16 tahun dengan jumlah sebanyak 13.820 peserta didik atau setara dengan 13% dan peserta didik yang berusia diatas 18 tahun tercatat sebanyak 3.765 atau setara dengan 3% dari seluruh peserta didik yang terdaftar. Selanjutnya akan ditampilkan jumlah peserta didik berdasarkan umur berdasarkan jenis satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sbb :

Gambar 3.42
Sebaran Peserta Didik pada SMAN Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

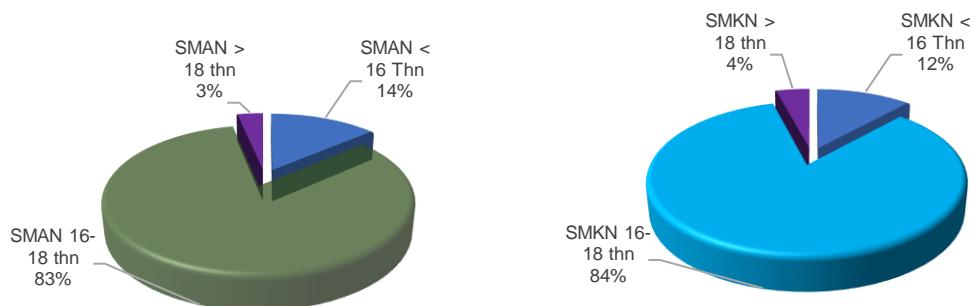
Berdasarkan pada Gambar 3.42 sebagian besar peserta didik berdasarkan umur berada diantara umur 16-18 tahun sebanyak 42.022 atau setara dengan 83%, kelompok umur dibawah 16 tahun tercatat peserta didik berjumlah 6.978 atau setara dengan 18% dan peserta didik yang berusia diatas 18 tahun tercatat sebanyak 11.675 atau setara dengan 3% dari seluruh peserta didik yang terdaftar.

Gambar 3.43
Sebaran Peserta Didik Pada SMKN Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

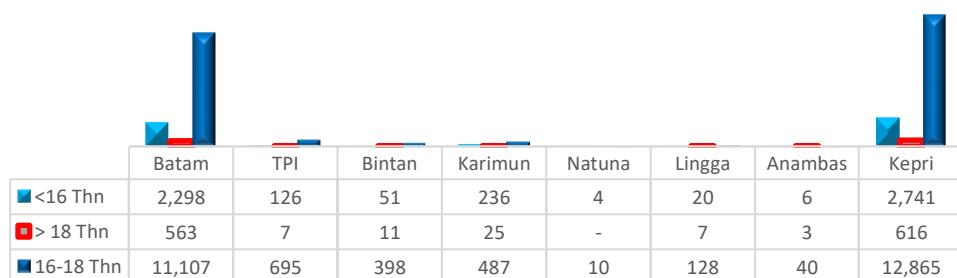
Gambar 3.44
Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAN dan SMKN
Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

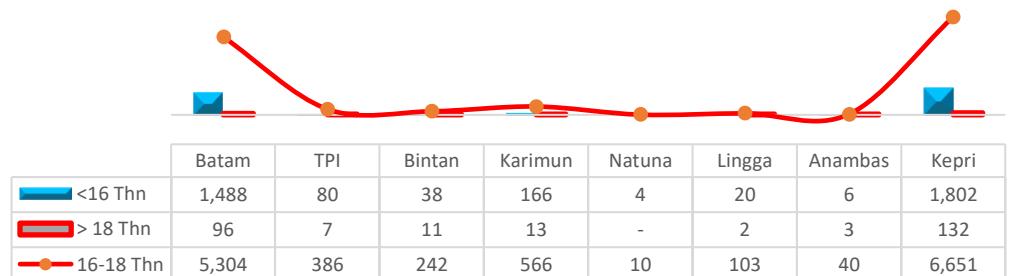
Distribusi peserta didik pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, sebaran peserta didik berdasarkan kelompok umur mengalami kemiripan yang terjadi pada satuan pendidikan milik pemerintah. Secara garis besar diuraikan pada gambar sbb :

Gambar 3.45
Sebaran Peserta Didik pada SMAS dan SMKS Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



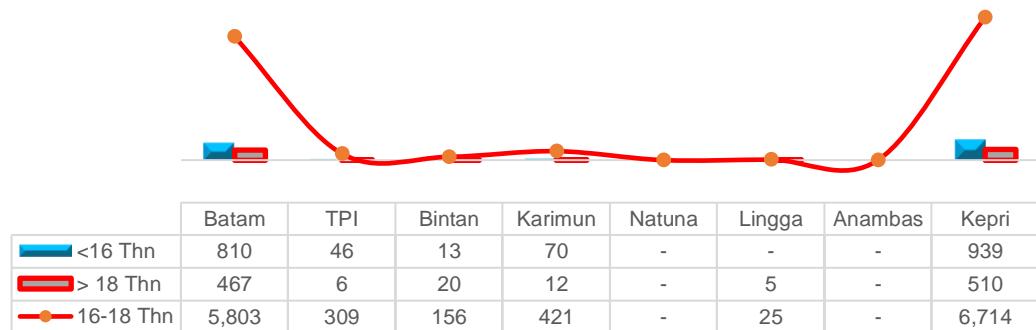
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.46
Sebaran Peserta Didik pada SMAS Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



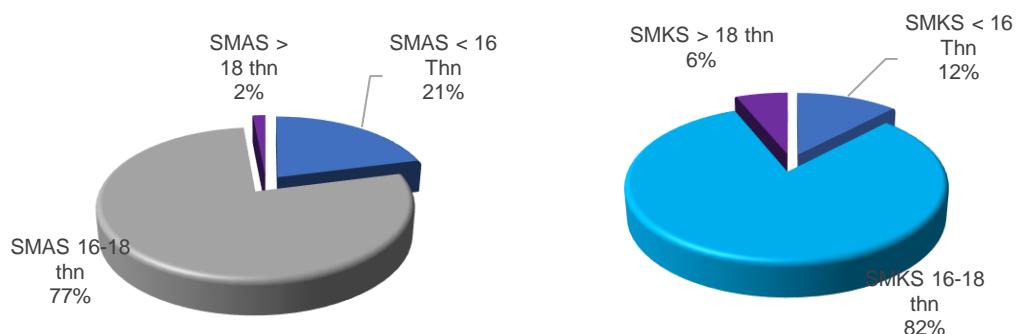
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.47
Sebaran Peserta Didik Pada SMKS Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.48
Sebaran Persentase Peserta Didik pada SMAS dan SMKS
Berdasarkan Umur Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



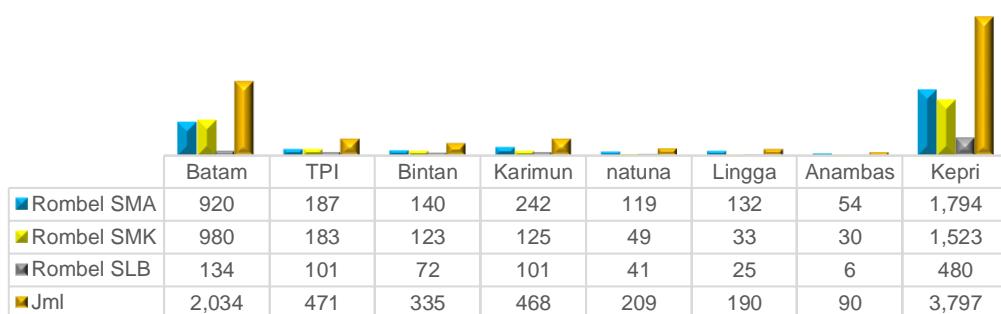
Sumber : Dapodik 2025

3.3.7. Rombongan Belajar

Rombongan Belajar (Rombel) adalah sekelompok peserta didik atau siswa yang terdaftar dan dikelompokkan dalam satu kelas pada suatu satuan pendidikan. Definisi ini mengacu pada jumlah siswa dalam satu rombel, yang diatur dalam peraturan seperti Permendikbud. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Gambar 3.49

Jumlah Rombongan Belajar Pada SMA/SMK dan SLB
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

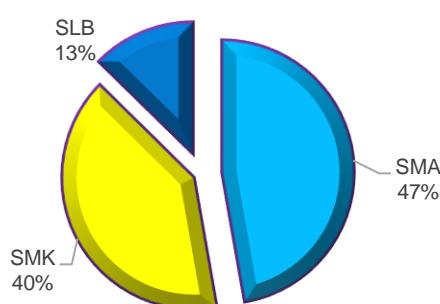


Sumber : Dapodik 2025

Berdasarkan pada Gambar 3.49 jumlah rombel di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 3.797 rombel, jumlah rombel terbesar ada pada satuan pendidikan sekolah menengah atas sebanyak 1.794 atau setara dengan 47% dan rombel pada satuan pendidikan vokasi sebanyak 1.523 atau setara dengan 40% dan sisanya rombel yang ada pada satuan pendidikan khusus.

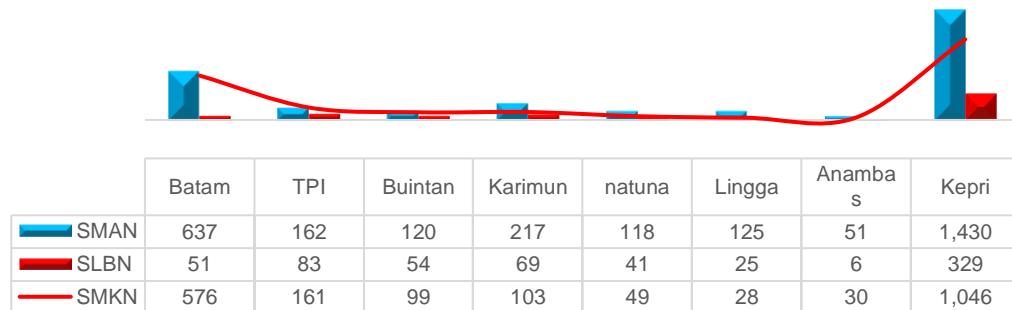
Gambar 3.50

Persentase Sebaran Rombongan Belajar Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

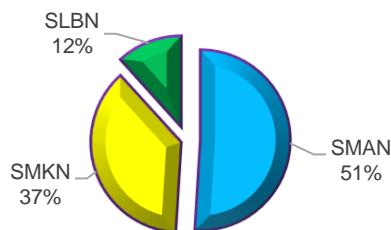
Gambar 3.51
Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.51 menjelaskan jumlah rombel di Provinsi Kepulauan Riau pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1.430 rombel, pada pendidikan vokasi/SMKN sebanyak 1.046 atau setara dengan 37% dan rombel pada pendidikan khusus tercatat sebanyak 329 atau setara dengan 12% dari seluruh rombel yang ada sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar 3.52.

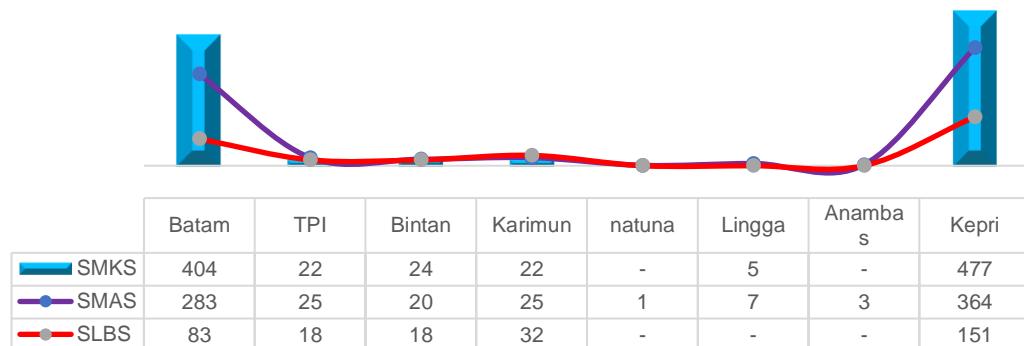
Gambar 3.52
Percentase Rombongan Belajar
Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

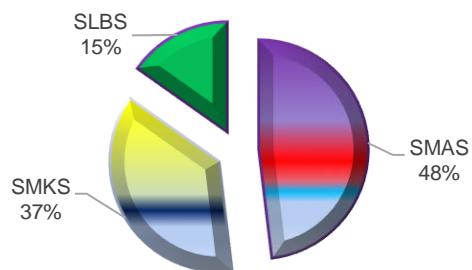
Distribusi rombongan belajar pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat, terdapat perbedaan dalam distribusi dengan rombongan belajar pada satuan pendidikan pemerintah, berdasarkan pada Gambar 3.53 jumlah rombel lebih besar pada satuan pendidikan dibanding dengan jumlah rombongan belajar yang ada pada satuan pendidikan menengah. Berikut dijelaskan pada Gambar 3.53 dan 3.54 sbb :

Gambar 3.53
Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.54
Persentase Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

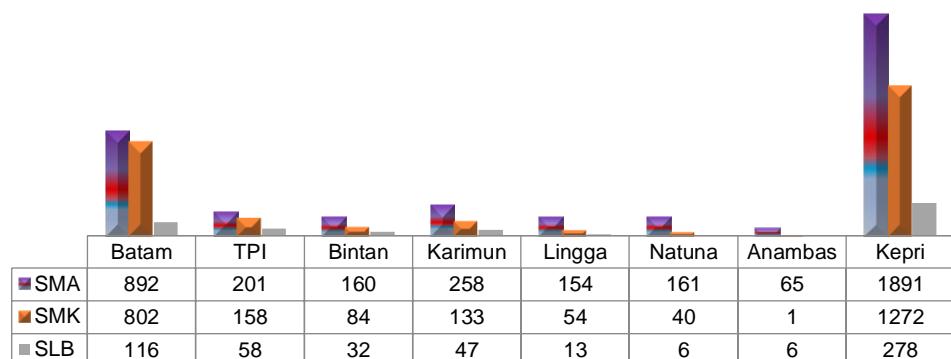


Sumber : Dapodik 2025

3.3.8. Ruang Kelas Belajar

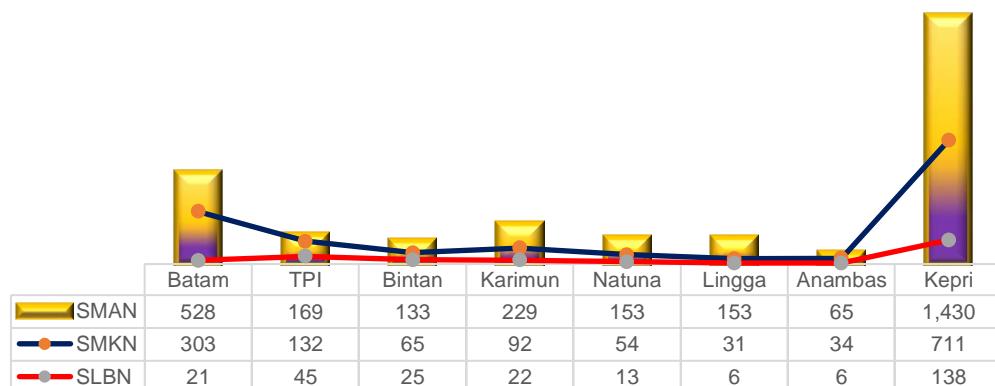
Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) . Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai.. Konfigurasi fisik ruang kelas yang baik dan pengaturan barang yang baik lebih dari sekadar pilihan gaya,pengaturan tempat duduk di ruang kelas tatap muka mempengaruhi pembelajaran, motivasi dan partisipasi siswa Berikut jumlah ruang kelas berdasarkan kab/kota tahun 2025 sbb :

Gambar 3.55
Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Ajaran 2025/2026



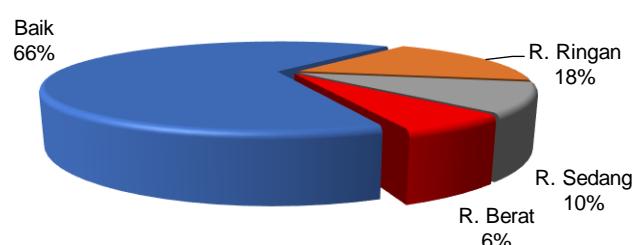
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.56
Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

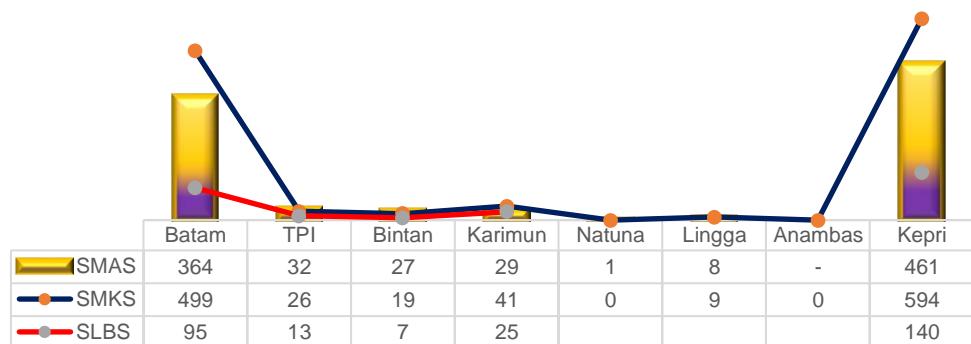


Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.57
Kondisi Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Gambar 3.58
Jumlah Ruang Kelas Pada Satuan Pendidikan SMAS/SMKS/SLBS
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026

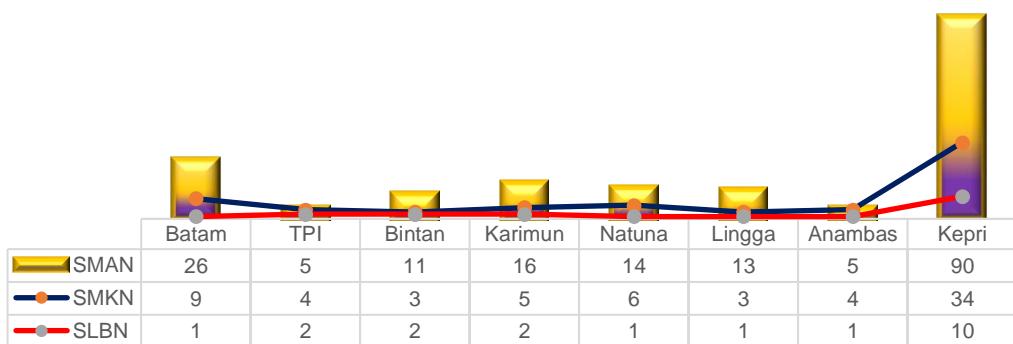


Sumber : Dapodik 2025

3.3.9. Ruang Perpustakaan

Perpustakaan adalah lembaga atau tempat untuk mengelola dan menyimpan buku, koleksi karya tulis, cetak, dan rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi masyarakat. Fungsi utamanya adalah menyediakan akses terhadap pengetahuan dan informasi melalui berbagai jenis layanan dan fasilitas yang beragam. Jumlah perpustakaan pada satuan negeri di Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup dimana terdapat 90 perpustakaan yang ada pada sekolah milik pemnerimntah di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut sebaran perpustakaan yang ada sbb :

Gambar 3.59
Jumlah Ruang Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

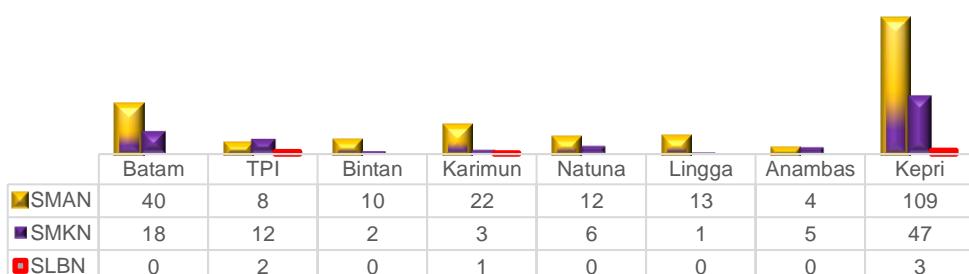
3.3.10. Laboratorium, Laboratorium Bahasa, Laboratorium IPA, Laboratorium Fisika dan Laboratorium Biologi

Laboratorium sekolah adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan khusus di lingkungan sekolah untuk kegiatan praktikum, eksperimen, dan penelitian siswa, yang berfungsi mempraktikkan teori, mengembangkan keterampilan ilmiah, serta menumbuhkan sikap ilmiah, dan menjadi sarana penting dalam mendukung pembelajaran sains seperti fisika, kimia, dan biologi. Tujuan laboratorium adalah menyediakan tempat dan peralatan untuk penelitian, eksperimen, dan pengukuran ilmiah guna menguji teori, memecahkan masalah, dan mengembangkan pengetahuan

Laboratorium modern memiliki furnitur yang fleksibel dan kegiatan di dalamnya terintegrasi langsung dengan pelajaran. Fungsi dan Manfaat laboratorium bagi peserta didik sbb :

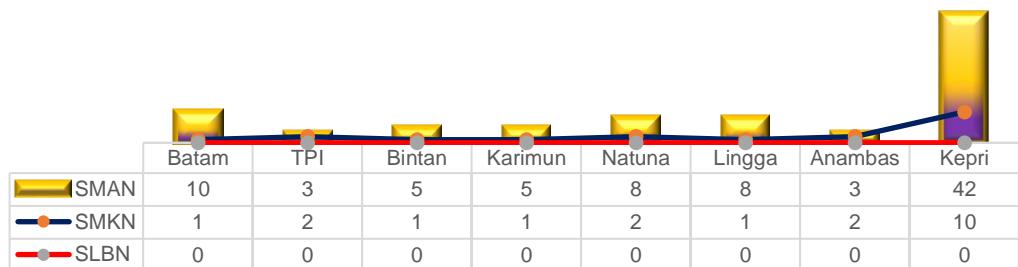
1. Mempraktikkan Teori, Siswa dapat menerapkan pengetahuan dan konsep yang telah dipelajari di kelas melalui percobaan langsung.
2. Mengembangkan Keterampilan Sains, Laboratorium melatih siswa dalam keterampilan seperti pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan pemecahan masalah.
3. Menumbuhkan Sikap Ilmiah, Siswa diajak untuk bersikap teliti, kritis, dan memiliki semangat untuk bertanya dan menemukan hal baru.
4. Sarana Belajar dan Penelitian, Laboratorium menjadi wadah pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen dan penelitian sederhana.

Gambar 3.60
Jumlah laboratorium Komputer Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



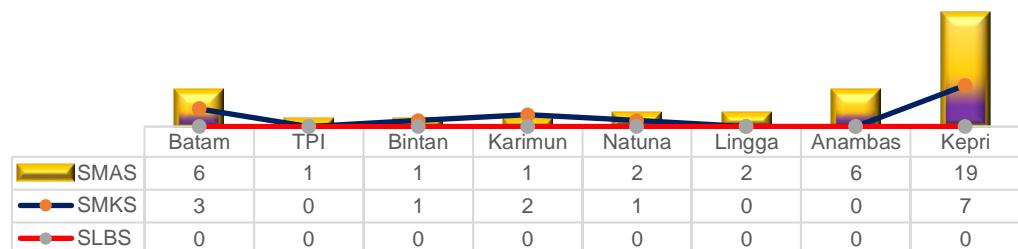
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.61
Jumlah laboratorium Bahasa Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



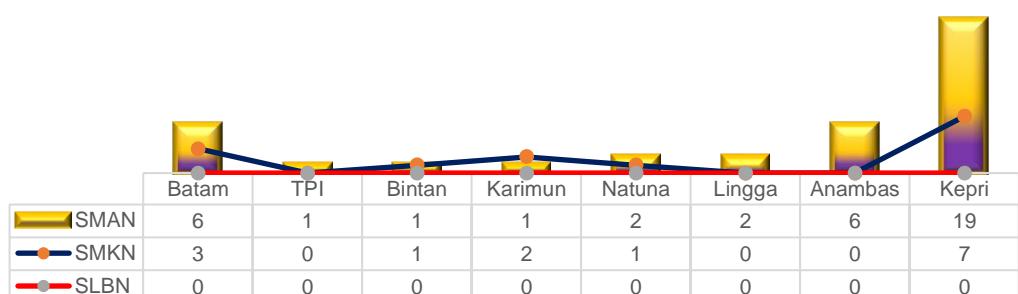
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.62
Jumlah laboratorium IPA Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



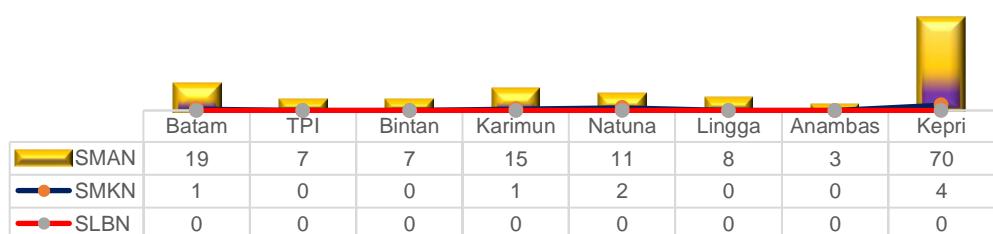
Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.63
Jumlah laboratorium Fisika Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran 2025/2026



Sumber : Dapodik 2025

Gambar 3.64
Jumlah laboratorium Biologi Pada Satuan Pendidikan SMAN/SMKN/SLBN
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Ajaran Tahun 2025/2026



Sumber : Dapodik 202

BAB IV

PENETAPAN KINERJA PENDIDIKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sama dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 tahun adalah **Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”.**

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Makmur

Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

2. Berdaya Saing

Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

3. Berbudaya

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak

terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkokoh hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya

ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

4.2. TUJUAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya mutu pendidikan.
 - b. Meningkatnya akses layanan Pendidikan
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif .
2. Memperkuat kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) di sekolah.
3. Meningkatkan akreditasi sekolah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal.
5. Meningkatkan sinkronisasi antara lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri.
6. Mendorong pengembangan SMK Negeri dengan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.
7. Mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata.
8. Akselerasi pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

9. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi anak tidak sekolah atau berkebutuhan khusus.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan standar pelayanan publik.

4.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pemberian ijin belajar, pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penciptaan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah.
2. Peningkatan peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, menjaga kinerja guru dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah.
3. Perbaikan strategi pembelajaran dari pengajaran (teaching) menjadi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pemelajaran (learning), dan peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.
4. Peningkatan ketepatan dalam penetapan kejuruan pada SMK dan pengembangan kerjasama SMK dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri.
5. Peningkatan fasilitasi pembentukan pola pengelolaan keuangan BLUD pada SMK Negeri.
6. Peningkatan gerakan pendidikan untuk memastikan keberlanjutan akses pendidikan dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

7. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan daya tampung pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru.
8. Peningkatan pembinaan sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
9. Peningkatan pelaksanaan program afirmasi bagi anak tidak sekolah atau berkebutuhan khusus, dengan mendorong kembali untuk mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.
10. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan pengelolaan dan pengamanan administrasi kepemilikan aset pendidikan.
11. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pelayanan.

4.4. PROGRAM-PROGRAM TAHUN 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

4.5. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 beserta target kinerja di tuangkan dalam table dibawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Dasar	Target				
			2020	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan akses dan mutu pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	10,12	10,14	10,15	10,16	10,17	10,18
		Harapan Lama Sekolah	12,87	12,90	12,93	12,94	12,95	12,96
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,62	100	100	100	100	100
Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimum B	71,53	81	82	83	84	85
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	17,00	24,32	27,03	29,73	32,43	35,14
	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian	Na	21	22	23	24	25
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	82,49	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	77,20	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	83,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00
		Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK	Na	1: 36	1: 36	1: 36	1: 36	1: 36
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbahwa	Na	95,81	95,82	95,83	95,84	95,85
		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	72,99	73,15	73,30	73,45	73,50	73,55

4.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEPALA DAERAH

Indikator kinerja kinerja Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 beserta target kinerja meliputi :

1. Rata- Rata Lama Sekolah (RLS)
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berikut capaian kinerja kepala daerah, berdasarkan tujuan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana pembangunan Jangka Panjang 2021-2026 sbb :

4.6.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) : Rata-rata lamanya masa yang dilalui dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut proses pendidikan sudah selesai. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di wilayah tersebut. RLS merupakan salah satu unsur dalam menghitung Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian kinerja Rata-Rata Lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun **2025** ditargetkan pada angka **10,16** dan realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat pada angka **10,72** atau setara dengan **105,4% dari target.**

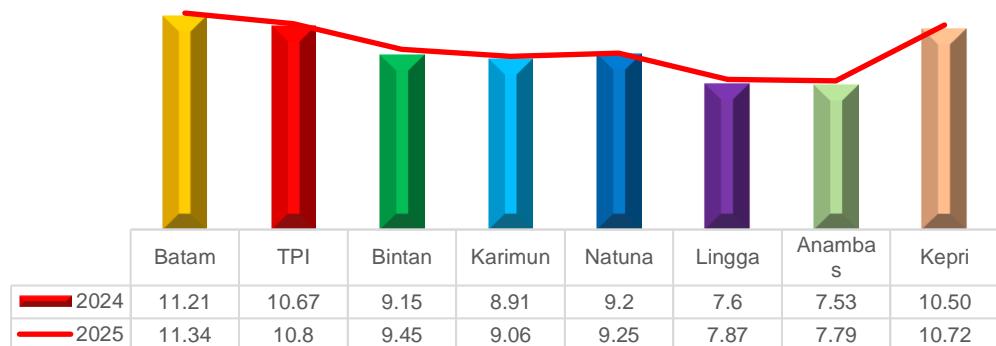
Berikut capaian RLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb :

Gambar 4.1
Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024



Sumber : BPS RI 2025

Gambar 4.2
 Realisasi Kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RLS)
 Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024-2025



Sumber : BPS RI 2025

4.6.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh), HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Pencapaian kinerja harapan lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 membaik di tahun 2025, kinerja harapan lama sekolah di Kepulauan riau tahun 2025 mencapai 13,28 sedikit dibawah capaian nasional 13,30. Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, Pada tahun **2024** ditargetkan pada angka **12,94** dengan capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai **13,27** atau setara dengan **102,5%**. Sedangkan untuk tahun 2025 kinerja HLS Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi target 102,51%. Berikut perkembangan harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 sbb :

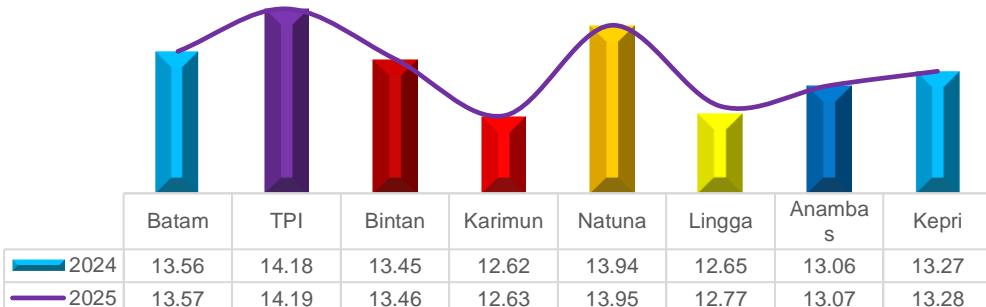
Gambar 4.3
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025



Sumber : BPS RI 2025

Pencapaian kinerja Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, menunjukan bahwa Kota Tanjungpinang memiliki capaian tinggi. Dengan demikian masyarakat Kota Tanjungpinang memiliki harapan sekolah yang lebih lama disbanding Kab/Kota di Provinsi Riau.

Gambar 4.4
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : BPS RI 2025

4.6.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK merupakan Angka yang mengambarkan bagian dari seluruh penduduk usia 16-18 tahun (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) yang sedang bersekolah SMA/SMK. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK merupakan Angka yang mengambarkan bagian dari seluruh penduduk usia 16-18 tahun (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) yang sedang bersekolah SMA/SMK. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

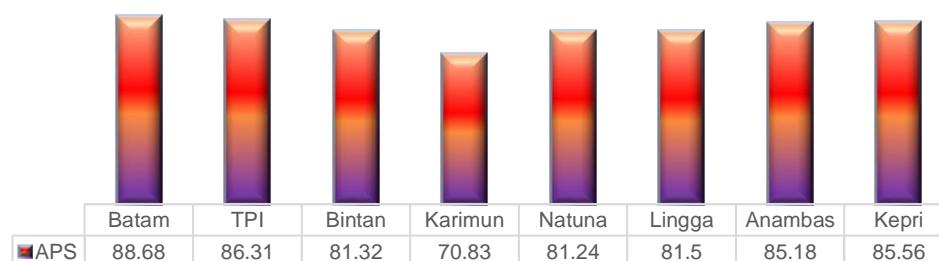
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditargetkan sebesar **100%**, dimana realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan berada pada angka **85,56%** atau setara dengan capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai 85,56%. Berikut capaian HLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 sbb

Gambar 4.5
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024



Sumber : BPS RI 2024

Gambar 4.6
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : BPS RI 2024

4.7. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan RENSTRA 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas.

Secara umum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi kepala Daerah yang di emban Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 9 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimum B	%	83	81,25	97,89
2	Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	97,22	97,36	100,14

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
3	Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	%	33	35,59	107,85
4	Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	%	35	89,59	225,97
5	Percentgase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	%	12,58	14.20	112,87
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	99	108,45	109,54
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	80	87,94	109,92
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	87,00	117,98	135,60
9	Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	Ratio	1:36	1:23,5	136,11

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 4.2 disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang melampaui target sebanyak 8 indikator. Indikator dimaksud terdiri atas Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi dengan capaian kinerja 100,14%, Tingkat penyerapan lulusan SMK di dunia usaha dan Dunia industry (IDUKA) dengan capaian kinerja 225,97%, Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK dengan capaian kinerja 109,54%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA.MA.SMK dengan capaian kinerja 109,92%, Angka Partisipasi Kasar SLB dengan capaian kinerja 135,60% dan Rasio siswa perkelas SMA/MA/SMK/MAK dengan capaian kinerja 136,11%.

4.7.1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (assesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja

sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Di samping itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Akreditasi sekolah yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada dan 8 Standar lainnya yang harus di miliki oleh satuan pendidikan. Akreditasi bukan hanya sekadar pemberian label atau sertifikat, tetapi juga merupakan suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap Lembaga Pendidikan, Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Berikut capaian kinerja SMAN/SMKN/SLBN terakreditasi minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

**Tabel 4.3
SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi Minimal B**

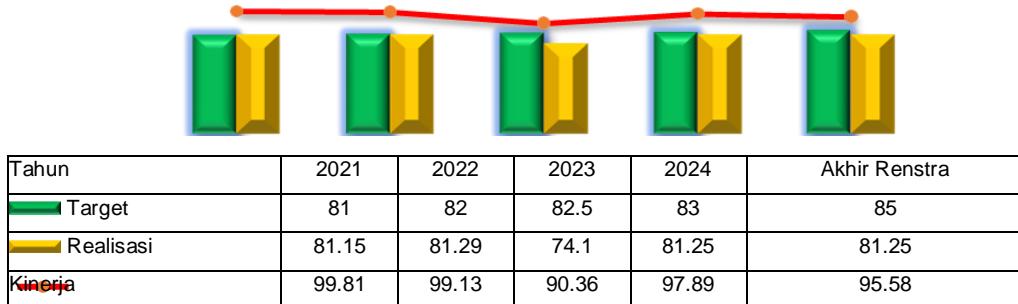
No	Kabupaten/Kota	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri Terakreditasi Minimal B	SMA/SMK/SLB Terakreditasi Minimal B
1	Batam	41	32	78.05
2	Tanjungpinang	13	12	92.31
3	Bintan	16	13	81.25
4	Karimun	23	21	91.30
5	Natuna	21	16	76.19
6	Lingga	20	16	80.00
7	Anambas	10	7	70.00
Provinsi		144	117	81.25

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indicator sasaran SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B pencapaian kinerja pada tahun 2024 terealisasi 81,25% dari target 83% atau setara dengan pencapaian kinerja 97,89% dengan peringkat kinerja Baik.

Perkembangan capaian kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B di Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif, kondisi salah satu penyebabnya adalah masa waktu akreditasi sekolah yang sudah kadaluarsa serta terdapat penambahan sekolah baru pada beberapa tahun terakhir yang secara regulasi penilaian akreditasi belum dapat dilakukan karena sekolah yang akan dilakukan penilaian akreditasi belum memenuhi syarat secara regulasi.

Gambar 4.8 Berikut menjelaskan Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024.

Gambar 4.7
Analisis Perbandingan
Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2024



4.7.2. SMK Negeri Terevitalisasi

Revitalisasi SMK adalah upaya terencana, terukur, dan terorganisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan kejuruan. Revitalisasi SMK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. SMK merupakan salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk terjun langsung di dunia kerja setelah lulus.

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus

berkembang Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI, inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana dan prasarana utama, pemutakhiran program kerja sama industry, pengelolaan dan penataan lembaga, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Serta perbaikan dan penyelarasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (link and match) dengan DUDI.

Tabel 4.4
Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah SMK Negeri	Jumlah SMK Negeri terevitalisasi	SMA/SMK/SLB Terakreditasi Minimal B
1	Batam	11	10	90.91
2	Tanjungpinang	5	5	100.00
3	Bintan	4	4	100.00
4	Karimun	5	5	100.00
5	Natuna	5	5	100.00
6	Lingga	4	4	100.00
7	Anambas	4	4	100.00
Provinsi		38	37	97.368

Berdasarkan Tabel 4.4 menjelaskan bahwa capaian kinerja SMKN yang terevitalisasi pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 97,36% diatas target kinerja 97,22 % dengan tingkat capaian kinerja 100,14% dengan predikat kinerja Sangat baik

4.7.3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan

Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan dengan menghitung jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi/sekolah kedinasan dibagi dengan jumlah siswa yang lulus pada tahun 2025. Semakin tinggi lulusan peserta didik dari sekolah menengah atas yang melanjutkan Pendidikan pada perguruan tinggi

negeri/sekolah kedinasan, mengindikasikan bahwa mutu Pendidikan di suatu wilayah semain baik. Ada beberapa jalur yang dapat digunakan untuk lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), calon mahasiswa bisa mengikuti salah satu jalur seleksi berikut:

- a. SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi): Jalur ini berbasis prestasi akademik dan non-akademik. Siswa akan diseleksi berdasarkan nilai rapor, prestasi, dan portofolio tanpa harus mengikuti tes tertulis.
- b. SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) jalur ini Seleksi Nasional Berbasis Tes adalah jalur masuk perguruan tinggi yang menggunakan tes tertulis sebagai penentu kelulusan.
- c. Jalur Mandiri, Setiap PTN memiliki jalur mandiri yang bisa dibuka setelah SNBP atau SNBT. Sistem seleksi beragam, termasuk melalui jalur prestasi dan tes ujian masuk PTN.

Lulusan Sekolah Menengah Atas memiliki beberapa pilihan setelah lulus, alumni SMA dapat bekerja pada DUDI, melanjutkan pendidikan, mendirikan usaha/berusaha. Lulusan SMA dapat melanjutkan ke Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik maupun sekolah kedinasan.

Tabel 4.5
Percentase siswa SMA yang diterima di Perguruan Tinggi
Tahun2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Lulus SMA	Jumlah Siswa Lulus di PTN Dalam Provinsi	Jumlah Siswa Lulus di PTN (%)
1	Batam	5253	1638	31.18
2	Tanjungpinang	1313	517	39.38
3	Bintan	1187	587	49.45
4	Karimun	2101	541	25.75
5	Natuna	1064	445	41.82
6	Lingga	973	479	49.23
7	Anambas	437	181	41.42
Provinsi		12328	4388	35.59

Berdasarkan Tabel 4.5 menjelaskan bahwa capaian kinerja lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan

Riau terealisasi 35,598% atau setara 107,85% dari realisasi kinerja dengan predikat kinerja Sangat Baik.

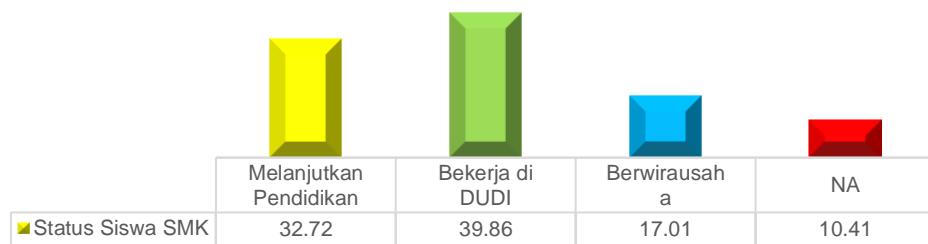
4.7.4. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yg Bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)

Transformasi pendidikan vokasi melalui program SMK Pusat Keunggulan berhasil melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Transformasi itu juga berhasil meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap lulusan pendidikan vokasi. Peningkatan kepercayaan DUDI terhadap pendidikan vokasi setidaknya dibuktikan dari antusiasme DUDI terhadap lulusan SMK

Lulusan Sekolah Menengah Atas memiliki beberapa pilihan setelah lulus, alumni SMK dapat bekerja pada DUDI, melanjutkan pendidikan, mendirikan usaha/berusaha. Lulusan SMK memiliki keunggulan dalam bidang tertentu karena telah menerima pelatihan keterampilan teknis yang lebih spesifik selama masa sekolah. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki pilihan untuk bekerja, berwirausaha, ataupun meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Berdasarkan Rapor Pendidikan, pada tahun 2024 sebanyak 89,59% lulusan SMK terserap pada dunia industry dan dunia usaha (IDUKA), capaian kinerja ini diatas target pada tahun 2024 yaitu 35%, capaian kinerja ini setara dengan 225,97% diatas target dengan predikat kinerja sangat baik

Gambar 4.8
Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

Berdasarkan Gambar 4.9 menjelaskan bahwa tidak semua Lulusan SMK yang bekerja di DUDI, sebanyak 32,72% lulusan SMK melanjutkan pada Pendidikan yang lebih tinggi, sebanyak 17,01% lulusan SMK berwirausaha dengan berbagai kerja yang sesuai dengan kemampuan yg di dapat pada Pendidikan dan sisanya sekitar 10,41% lulusan SMK tidak/belum diketahui aktivitas setelah lulus.

Pada tahun 2024 sebanyak 39,86% lulusan SMK terserap pada dunia industry dan dunia usaha (IDUKA), capaian kinerja ini diatas target pada tahun 2024 yaitu 35%, capaian kinerja ini setara dengan **113,88** diatas target dengan predikat kinerja **sangat baik**.

Tabel 4.6
Analisa Pencapaian Kinerja
Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja di IDUKA
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA	35	39,86	113,88	Sangat Baik

Sumber : Rapor Pendidik 2024

4.7.5. Persentase PTK mengikuti Diklat

Program Pendidikan dan pelatihan guru merupakan program yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki akreditasi dengan tujuan menjadi PTK lebih profesional, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Program latihan yang dilakukan biasanya mencakup teknik perencanaan pembelajaran dan cara melakukan pembelajaran yang efektif. Kegiatan ini masuk ke dalam bagian internal manajemen di sekolah yang diadakan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru. Pihak manajemen berharap agar guru bisa mendapatkan keunggulan kompetitif serta dapat memberikan pelayanan terbaik. Program pelatihan guru diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dan mengalami peningkatan kualitas kerja.

Selama tahun 2024 terdapat 1257 dari 8605 Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) SMA,SMK dan SLB mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi atau setara dengan 14,61%. Realisasi capaian kinerja pendidik dan tenaga Pendidikan (PTK) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terealisasi 14,61 dari yang ditargetkan sebesar 12,58%. dengan realisasi kinerja 112,88% dengan predikat kinerja sangat baik

4.7.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh penduduk pada rentang usia sekolah yang bersekolah SMA/MA/SMK. APK SMA/MA/SMK adalah proporsi anak sekolah jenjang sekolah menengah (SMA/MA/SMK) terhadap penduduk usia 16-18 Tahun, semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK tahun 2024 sebesar 108,45% Dari targat 99 atau capaian kinerja sebesar 105,94%, data menunjukan bahwa 108,45% penduduk usia sekolah sudah bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK. Pada tahun 2024 jumlah penduduk usia 16-18 tahun tercatat sebanyak 95.826 jiwa, sementara itu jumlah penduduk yang sudah bersekolah pada tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2024 yaitu sekitar 103.924 siswa yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota, ini termasuk usia diatas dan di bawah usia 16-18 tahun.

Jika dilihat dari jumlah penduduk usia sekolah, kondisi ini sudah baik dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai 108,45% yang artinya seluruh penduduk usia sekolah sudah mendapatkan pendidikan dengan baik sesuai dengan usia sekolah nya dan terdapat sedikit selisih antara jumlah siswa dan penduduk usia sekolah, hal ini karena masih banyak nya siswa yang berada dibawah atau diatas usia pendidikan yang duduk di bangku sekolah. Untuk Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Siswa SMA/SMK/MA Keseluruhan	Penduduk Usia 16-18 Tahun	APK (%)
1	Batam	61607	47299	130.25
2	Tanjungpinang	12358	12734	97.05
3	Bintan	7883	9938	79.32
4	Karimun	11644	13076	89.05
5	Natuna	4127	4827	85.50
6	Lingga	4129	5192	79.53
7	Anambas	2176	2760	78.84
Provinsi		103924	95826	108.45

4.7.7. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK merupakan Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah SMA/SMK di usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah Menengah pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia 16 s/d 18 tahun dan dinyatakan dalam presentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu SMA sederajat. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100%, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM SMA/MA/SMK ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 87,94% Dengan demikian persentase capaian kinerja sebesar 109,92%. Sebaran capaian APM tahun 2024 di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.8
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Siswa Usia 16-18 Tahun	Penduduk Usia 16-18 Tahun	APM (%)
1	Batam	50990	47299	107.80
2	Tanjungpinang	9783	12734	76.83
3	Bintan	6501	9938	65.42
4	Karimun	8983	13076	68.70
5	Natuna	3170	4827	65.67
6	Lingga	3181	5192	61.27
7	Anambas	1665	2760	60.33
Provinsi		84273	95826	87.94

4.7.8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB

APK SLB adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Luar Biasa (SLB). APK SLB merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk berkebutuhan khusus di suatu jenjang pendidikan. APK SLB dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu/khusus dengan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. SLB adalah lembaga pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Tabel 4.9
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Siswa SLB Keseluruhan	Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	APK (%)
1	Batam	719	525	136.95
2	Tanjungpinang	384	228	168.42
3	Bintan	141	154	91.56
4	Karimun	391	321	121.81
5	Natuna	64	110	58.18
6	Lingga	50	123	40.65
7	Anambas	16	35	45.71
Provinsi		1765	1496	117.98

4.7.9. Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK/MA

Rasio siswa dengan kelas yang lebih rendah dapat memberikan manfaat bagi prestasi siswa, baik secara akademik, sosial, dan emosional. Rasio siswa-ruang kelas adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan ruang kelas di suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah beberapa standar terkait rasio siswa-ruang kelas, luas minimum ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, ditentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombel. Untuk SD, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Untuk SMP, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. Untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak lima peserta didik. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak delapan peserta didik. Untuk menghitung rasio dimaksud, berikut data pendukung sbb :

Tabel 4.10
Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas
SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK Keseluruhan	Siswa SMA/SMK Keseluruhan	Ruang Siswa SMA/SMK Per Ruang Kelas (%)
1	Batam	2329	61562	26.43
2	Tanjungpinang	476	12358	25.96
3	Bintan	369	7883	21.36
4	Karimun	585	11644	19.90
5	Natuna	261	4127	15.81
6	Lingga	242	4129	17.06
7	Anambas	145	2176	15.01
Provinsi		4407	103879	23.57

Tabel 4.10 menyimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja realisasi kinerja Rasio Siswa Perkelas pada tahun 2024 melebihi dari target yaitu pada ralisisasi 1 : 23,57 dengan persentase capaian kinerja 136,11% dengan kriteria penilaian kinerja Sangat Baik.

4.8. Kinerja SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM Pendidikan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yaitu ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM Pendidikan merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah daerah dan bertujuan untuk menjamin hak pendidikan yang setara, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan pendidikan, serta meningkatkan akuntabilitas. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Berikut capaian kinerja SPM Dinas Pendidikan Tahun 2024 sbb :

4.8.1. Kemampuan Literasi

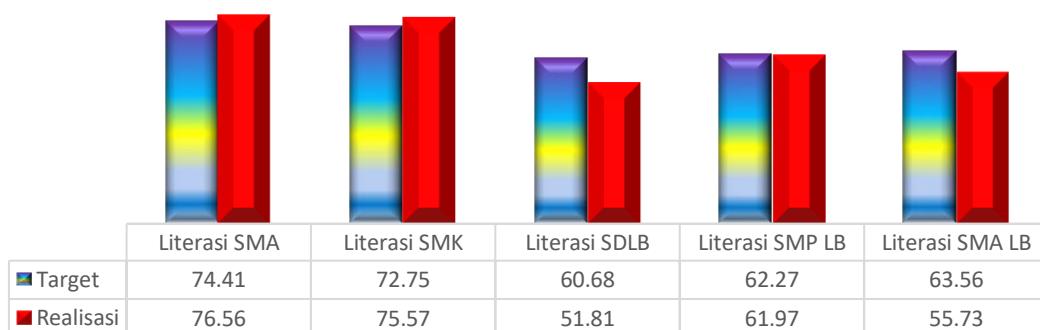
Kemampuan literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memahami dan menggunakan informasi secara efektif dalam berbagai konteks. Saat ini, literasi meluas mencakup keterampilan yang lebih beragam, seperti literasi digital, sains, finansial, dan budaya, yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, menganalisis,

dan mentransformasi teks serta informasi di dunia modern. Kemampuan literasi menggambarkan kemampuan seseorang siswa dalam memahami serta berguna untuk :

1. Meningkatkan kompetensi: Memperkuat kapabilitas dan keahlian individu yang sangat dibutuhkan di pasar kerja.
2. Membantu pemahaman: Memungkinkan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif di era yang jenuh informasi.
3. Mendukung kemajuan peradaban: Menjadi pilar penting untuk membangun masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
4. Meningkatkan kesejahteraan: Membantu individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Menghitung kemampuan literasi pada satuan pendidikan SMA,SMK dan SLB dapat dilakukan melalui berbagai metode penilaian, seperti tes tertulis dengan indikator literasi bahasa (membaca, mengolah informasi) dan literasi numerasi (matematika), serta pengamatan perilaku siswa dalam kegiatan literasi berbasis kurikulum. Pengukuran ini bertujuan untuk memahami kemampuan siswa dan merencanakan pembelajaran yang tepat. Penilaian kemampuan literasi dilakukan pada satuan pendidikan . Berikut capaian kinerja pengukuran kemampuan literasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Gambar 4.9
Capaian Kinerja Kemampuan Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

4.8.2. Kemampuan Numerasi

Kemampuan numerasi adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan konsep matematika dan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari untuk menginterpretasikan informasi kuantitatif. Keterampilan ini meliputi pemahaman angka, berhitung, memecahkan masalah, mengukur, dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk mengambil keputusan yang logis. Indikator kemampuan numerasi

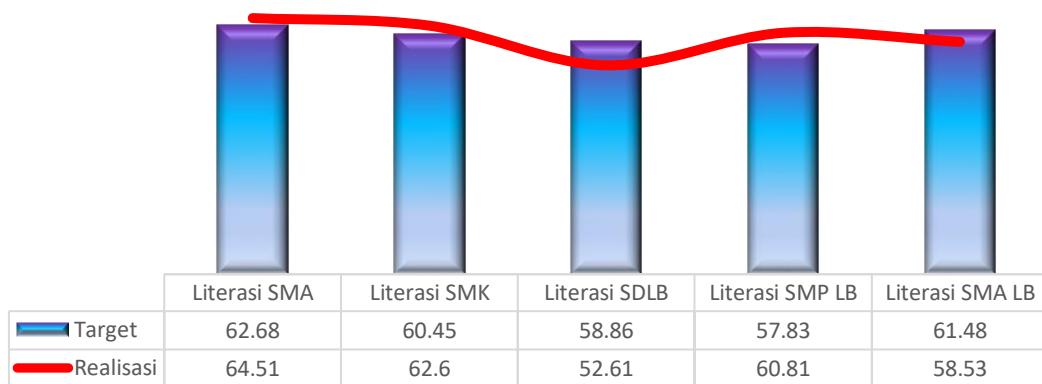
1. Merumuskan masalah: Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang berkaitan dengan konsep matematika dari situasi nyata.
2. Menerapkan konsep: Menggunakan pengetahuan dan prosedur matematika untuk memecahkan masalah.
3. Menafsirkan hasil: Menginterpretasikan hasil pemecahan masalah dan menggunakan untuk mengambil keputusan.

Manfaat numerasi meliputi kemampuan untuk memecahkan masalah sehari-hari, menginterpretasikan data seperti tabel dan grafik, mengambil keputusan yang logis dan terukur, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Selain itu, numerasi juga penting untuk pengelolaan keuangan pribadi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Manfaat numerasi diantaranya

1. Menginterpretasikan data, kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan angka, data, tabel, grafik, dan diagram yang disajikan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, politik, dan ekonomi.
2. Memecahkan masalah, menerapkan pengetahuan numerasi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti membandingkan harga saat berbelanja atau memahami konsep peluang dan risiko.
3. Mengambil keputusan, membantu dalam membuat keputusan yang logis dan akurat berdasarkan pertimbangan data dan analisis kuantitatif.
4. Mengasah kemampuan berpikir, berlatih berpikir logis, sistematis, kritis, dan analitis saat menghadapi berbagai situasi.

5. Manajemen keuangan, membantu memahami nilai uang dan mengelola keuangan pribadi secara lebih baik.
6. Kesiapan masa depan, mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan beradaptasi dengan perubahan zaman

Gambar 4.10
 Capaian Kinerja Kemampuan Numerasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus
 Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

4.8.3. Iklim Inklusivitas

Pendidikan inklusif bermanfaat bagi semua siswa, bukan hanya mereka yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif mendorong lingkungan belajar positif yang menghargai keberagaman dan mendorong kolaborasi serta kerja sama tim. Pendidikan inklusif juga membantu mengembangkan empati dan pemahaman di antara siswa, yang dapat mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif dan menerima.

Iklim inklusivitas adalah kondisi atau lingkungan yang menerima, menghargai, dan mendukung keberagaman, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berpartisipasi dan berkembang. Ini berarti menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman, dihargai, dan menjadi bagian dari komunitas, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan mereka. Contohnya adalah lingkungan sekolah yang memberikan layanan yang sesuai untuk semua

siswa, termasuk siswa dengan disabilitas atau bakat istimewa. Aspek-aspek iklim inklusivitas

1. Menerima dan menghargai keberagaman: Pengakuan bahwa setiap orang unik dengan latar belakang, budaya, agama, dan kemampuan yang berbeda, dan perbedaan tersebut dirayakan sebagai kekuatan.
2. Memberikan kesempatan yang setara: Memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang, tanpa diskriminasi.
3. Lingkungan fisik dan nonfisik: Mencakup kondisi fisik yang dapat diakses oleh semua orang dan lingkungan sosial yang inklusif.
4. Layanan yang sesuai kebutuhan: Menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti layanan bagi siswa penyandang disabilitas atau siswa dengan bakat istimewa.
5. Kepemimpinan dan kolaborasi: Mendorong rasa tanggung jawab bersama, di mana setiap orang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan memperjuangkan keadilan sosial.

Manfaat iklim inklusivitas adalah peningkatan prestasi belajar, keterampilan sosial dan emosional, rasa empati, kesetaraan, dan penerimaan terhadap keragaman. Lingkungan inklusif juga mengurangi perundungan dan mempersiapkan individu untuk menghadapi kehidupan di dunia yang beragam. Selain itu, iklim inklusivitas mendukung kemandirian, kesehatan mental, dan inovasi. Manfaat utama iklim inklusivitas bagi satuan pendidikan dan peserta didik serta guru adalah

1. Peningkatan prestasi belajar: Siswa yang belajar di lingkungan inklusif cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik.
2. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional: Inklusi mendorong pengembangan empati, kerjasama, dan rasa hormat terhadap perbedaan.
3. Meningkatkan rasa aman dan pengurangan perundungan: Iklim sekolah yang inklusif mengurangi ejekan dan perundungan dengan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan aman.

4. Peningkatan kesetaraan dan keadilan: Inklusi memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, terlepas dari kemampuan atau latar belakangnya.
5. Persiapan untuk dunia nyata: Lingkungan inklusif melatih siswa untuk hidup dan bekerja di dunia yang beragam dan inklusif.
6. Peningkatan inovasi: Iklim inklusif dapat mendorong inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik karena adanya beragam perspektif,
7. Kemandirian dan pemberdayaan: Inklusivitas yang diterapkan secara baik dapat meningkatkan rasa kemandirian, kesejahteraan, dan pemberdayaan individu.

Gambar 4.11
 Capaian Kinerja Iklim Inklusivitas SMA,SMK dan Pendidikan Khusus
 Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

4.8.4. Iklim Keamanan

Iklim keamanan menggambarkan kondisi lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf. Ini mencakup pencegahan kekerasan, perundungan, perlakuan fisik, kekerasan seksual, narkoba, serta penciptaan lingkungan yang positif dan kondusif untuk proses belajar mengajar. Aspek-aspek iklim keamanan

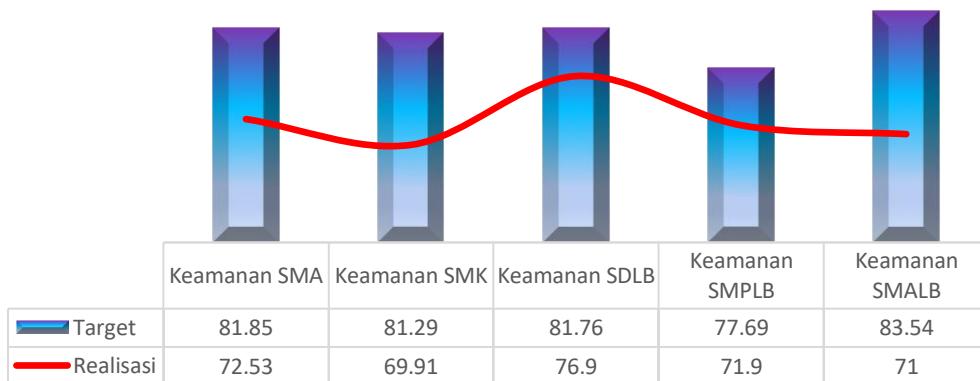
1. Keamanan Fisik: Melibatkan kebijakan dan fasilitas yang menjamin keamanan, seperti aturan penanggulangan kekerasan, sarana dan prasarana yang aman, serta keamanan lokasi sekolah.
2. Keamanan Sosioemosional: Merujuk pada persepsi dan hubungan yang positif antarwarga sekolah, seperti tidak adanya perundungan, budaya toleransi yang kuat, dan rasa dihormati.

Iklim keamanan (baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun masyarakat umum) memiliki tujuan utama untuk menciptakan kondisi yang bebas dari bahaya atau ancaman, baik secara fisik maupun psikologis. Berikut adalah rincian tujuan dan manfaat iklim keamanan:

1. Melindungi Individu: Tujuan fundamentalnya adalah melindungi semua individu (karyawan, siswa, warga, dll.) dari berbagai bentuk bahaya, kecelakaan, cedera, atau kekerasan.
2. Menciptakan Rasa Aman dan Tenang: Adanya iklim keamanan yang kuat memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran, memungkinkan orang untuk fokus pada tugas dan aktivitas mereka tanpa kekhawatiran yang berlebihan.
3. Menjamin Kesejahteraan Fisik dan Psikis: Ini mencakup keamanan fisik (fasilitas yang aman, prosedur darurat) dan keamanan sosioemosional (tidak adanya perundungan, diskriminasi, atau pelecehan).
4. Mencegah Insiden Berbahaya: Iklim keamanan yang baik bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menerapkan langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan secara maksimal untuk menghindari terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
5. Menegakkan Peraturan dan Tata Tertib: Iklim keamanan membantu menegakkan peraturan, standar operasional prosedur (SOP), dan tata tertib yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur dan disiplin.
6. Peningkatan Produktivitas: Individu yang merasa aman dan nyaman cenderung lebih bahagia, termotivasi, produktif, dan bersemangat dalam bekerja atau belajar.

7. Mengurangi Risiko Kerugian: Dengan mencegah kecelakaan dan insiden, iklim keamanan membantu mengurangi kerusakan atau kehilangan harta benda, serta biaya yang terkait dengan kompensasi atau perbaikan.
8. Meningkatkan Kualitas Hidup: Keamanan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, baik di tempat kerja, sekolah, maupun komunitas.
9. Mendukung Pembelajaran Berkualitas (di Sekolah): Di lingkungan pendidikan, iklim keamanan yang positif adalah prasyarat pendukung untuk proses belajar mengajar yang bermakna dan berkualitas bagi seluruh warga sekolah.
10. Membangun Citra Positif: Bagi organisasi atau institusi, iklim keamanan yang baik memengaruhi citra perusahaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan.
11. Mendorong Kontribusi Positif: Ketika orang merasa aman, mereka cenderung lebih mungkin untuk berkontribusi secara positif pada komunitas atau organisasi mereka.

Gambar 4. 12
Capaian Kinerja Iklim Keamanan SMA,SMK dan Pendidikan Khusus
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

4.8.5. Iklim Kebhinnekaan

Iklim kebhinekaan merujuk pada suasana atau lingkungan yang mendukung, menghargai, dan merayakan keragaman suku, budaya, agama, bahasa, etnis, dan latar belakang lainnya. Ini menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan setara bagi semua orang, di mana perbedaan tidak menimbulkan diskriminasi melainkan menjadi kekuatan. Apa saja yang termasuk iklim kebhinekaan :

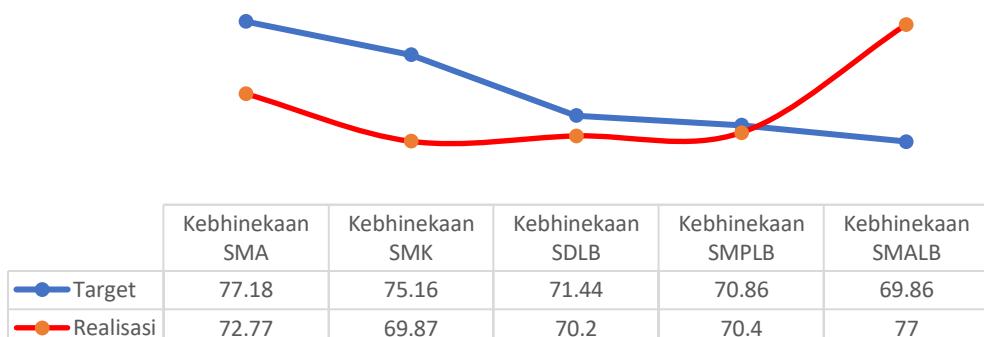
1. Lingkungan yang aman dan inklusif: Semua individu merasa diterima, dihargai, dan didukung tanpa memandang latar belakang mereka.
2. Penerimaan terhadap perbedaan: Menerima dan menghargai perbedaan budaya, etnis, agama, atau jenis kelamin tanpa memandang perbedaan tersebut.
3. Kesetaraan hak: Memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi semua warga, baik laki-laki maupun perempuan, dalam peran dan kegiatan sekolah.
4. Perayaan keragaman: Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar untuk semua agama secara merata, tanpa mencampuradukkan satu sama lain.
5. Tidak ada diskriminasi: Menghilangkan diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, fisik, agama, atau budaya.

Tujuan iklim kebhinekaan adalah menciptakan lingkungan yang menghargai, menerima, dan merayakan keragaman (suku, agama, ras, budaya, gender) agar tercipta persatuan, kesatuan, dan suasana belajar yang aman, nyaman, serta kondusif. Iklim kebhinekaan juga bertujuan meningkatkan toleransi, tenggang rasa, nalar kritis, dan kreativitas antar siswa serta menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masyarakat yang beragam. Manfaat menciptakan iklim kebhinekaan:

1. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan toleransi yang tinggi.
2. Mencegah perpecahan dan menciptakan persatuan serta kesatuan.
3. Menjaga suasana kelas agar selalu kondusif untuk belajar.
4. Mendorong kreativitas dan penalaran kritis siswa karena terpapar berbagai perspektif.

- Meningkatkan partisipasi aktif siswa karena merasa memiliki (sense of belonging) terhadap komunitas sekolah.

Gambar 4.13
Capaian Kinerja Iklim Kebhinekaan SMA,SMK dan Pendidikan Khusus
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

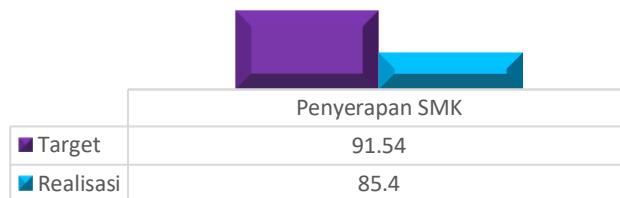
4.8.6. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

Tingkat penyerapan lulusan SMK adalah persentase kelulusan SMK yang berhasil masuk ke dunia kerja (lapangan kerja) berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Angka ini mencerminkan seberapa besar lulusan SMK terserap ke dunia usaha dan industri (DU/DI), baik untuk bekerja, melanjutkan kuliah, atau berwirausaha. Makna penting terkait Tingkat Penyerapan Lulusan SMK:

- Ukuran keberhasilan: Tingkat penyerapan menjadi salah satu indikator keberhasilan SMK dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja sesuai kompetensi dan kebutuhan industri.
- Dunia kerja: Penyerapan ini bisa terjadi melalui berbagai jalur, seperti bekerja langsung di perusahaan, meniti karier di DU/DI, atau memulai usaha sendiri.
- Kolaborasi: Peningkatan tingkat penyerapan sangat bergantung pada kerja sama antara pihak sekolah (SMK) dengan dunia usaha dan industri untuk menciptakan lapangan kerja yang relevan bagi lulusan.

- Kompetensi: Lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya akan memiliki peluang lebih besar untuk terserap ke dunia kerja.

Gambar 4.14
Capaian Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Pada DUDI
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Dinsdik 2024

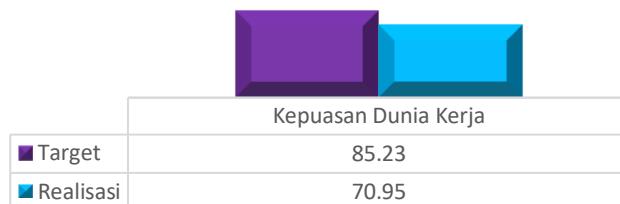
4.8.7. Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK

Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK adalah ukuran seberapa besar industri atau perusahaan merasa puas dengan sikap, kebiasaan, nilai-nilai, dan perilaku para lulusan SMK dalam lingkungan kerja mereka. Ini mencakup sejauh mana lulusan SMK mampu mengintegrasikan diri dalam budaya kerja industri, menjalankan tugas dengan profesional dan etis, serta memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan industri. Aspek-aspek penting yang menjadi penilaian sbb :

1. Sikap dan Perilaku: Apakah lulusan menunjukkan sikap positif, disiplin, dan profesional yang sesuai dengan ekspektasi industri?
2. Pengetahuan dan Keterampilan: Apakah lulusan memiliki kompetensi teknis yang relevan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan mereka secara efektif di dunia kerja?
3. Kreativitas dan Inovasi: Apakah lulusan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan?

4. Kemampuan Beradaptasi dan Interpersonal: Sejauh mana lulusan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, bekerja sama dalam tim, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik?
5. Integritas dan Tanggung Jawab: Apakah lulusan dapat dipercaya, memiliki integritas yang tinggi, dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.
6. Profesionalisme: Apakah lulusan menunjukkan profesionalitas dalam bekerja, seperti ketepatan waktu dan kualitas hasil kerja?

Gambar 4.15
 Capaian Tingkat Kepuasan Dunia Kerja
 Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

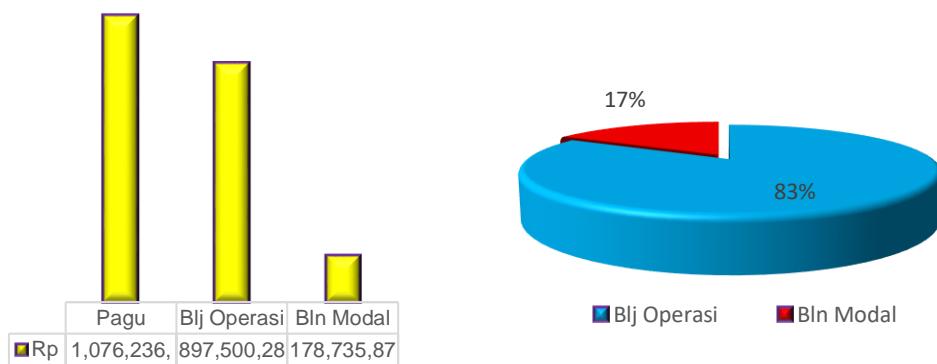
4.9. Kinerja Anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas, fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh satuan kerja bersangkutan. Fungsi ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan..

Pada tahun 2024, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tercatat 1.076.236.158.457 terdiri atas belanja operasi sebesar 897.500.284.475 atau setara dengan 83,39% dan belanja modal sebesar

178,735,873,982 atau setara dengan dengan 16,61%. Realisasi belanja 1.023.281.846.640 dengan capaian realisasi belanja 95.08%. Berikut alokasi anggaran dan realisasi pada tahun 2024 sbb :

Gambar 4.16
Jenis Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



BAB V

PENUTUP

Profil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini disusun bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tugas pokok, fungsi, dan capaian kinerja yang kami laksanakan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam memahami upaya kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih

Profil ini mencerminkan komitmen kuat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis dapat mencapai visi pendidikan yang dicanangkan. Kami menyadari profil ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan konstruktif sangat kami nantikan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan."

ALAMAT SEKOLAH

1. Kota Batam

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Alamat
1	Sekolah Khusus Smart Aurica	Swasta	Komplek YKB K-29 Bengkong Laut, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam
2	SLB ANAK BRILIANT BATAM	Swasta	Villa Muka Kuning Blok E1 No 19-22, Tembesi, Sagulung, Kota Batam
3	SLB CENDEKIARA	Swasta	KOMPLEK BKKBN JALAN TIBAN INDAH BLOK L NO. 12A SEKUPANG - BATAM., Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam
4	SLB KARTINI BATAM	Swasta	Jl Raja Ali Haji Komplek Sumber Agung, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam
5	SLB KARTINI SEKUPANG BATAM	Swasta	Jl. Kartini I No 76, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam
6	SLB NEGERI BATAM	Negeri	JL. PEMUDA LEGENDA MALAKA KELURAHAN BALOI, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
7	SLB PUTRAKAMI	Swasta	Komp. Anggrek Mas 1 Blok I/15, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam
8	SLB RUMAH KITA BATAM	Swasta	Townhouse Winner Millenium Blok E2 No 02-03 Batam Centre, Sadai, Bengkong, Kota Batam
9	SLB STIPAK	Swasta	Komp. Nusantara Golden B3B Jl. Raya Engku Putri Batam Center, Belian, Batam Kota, Kota Batam
10	SMA ADHI NUSANTARA	Swasta	JL. MAJAPAHIT NO 18, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam
11	SMA Daarut Tauhiid Boarding School Batam	Swasta	Jln. Trans Barelang KM.03 RT.03 RW.025, Tembesi, Sagulung, Kota Batam
12	SMA ISLAM ANDALUSIA	Swasta	JL. ANDALUSIA NO.4 KAWASAN LIMINDO KEL. TAMAN BALOI, KEC. BATAM KOTA, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam
13	SMA IT FAJAR ILAHI BENGKONG	Swasta	BENGKONG NUSANTARA 1 BLOK G, H NO. 18 RT.01 RW.13, Sadai, Bengkong, Kota Batam
14	SMA IT NURUL MUHAJIRIN BATAM	Swasta	JL. PULAU TUJUH, Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam
15	SMA MEDINA UMAH CENDEKIA	Swasta	VILLA TELUK ANGIN JALAN PANTAI DANGAS RT/RW 002/005, Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam
16	SMA NEGERI 29 BATAM	Negeri	PERUM. GRAHA PERMATA INDAH CLUSTER ANGGREK, Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam
17	SMA PUTRA BATAM	Swasta	JALAN R.SOEPRAPTO MUKA KUNING INDAH BATU AJI, Buliang, Batu Aji, Kota Batam

18	SMA SWASTA ISLAM HANG NADIM MALAY SCHOOL	Swasta	Komplek Hang Nadim Malay, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam
19	SMA TARUNA KEPULAUAN RIAU	Swasta	Kavling Tiban Utara, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam
20	SMA YOS SUDARSO	Swasta	Jalan Dang Merdu No.2, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam
21	SMAIT DARUSSALAM 01 BATAM	Swasta	Komplek Taman Merapi Subur, Jl. Letjen Suprapto Blok A1 No. 3,4,5, Tembesi, Sagulung, Kota Batam
22	SMAIT FAJAR ILAHI	Swasta	Pancur Tower II RT. 001 RW. 011, Duriangkang, Sei Beduk, Kota Batam
23	SMAIT FAJAR ILAHI BATU AJI	Swasta	JL.RH SUGHANDI 2 NO.1 MKGR, Kibing, Batu Aji, Kota Batam
24	SMAN 1 BATAM	Negeri	JL. R. SOEPRAPTO, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam
25	SMAN 10 BATAM	Negeri	JL.TRANSBARELANG, Sijantung, Galang, Kota Batam
26	SMAN 11 BATAM	Negeri	JL. RAJA ALI, NO. 1, Pulau Buluh, Bulang, Kota Batam
27	SMAN 12 BATAM	Negeri	Jl. Pantai Indah, Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam
28	SMAN 13 BATAM	Negeri	Teluk Kangkung, Pulau Terong, Belakang Padang, Kota Batam
29	SMAN 14 BATAM	Negeri	Jl. Tamalatea Tanjung Sengkuang, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam
30	SMAN 15 BATAM	Negeri	JL.HANG KESTURI, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam
31	SMAN 16 BATAM	Negeri	Jl. S. Parman Mangsang Permai RT. 5 RW. 1, Mangsang, Sei Beduk, Kota Batam
32	SMAN 17 BATAM	Negeri	KAVLING BUKIT SEROJA., Sei Pelunggut, Sagulung, Kota Batam
33	SMAN 18 BATAM	Negeri	Perumahan Taman Cipta Asri, Tembesi, Sagulung, Kota Batam
34	SMAN 19 BATAM	Negeri	JL. BRIGJEN KATAMSO, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam
35	SMAN 2 BATAM	Negeri	JL. RAYA SEKANAK, Sekanak Raya, Belakang Padang, Kota Batam
36	SMAN 20 BATAM	Negeri	Jl. Pemuda, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
37	SMAN 21 BATAM	Negeri	Bukit Smart Punggur, Kabil, Nongsa, Kota Batam
38	SMAN 22 BATAM	Negeri	Jl. Abdullah RT. 04 RW. 02, Pecong, Belakang Padang, Kota Batam
39	SMAN 23 BATAM	Negeri	Taman Lestari, Kibing, Batu Aji, Kota Batam

40	SMAN 24 BATAM	Negeri	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam
41	SMAN 25 BATAM	Negeri	Bengkong Sadai, Sadai, Bengkong, Kota Batam
42	SMAN 26 BATAM	Negeri	Komplek Botania Garden, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Belian, Batam Kota, Kota Batam
43	SMAN 27 BATAM	Negeri	Perumahan Purimas - Puri Buana Indah 2, Buliang, Batu Aji, Kota Batam
44	SMAN 28 BATAM	Negeri	Jl. Letjen S. Parman, Kav. Pancur Baru, Duriangkang, Sei Beduk, Kota Batam
45	SMAN 3 BATAM	Negeri	Jl. Hang Nadim, Belian, Batam Kota, Kota Batam
46	SMAN 4 BATAM	Negeri	JL. GAJAH MADA, TIBAN LAMA, Tiban Lama, Sekupang, Kota Batam
47	SMAN 5 BATAM	Negeri	JL. KAVLING LAMA, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam
48	SMAN 6 BATAM	Negeri	JL.SALO AIR RAJA, Air Raja, Galang, Kota Batam
49	SMAN 7 BATAM	Negeri	JL. KASU BARAT, PULAU KASU, Kasu, Belakang Padang, Kota Batam
50	SMAN 8 BATAM	Negeri	BENGKONG SADAI, BENGKONG, Sadai, Bengkong, Kota Batam
51	SMAN 9 BATAM	Negeri	Jl. Merbau No. 1, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Batam, Karas, Galang, Kota Batam
52	SMAS ADVENT	Swasta	JL. PROF. DR. HAMKA KAV IV KIBING, Kibing, Batu Aji, Kota Batam
53	SMAS AL KAHFI ISLAMIC SCHOOL	Swasta	The Capitol Imperium No A42B Superblok, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam
54	SMAS AL-AZHAR	Swasta	JL. GN. BROMO BALOI INDAH, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam
55	SMAS AL-KAUTSAR	Swasta	JL.PATIMURA, Kabil, Nongsa, Kota Batam
56	SMAS ANANDA	Swasta	JL. RADEN PATAH BALOI BLOK III, LUBUK BAJA, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam
57	SMAS ANSVIN	Swasta	Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 46-48, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam
58	SMAS AUSTRALIAN INTERCULTURAL SCHOOL	Swasta	Komplek Tanah Mas Blok A No 1-3, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam
59	SMAS AVAVA	Swasta	Komplek Nagoya Point No. 1 Nagoya Batam, Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam
60	SMAS BAITUL HIKMAH	Swasta	JL. KH. Ahmad Dahlan, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam

61	SMAS BINA NUSANTARA BATAM	Swasta	Komplek Plamo Garden Blok G4 No. 9-14 Batam Centre, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam
62	SMAS BODHI DHARMA BATAM	Swasta	Jl Bakal Limindo Trade Centre Batam Centre, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam
63	SMAS BUDI LUHUR BOARDING SCHOOL	Swasta	Patam Asri Blok T No 1, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam
64	SMAS DJUWITA	Swasta	KOMP. ANGGREK MAS BATAM CENTRE, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam
65	SMAS GLOBE NATIONAL PLUS	Swasta	Komplek Green Garden Blok C No.16, Seraya, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam
66	SMAS GLOBE NATIONAL PLUS 2	Swasta	Komp Batu Aji Center Park, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam
67	SMAS GLOBE NATIONAL PLUS 3	Swasta	Komp. Mega Techno City, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam
68	SMAS GRANADA ISLAMIC BOARDING SCHOOL	Swasta	Jalan Hang Kesturi, Kampung Jabi Gang Selar, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam
69	SMAS GURINDAM BOARDING SCHOOL	Swasta	Jl. Pesantren Blok A No. 7, Belian, Batam Kota, Kota Batam
70	SMAS HARAPAN UTAMA	Swasta	JL. ROSEDALE SIMPANG FRENGKY, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam
71	SMAS IMMANUEL	Swasta	JL.RADEN PATAH, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam
72	SMAS INTEGRAL HIDAYATULLAH	Swasta	KP. PASIR INDAH RT.01/16, KEL.KIBING, Kibing, Batu Aji, Kota Batam
73	SMAS INTEGRAL HIDAYATULLAH BOARDING SCHOOL	Swasta	Jl. Brigjend Katamso RT. 03 RW. 03, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam
74	SMAS ISLAM HANG TUAH	Swasta	JL. RANAI NO. 11, BENGKONG POLISI, Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam
75	SMAS ISLAM NABILAH	Swasta	Komp. Masjid Amanatul Ummah Taman Dutamas, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
76	SMAS ISLAM TERPADU ULIL ALBAB	Swasta	Jalan Diponegoro Nomor 1 RT.002 RW.011, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam
77	SMAS IT IMAM SYAFII	Swasta	JI. HANG LEKIU NO. 03 BATU BESAR, NONGSA, Sambau, Nongsa, Kota Batam
78	SMAS IT JABAL RAHMAH	Swasta	Bengkong Nusantara IVB Blok E No. 1-26 RT.05 RW. 013, Sadai, Bengkong, Kota Batam
79	SMAS KARTINI	Swasta	JL. BUDI KEMULIAAN NO. 1, SERAYA, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam
80	SMAS KEMILAU ISLAMIC SCHOOL BATAM	Swasta	Taman Jaya Asri, Buliang, Batu Aji, Kota Batam

81	SMAS KRISTEN BASIC 2	Swasta	Perumahan Marsyeba Indah Belakang Mitra Mall, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam
82	SMAS KRISTEN BASIC BATAM	Swasta	KAWASAN INDUSTRI N) 1 BATAM, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
83	SMAS KRISTEN KALAM KUDUS 2	Swasta	Komp. Taman Dutamas Jl. Boulevard IV, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
84	SMAS KRISTEN TABQHA BATAM	Swasta	KOMP. CENTER PARK BLOK III NO 3, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam
85	SMAS MAITREYAWIRA	Swasta	Komp. Maha Vihara Duta Maitreya, Bukit Beruntung, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam
86	SMAS MONTE SIENNA	Swasta	JL. YOS SUDARSO, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam
87	SMAS MUHAMMADIYAH 1	Swasta	JL. PROF. DR. HAMKA NO. 3, TEMBESI, KIBING, Kibing, Batu Aji, Kota Batam
88	SMAS NIZAM AL MULK	Swasta	Komplek Nam IBS Sanggunung RT02/RW05 Kel.Sambau Kec.Nongsa Batam, Belian, Batam Kota, Kota Batam
89	SMAS PELITA UTAMA	Swasta	Jl. Yos Sudarso Blok A No 4-5, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam
90	SMAS PERMATA HARAPAN 2 BATAM	Swasta	Jl.Trans Barelan, Gedung Graha Buana Education Park, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam
91	SMAS PLUS AL-USTMANIYAH QUEEN AL FALAH	Swasta	Dapur 12, Sei Pelunggut, Sagulung, Kota Batam
92	SMAS PUTRA PERSADA BATAM	Swasta	JL. MUHAMMAD KAMPUNG MELAYU, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam
93	SMAS RIIHATUL JANNAH	Swasta	Kav. 1 No. 01 Legenda Malaka., Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
94	SMAS TERBUKA STIPAK	Swasta	KOMP NUSANTARA GOLDEN B3B JL. RAYA ENGKU PUTRI, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam
95	SMAS TUNAS BARU JIN SEUNG	Swasta	Kav. Batu Aji Baru Blok C 12 No 3, Batu Aji, Sagulung, Kota Batam
96	SMAS ULUL ILMI CENDIKIA	Swasta	Jl. Ir. Sutami, RT 02 RW 05, Tanjung Pinggir, Sekupang, Kota Batam
97	SMAS VISI KUDUS INDONESIA	Swasta	Komplek Pancur Tower RT 001/RW X, Duriangkang, Sei Beduk, Kota Batam
98	SMAS YEHONALA	Swasta	KOMPLEK AKU TAHU I BLOK DD, SUNGAI PANAS, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam
99	SMK IBNU SINA 2 BATAM	Swasta	JL. KAVLING SENJULUNG, Kabil, Nongsa, Kota Batam
100	SMK ISLAMIC CENTRE NW	Swasta	JL. KH. AHMAD DACHLAN, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam

101	SMK MISI BAGI BANGSA	Swasta	JL. BRIGJEN KATAMSO-KOMPLEK TUNAS REGENCY, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam
102	SMK MUHAMMADIYAH KABIL	Swasta	JL. PTK HOUSING NO.13A BIDA KABIL, Kabil, Nongsa, Kota Batam
103	SMK NEGERI 1 BATAM	Negeri	PROF.DR.HAMKA NO.1, Kibing, Batu Aji, Kota Batam
104	SMK NEGERI 10 BATAM	Negeri	Perumahan Nongsa Asri, RT 01 RW 12, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam
105	SMK NEGERI 11 BATAM	Negeri	JL. DAPUR 12, KAVLING BUKIT MELATI, Sei Pelunggut, Sagulung, Kota Batam
106	SMK NEGERI 12 BATAM	Negeri	PERUMAHAN PURIMAS-PURI BUANA INDAH 2, Buliang, Batu Aji, Kota Batam
107	SMK NEGERI 2 BATAM	Negeri	JI. PEMUDA NO.5 BATAM CENTRE, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
108	SMK NEGERI 3 BATAM	Negeri	LETJEN S.PARMAN, Duriangkang, Sei Beduk, Kota Batam
109	SMK NEGERI 4 BATAM	Negeri	TIBAN II, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam
110	SMK NEGERI 5 BATAM	Negeri	Kav. Bukit Kamboja-Kel.Sei Pelunggut-Kec.Sagulung, Sei Pelunggut, Sagulung, Kota Batam
111	SMK NEGERI 6 BATAM	Negeri	KAMPUNG PANAU, Kabil, Nongsa, Kota Batam
112	SMK NEGERI 7 BATAM	Negeri	PERUM SEKAWAN PEMKO, Belian, Batam Kota, Kota Batam
113	SMK NEGERI 8 BATAM	Negeri	Kav. Bukit Melati - Sei Pelunggut, Sei Pelunggut, Sagulung, Kota Batam
114	SMK NEGERI 9 BATAM	Negeri	Jl. S. Parman, Tanjung Piayu, Sei Beduk, Kota Batam
115	SMK Satu Bangsa Harmoni	Swasta	BENGKONG JAYA NO.1 TOP 100 BATAM, Bengkong Laut, Bengkong, Kota Batam
116	SMKS ADVENT BATAM	Swasta	Jl. Teratai No. 1 Blok V Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam
117	SMKS AL AMIN 1 BATAM	Swasta	JL. ISKANDAR BAKAR, KAVLING SAGULUNG JAYA NO. 01 RW. 02 SUNGAI LEKOP, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam
118	SMKS AL AZHAR BATAM	Swasta	Jl. Gunung Bromo - Baloi Indah, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam
119	SMKS AL MUGNII MANDIRI	Swasta	Kavling Sungai Lekop Tahap III Blok C1 No 1 RT001 RW013, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam
120	SMKS ALJABAR BATAM	Swasta	BENGKONG STM ALJABAR NO. 1, Bengkong Laut, Bengkong, Kota Batam

121	SMKS BATAM INTERNATIONAL SCHOOL	Swasta	Komp. Pertokoan Rananta Blok A No. 5-7 Legenda Batam Centre, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
122	SMKS EBEN HAEZER BATAM	Swasta	Bengkong Palapa II Blok C No.51 Kelurahan Tanjung Buntung, Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam
123	SMKS ELSADAI BATAM	Swasta	Jl. Punggowo, Komplek Taman Duta Mas, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
124	SMKS GLOBE NATIONAL PLUS	Swasta	Komp. Green Garden Blok C No.16, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam
125	SMKS GLOBE NATIONAL PLUS 2	Swasta	Komp. Batu Aji Centre Park, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam
126	SMKS HANG NADIM BATAM	Swasta	PENDIDIKAN NO.3 BLK PASAR MELAYU BATU AJI, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam
127	SMKS HARAPAN UTAMA	Swasta	ROSEDALE SIMPANG FRANKY BATAM CENTER, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam
128	SMKS HIDAYATULLAH BATAM	Swasta	Jl. Brigjend Katamso RT 03 RW 03, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam
129	SMKS IBNU SINA BATAM	Swasta	TEUKU UMAR LUBUK BAJA KOTA, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam
130	SMKS ISLAM HANG TUAH BATAM	Swasta	RANAI NO.11 BENGKONG POLISI BATAM, Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam
131	SMKS IT AR RISALAH	Swasta	KAV. MENTARAU BLOK J NO. 100, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam
132	SMKS IT DARUSSALAM BOARDING SCHOOL 01	Swasta	Komp. Pendidikan Darussalam Batam 3, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam
133	SMKS KARTINI BATAM	Swasta	KOMPLEK BALOI VIEW BATU BATAM, Baloi Indah, Lubuk Baja, Kota Batam
134	SMKS KOLESE TIARA BANGSA	Swasta	KOMPLEK PERMATA HIJAU NO. 5-9 JL. ENGU PUTRI BATAM CENTER, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam
135	SMKS MAARIF NU KOTA BATAM	Swasta	Jl. Marina (depan Perum Kotamas Marina) Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang Kota Batam, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam
136	SMKS MAITREYAWIRA	Swasta	Kompleks Maha Vihara Duta Maitreya, Bukit Beruntung, Sungai Panas, Batam., Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam
137	SMKS MUHAMMADIYAH BATAM	Swasta	PROF. DR HAMKA NO. 3, Kibing, Batu Aji, Kota Batam
138	SMKS MULTISTUDI HIGH SCHOOL BATAM	Swasta	KUDA LAUT NO.1 KAV.121 BATU AMPAR BATAM, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam
139	SMKS NIZAM AL MULK	Swasta	Komp. NAM Islamic Boarding School Kp.Sanggunung Rt.002/Rw.005

			Kel.Sambau-Nongsa, Belian, Batam Kota, Kota Batam
140	SMKS NURUL JADID BATAM	Swasta	BENGKONG PERMAI BLOK B RT 02/RW 02, Bengkong Laut, Bengkong, Kota Batam
141	SMKS PARIWISATA ADIMULIA	Swasta	Graha Mas, Komplek Rezeki, Blk. A No.12-12A 29444 Batam-Kep.Riau, Belian, Batam Kota, Kota Batam
142	SMKS PELAYARAN KEPULAUAN RIAU	Swasta	Pertokoan Rananta Blok B No 9-11, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
143	SMKS PELAYARAN NASIONAL BATAM	Swasta	JL. KOMP. PENDIDIKAN DAN WISATA MARITIM NO.01, Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam
144	SMKS PELAYARAN SINAR METTA	Swasta	Komp. Ruko Buana Indah Blok A No. 9-10, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam
145	SMKS PELITA BANGSA SCHOOL	Swasta	Jl. Kavling Batu Aji Baru, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam
146	SMKS PENERBANGAN	Swasta	Jl. H.Muhammad No.90,Batu Besar-Nongsa, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam
147	SMKS PENERBANGAN NASIONAL BATAM	Swasta	Jl.Pendidikan dan wisata maritim no.1 Tanjung Buntung Bengkong Laut Batam, Bengkong Laut, Bengkong, Kota Batam
148	SMKS PENERBANGAN SPN DIRGANTARA	Swasta	Jl. Ahmad Yani Taman Eden No 7-8, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
149	SMKS PERMATA HARAPAN 1 BATAM	Swasta	GAJAH MADA D/A KOMP.BATU BATAM MAS BLOK D & E NO. 1-3 BATAM, Baloi Indah, Lubuk Baja, Kota Batam
150	SMKS PERMATA HARAPAN 2 BATAM	Swasta	Jl. Trans Barelang Graha Buana, Tembesi, Sagulung, Kota Batam
151	SMKS PERTIWI BATAM	Swasta	JL. JEND. SUDIRMAN, PERUM ODESSA A 16 No. 3-7., Belian, Batam Kota, Kota Batam
152	SMKS PLUS KEMILAU BANGSA	Swasta	KOMP. TAMAN JAYA ASRI BATU AJI BATAM, Buliang, Batu Aji, Kota Batam
153	SMKS PLUS KEMILAU BANGSA 3	Swasta	Ruko Lakota Blok C No 5, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam
154	SMKS PUTRA JAYA CENTRE	Swasta	Komp. Batu Aji Centre blok A 10 No.2-8 dan blok A 11 No. 1-2, Kibing, Batu Aji, Kota Batam
155	SMKS PUTRA JAYA SCHOOL BATAM	Swasta	Jl. Laksamana Bintan, Komplek Gading Mas Blok A No. 01, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam
156	SMKS REAL INFORMATIKA BATAM	Swasta	Komplek Prima Sejati Blok A No.5-9, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam

157	SMKS RESTU BUNDA	Swasta	JL. RAJA ALI KELANA KOMPLEK GRAHA NUSA PERMAI, Belian, Batam Kota, Kota Batam
158	SMKS SULTAN AGUNG BATAM	Swasta	Komp. Sekolah Sultan Agung, Belian, Batam Kota, Kota Batam
159	SMKS TAHFIDZ AN NASHICHAH	Swasta	Kampung Tengah RT 003 RW 010, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam
160	SMKS TELADAN BATAM	Swasta	BRIGJEN KATAMSO KM.1, Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam
161	SMKS TERPADU PUTRA JAYA BATAM	Swasta	KOMPLEK TIBAN MAS ASRI BLOK B No. 12-17 JALAN GAJAH MADA, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam
162	SMKS TUNAS MUDA BERKARYA BATAM	Swasta	Jl. Letjen. Soeprapto Komplek Perumahan BRB. Sagulung Batam, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam
163	SMKS YEHONALA	Swasta	KOMP. AKU TAHU BLOK DD NO 1, SEI PANAS, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam
164	SMKS YOS ANUGERAH	Swasta	Kampung Durian Blok B No. 36 RT 02/RW 06, Sadai, Bengkong, Kota Batam

2. Kota Tanjungpinang

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Alamat
1	SLB GARUDA	Swasta	Jl. GarudaKampung Sidojasa RT. 003/RW. 004, Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
2	SLB MUTIARA	Swasta	JL. KOTA PIRING 15 A, Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
3	SLBN 1 TANJUNGPINANG	Negeri	JL KIJANG LAMA KM.7, Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
4	SLBN 2 TANJUNGPINANG	Negeri	JI.DAENG KAMBOJA KM.18 SENGGARANG, Senggarang, Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
5	SMA ISLAM DE GREEN CAMP	Swasta	JL. TAMAN SISWA NO.1 KP. SIDOMAKMUR, KELURAHAN BATU IX, KECAMATAN TANJUNGPINANG, Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
6	SMAIT AS-SAKINAH	Swasta	Jl. Daeng Marewa Tanjung Sebauk, Senggarang, Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
7	SMAIT TARUNA AR RISALAH TANJUNGPINANG	Swasta	Jalan Kijang Lama Km. 7, Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
8	SMAN 1 TANJUNGPINANG	Negeri	Jalan dr. Soetomo, Bukit Cermin, Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang

9	SMAN 2 TANJUNGPINANG	Negeri	Jl. Basuki Rachmat No.4, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
10	SMAN 4 TANJUNGPINANG	Negeri	JL. PEMUDA NO. 30, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
11	SMAN 5 TANJUNGPINANG	Negeri	JL. HAJI AGUS SALIM, Tanjungpinang Barat, Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang
12	SMAN 6 TANJUNGPINANG	Negeri	JL. RAYA SENGGARANG KM. 23 NO.1, Senggarang, Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
13	SMAN 7 TANJUNGPINANG	Negeri	Jl. Kampung Sungai Carang KM 13 - Tg.Pinang, Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
14	SMAS KATOLIK SANTA MARIA	Swasta	Jl. ANGGREK MERAH BATU KUCING, Kampung Bulang, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
15	SMAS MAITREYAWIRA	Swasta	JL. Ir Sutami Komplek Villa Akasia No. 66, Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
16	SMAS MUHAMMADIYAH TANJUNGPINANG	Swasta	Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 70 Km 8, Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
17	SMAS PELITA NUSANTARA	Swasta	JL. BASUKI RAHMAT NO. 15, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
18	SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG	Negeri	JALAN PRAMUKA NO.6, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
19	SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG	Negeri	JALAN PRAMUKA NO.1, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
20	SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG	Negeri	SULTAN SULAIMAN, Kampung Bulang, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
21	SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG	Negeri	JL. NUSANTARA KM.14, Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
22	SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG	Negeri	Jalan Madung, Kampung Bugis, Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
23	SMKS ALKAUTSAR	Swasta	KAMPUNG SIDOMULYO RT 002-RW 013, Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
24	SMKS BINTAN INSANI	Swasta	JL. WR SUPRATMAN, Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
25	SMKS KESEHATAN WIDYA TANJUNGPINANG	Swasta	JL. D.I PANJAITAN KM 6 NO 15, Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang
26	SMKS MAITREYAWIRA	Swasta	JL.IR. SUTAMI KOMP. VILLA AKASIA NO.66, Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang

3. Kabupaten Bintan

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Alamat
1	SKH CITRA NUGRAHA	Swasta	PERUM PURI ALAMANDA RT. 005 / RW. 002 JALAN PASAR BARU TANJUNG UBAN SELATAN, TANJUNG UBAN SELATAN, Bintan Utara, Kab. Bintan
2	SLB KARYA MANDIRI KIJANG	Swasta	Kp. Lengkuas RT 001 RW 002, Kijang Kota, Bintan Timur, Kab. Bintan
3	SLB NEGERI BINTAN	Negeri	JL. BERDIKARI, TANJUNG UBAN TIMUR, Bintan Utara, Kab. Bintan
4	SLB NEGERI KIJANG	Negeri	Jln Lingkar Wacopek, Kampung Wacopek Gg. SLB, Gunung Lengkuas, Bintan Timur, Kab. Bintan
5	SMA AL IHSAN BINTAN	Swasta	Jl. Bukit Namling RT. 005 RW. 002 Desa Toapaya, Toapaya, Toapaya, Kab. Bintan
6	SMA IBNU KASIM NWDI BINTAN	Swasta	KP. BANGUN REJO KM.18 GUNUNG LENGKUAS, Gunung Lengkuas, Bintan Timur, Kab. Bintan
7	SMA ISLAM TERPADU NAHDLATUL WATHAN	Swasta	Jl. Lintas Barat KM.21, Toapaya, Toapaya, Kab. Bintan
8	SMA TAHFIDZ DARUL FIKRI BINTAN	Swasta	Jl. Taman Sari RT.008 RW.002, TANJUNG UBAN SELATAN, Bintan Utara, Kab. Bintan
9	SMAN 1 BINTAN PESISIR	Negeri	Gin Besar, Numbing, Bintan Pesisir, Kab. Bintan
10	SMAN 1 BINTAN TIMUR	Negeri	JL. KORINDO. KM.21 RT 001 RW 002 KELURAHAN SEI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR, Sungai Lekop, Bintan Timur, Kab. Bintan
11	SMAN 1 BINTAN UTARA	Negeri	JL. SEKERA NO. 11, TANJUNG UBAN UTARA, Bintan Utara, Kab. Bintan
12	SMAN 1 MANTANG	Negeri	Jl. Bathin Daut RT006/RW001, Mantang Besar, Mantang, Kab. Bintan
13	SMAN 1 TAMBELAN	Negeri	JL. TENGKU HASAN BIN TENGKU SINDOET NO. 1, Kukup, Tambelan, Kab. Bintan
14	SMAN 1 TELUK BINTAN	Negeri	JL. TOK SADEK NO. 3 TEMBELING, TEMBELING TANJUNG, Teluk Bintan, Kab. Bintan
15	SMAN 1 TELUK SEBONG	Negeri	JL. RAYA TANJUNG PINANG - TANJUNG UBAN KM 54, Sri Bintan, Teluk Sebong, Kab. Bintan
16	SMAN 1 TOAPAYA	Negeri	JL. GESEK KM 25 KAWAL, TOAPAYA ASRI, Toapaya, Kab. Bintan
17	SMAN 2 BINTAN PESISIR	Negeri	JL. Bukit Cermin, Kelong, Bintan Pesisir, Kab. Bintan
18	SMAN 2 TELUK BINTAN	Negeri	Jl. M. Khasim No. 17 RT 008 RW 004, Pangkil, Teluk Bintan, Kab. Bintan

19	SMAS ISLAM AL-AZHAR 13 BINTAN	Swasta	JL. NUSANTARA KM. 18, Sungai Lekop, Bintan Timur, Kab. Bintan
20	SMAS TUNAS BANGSA	Swasta	Jl. Kota Kapur Blok C 723 Lagoi Bintan, Sebong Lagoi, Teluk Sebong, Kab. Bintan
21	SMAS YKPP BINTAN UTARA	Swasta	JL. CEMPAKA NO : 11 KOMPLEK PERTAMINA, Tanjung Uban Kota, Bintan Utara, Kab. Bintan
22	SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR	Negeri	Jl. Korindo Km. 22, Sungai Lekop, Bintan Timur, Kab. Bintan
23	SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	Negeri	Jl. H. Paranrengi No.1 Tanjung Uban, TANJUNG UBAN SELATAN, Bintan Utara, Kab. Bintan
24	SMK NEGERI 1 GUNUNG KIJANG	Negeri	JL. Poros Pulau Pucung - Lome Km. 48, Malang Rapat, Gunung Kijang, Kab. Bintan
25	SMK NEGERI 1 SERI KUALA LOBAM	Negeri	JL. BUSUNG LAMA, Kuala Sempang, Seri Kuala Lobam, Kab. Bintan
26	SMKS MARITIM LINTAS BARAT	Swasta	JL. RAYA BUSUNG NO. 54 RT.002 RW. 001, Busung, Seri Kuala Lobam, Kab. Bintan
27	SMKS MUHAMMADIYAH	Swasta	Jl. Mekar Sari No. 03, TANJUNG UBAN TIMUR, Bintan Utara, Kab. Bintan
28	SMKS PERKAPALAN HANG TUAH	Swasta	Jl. Kesatrian, No. 09, Tanjung Uban Kota, Bintan Utara, Kab. Bintan

4. Kabupaten Karimun

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Alamat
1	SLB AMANAH BUNDA	Swasta	JL. A.Majid Desa Sebele, Kecamatan Belat, SEBELE, Belat, Kab. Karimun
2	SLB NEGERI KARIMUN	Negeri	JL GRIYA SIDOREJO INDAH NO 1, Lubuk Semut, Karimun, Kab. Karimun
3	SLB NEGERI KUNDUR	Negeri	Jl. Parit Lintang, Sungai Sebesi, Kundur, Kab. Karimun
4	SLB SEHATI KARIMUN	Swasta	Jl.Telaga Riau No.38 RT 05 RW 05, TANJUNG BALAI KOTA, Karimun, Kab. Karimun
5	SLB YPBB KARIMUN	Swasta	Jl. Telaga Tujuh, SUNGAI LAKAM BARAT, Karimun, Kab. Karimun
6	SMA NEGERI 1 SELAT GELAM	Negeri	Jl. Tg. Menawang Rt. 001, Rw.001, Dusun 1, Parit, Selat Gelam, Kab. Karimun
7	SMAN 1 BELAT	Negeri	JL.MANUNGGAL BUKIT RANGGAM, PENARAH, Belat, Kab. Karimun
8	SMAN 1 BURU	Negeri	JL. SEI. BURU, PANGKALAN BALAI, BURU, Buru, Kab. Karimun

9	SMAN 1 DURAI	Negeri	JL. SERSAN H. IBRAHIM YAKOP DURAI, Tanjung Kilang, Durai, Kab. Karimun
10	SMAN 1 KARIMUN	Negeri	JL. RAJA OESMAN - KAPLING, KAPLING, Tebing, Kab. Karimun
11	SMAN 1 KUNDUR	Negeri	JL. SUNARIO KM 3.5 TG BATU BARAT, TANJUNG BATU BARAT, Kundur, Kab. Karimun
12	SMAN 1 MORO	Negeri	JL. RAJA HAJI, MORO, Moro, Kab. Karimun
13	SMAN 1 SUGIE BESAR	Negeri	JL.KEMPAS DUSUN NIUR, NUR PERMAI, Moro, Kab. Karimun
14	SMAN 1 UNGAR	Negeri	JL. PULAI PASUNG, ALOR PISANG IV, BATU LIMAU, GADING SARI, Kundur, Kab. Karimun
15	SMAN 2 KARIMUN	Negeri	JL. RAJA OESMAN, SUNGAI LAKAM, Karimun, Kab. Karimun
16	SMAN 2 KUNDUR	Negeri	JL. HANG TUAH KM. 4 TG. BERLIAN, TANJUNG BERLIAN KOTA, Kundur Utara, Kab. Karimun
17	SMAN 3 KARIMUN	Negeri	JL. LETJEND SUPRAPTO SEI. RAYA, PARIT BENUT, Meral, Kab. Karimun
18	SMAN 3 KUNDUR	Negeri	JL. BESAR SEI. UNGAR, Sungai Ungar, Kundur, Kab. Karimun
19	SMAN 4 KARIMUN	Negeri	JL. SEI BATI, PAMAK, Tebing, Kab. Karimun
20	SMAN 4 KUNDUR	Negeri	JL. Pendidikan Layang kobel, Sawang Laut, Kundur Barat, Kab. Karimun
21	SMAN 5 KARIMUN	Negeri	Jl. Kampung Harapan, TEBING, Tebing, Kab. Karimun
22	SMAS CAHAYA	Swasta	JL WONOSARI RT.002 / RW.007, BARAN BARAT, Meral, Kab. Karimun
23	SMAS DARUL FURQAN	Swasta	JL. PENDIDIKAN SAWANG LAUT, Sawang Laut, Kundur Barat, Kab. Karimun
24	SMAS MAHA BODHI KARIMUN	Swasta	JL. BHAKTI BUKIT SENANG, TANJUNG BALAI, Karimun, Kab. Karimun
25	SMAS MAITREYAWIRA KARIMUN	Swasta	JL. SOEKARNO HATTA, KAMPUNG BANGUN SARI, RT.001, RW.003, HARJOSARI, Tebing, Kab. Karimun
26	SMAS SANTO YUSUP	Swasta	JL. SIDOMULYA II, TANJUNG BALAI, Karimun, Kab. Karimun
27	SMK NEGERI 1 KARIMUN	Negeri	JL PAYA CINCIN SEI BATI, PAMAK, Tebing, Kab. Karimun
28	SMK NEGERI 1 MORO	Negeri	JL. BATU LIPAI MORO, MORO, Moro, Kab. Karimun
29	SMK NEGERI 2 KARIMUN	Negeri	Jl. Payacincin Sungai Bati, PAMAK, Tebing, Kab. Karimun

30	SMK NEGERI KUNDUR	Negeri	JL. BESAR SAWANG KM. 14, Sawang Selatan, Kundur Barat, Kab. Karimun
31	SMK NEGERI KUNDUR UTARA	Negeri	JL. HANG TUAH NO. 009A, TANJUNG BERLIAN KOTA, Kundur Utara, Kab. Karimun
32	SMKS BINA INSAN	Swasta	Jl. Sawang Km. 9, TANJUNG BATU BARAT, Kundur, Kab. Karimun
33	SMKS BUDI MULIA KUNDUR	Swasta	JALAN BARAN PAUH, Sungai Sebesi, Kundur, Kab. Karimun
34	SMKS VIDYA SASANA	Swasta	JL, RAJA OESMAN NO.5 TG. BALAI KARIMUN, SUNGAI LAKAM BARAT, Karimun, Kab. Karimun
35	SMKS YASPIKA	Swasta	JL. PENDIDIKAN NO.28, TANJUNG BALAI KOTA, Karimun, Kab. Karimun

5. Kabupaten Natuna

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Alamat
1	SLB NEGERI NATUNA	Negeri	Jl. Kolonel PNB Sumihar Sihotang, RANAI, Bunguran Timur, Kab. Natuna
2	SMA NEGERI 1 SELUAN	Negeri	JL. H. BAKRI PULAU SELUAN, Kelarik Barat, Pulau Seluan, Kab. Natuna
3	SMA NURUL JANNAH	Swasta	JL.H.ADAM MALIK, BANDARSYAH, Bunguran Timur, Kab. Natuna
4	SMAN 1 BATUBI	Negeri	GUNUNG PUTRI, Gunung Putri, Bunguran Batubi, Kab. Natuna
5	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	Negeri	Jalan Pelajar No. 2 Sedanau, SEDANAU, Bunguran Barat, Kab. Natuna
6	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	Negeri	Jalan Padat Karya Munung Darat, Desa Cemaga, Bunguran Selatan, Kab. Natuna
7	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	Negeri	JL. PELAJAR NO.2, Harapan Jaya, Bunguran Tengah, Kab. Natuna
8	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	Negeri	JL. PRAMUKA NO. 12 RANAI, RANAI, Bunguran Timur, Kab. Natuna
9	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Negeri	Jl. Wan Lempam, Tanjung, Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna
10	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	Negeri	JL. H. Ibrahim No 1, Kelarik, Bunguran Utara, Kab. Natuna
11	SMAN 1 MIDAI	Negeri	JL. RAYA TANJUNG LAMPUNG, Batu Belanak, Midai, Kab. Natuna
12	SMAN 1 PULAU LAUT	Negeri	Jln. Datuk Kaya Muhammad Dun Kota Baru Kec. Pulau laut, Air Payang, Pulau Laut, Kab. Natuna
13	SMAN 1 PULAU TIGA BARAT	Negeri	TANJUNG BATU, Selading, Pulau Tiga, Kab. Natuna
14	SMAN 1 SERASAN	Negeri	JL. PANTAI SISI NO. 2 Kampung Genting, PANGKALAN, Serasan, Kab. Natuna

15	SMAN 1 SERASAN TIMUR	Negeri	Jl. Fena Pa' ndum No. 02 Desa Arung Ayam Kec. Serasan Timur, Desa Arung Ayam, Serasan Timur, Kab. Natuna
16	SMAN 1 SUBI	Negeri	JL. PENDIDIKAN, Subi Besar, Subi, Kab. Natuna
17	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	Negeri	JL. PATIMURA PERING, BANDARSYAH, Bunguran Timur, Kab. Natuna
18	SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	Negeri	PANGLIMA HUJAN SEDANAU, SEDANAU, Bunguran Barat, Kab. Natuna
19	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	Negeri	TARUNA NO.01 BANDARSYAH, BANDARSYAH, Bunguran Timur, Kab. Natuna
20	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Negeri	Jl. Wan Lempam, Tanjung, Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna
21	SMK NEGERI 2 BUNGURAN BARAT	Negeri	KI HAJAR DEWANTARA, Batubi Jaya, Bunguran Barat, Kab. Natuna
22	SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	Negeri	Jl. Tegul Khusu Batu Naga, Sungai Ulu, Bunguran Timur, Kab. Natuna

6. Kabupaten Lingga

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Alamat
1	SLB NEGERI LINGGA	Negeri	Jl. Navigasi Kampung Telek RT. 003 RW. 005, TANJUNG HARAPAN, Singkep, Kab. Lingga
2	SMA INTEGRAL BUNDA TANAH MELAYU	Swasta	JL. BUKIT CENING NO.02 RT.006 RW.002 DESA MERAWANGDAIK LINGGA, DAIK, Lingga, Kab. Lingga
3	SMA NEGERI 2 BAKUNG SERUMPUN	Negeri	JALAN TANJUNG PERDAH NO. 40, Batu Belubang, Bakung Serumpun, Kab. Lingga
4	SMAIT IBNU HAJAR ASQALANI	Swasta	Jl. Batin Encik Muhammad Saleh 4, Sungai Pinang, Lingga Timur, Kab. Lingga
5	SMAN 1 BAKUNG SERUMPUN	Negeri	JL. PENDIDIKAN, DESA REJAI, Rejai, Bakung Serumpun, Kab. Lingga
6	SMAN 1 KATANG BIDARE	Negeri	JL. PASIR BUGIS, Benan, Katang Bidare, Kab. Lingga
7	SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	Negeri	Jalan Desa Busung Panjang Pulau Panjang, Busung Panjang, Kepulauan Posek, Kab. Lingga
8	SMAN 1 LINGGA	Negeri	JL. ISTANA ROBAT NO. 40, DAIK, Lingga, Kab. Lingga
9	SMAN 1 LINGGA TIMUR	Negeri	JL. BATIN ENCIK MUHAMMAD SALEH 8, Sungai Pinang, Lingga Timur, Kab. Lingga
10	SMAN 1 LINGGA UTARA	Negeri	JL. KUKANG - DUARA, PANCUR, Duara, Lingga Utara, Kab. Lingga

11	SMAN 1 SELAYAR	Negeri	Jl. Sungai Tumu, Penuba, Selayar, Kab. Lingga
12	SMAN 1 SENAYANG	Negeri	JL. SAMUDERA KAMPUNG BARU, SENAYANG, Senayang, Kab. Lingga
13	SMAN 1 SINGKEP	Negeri	JL. PELAJAR, DABO, Singkep, Kab. Lingga
14	SMAN 1 SINGKEP BARAT	Negeri	JL. RAJA ALI HAJI, SUNGAI HARAPAN, Singkep Barat, Kab. Lingga
15	SMAN 1 SINGKEP PESISIR	Negeri	Jl. Penat, Lanjut, Singkep Pesisir, Kab. Lingga
16	SMAN 1 SINGKEP SELATAN	Negeri	Jl. Tuanku Tambusai, RESANG, Singkep Selatan, Kab. Lingga
17	SMAN 1 TEMIANG PESISIR	Negeri	JL. PENARAH DESA TAJUR BIRU, TAJUR BIRU, Temiang Pesisir, Kab. Lingga
18	SMAN 2 SINGKEP	Negeri	JL. KARTINI, SUNGAI LUMPUR, Singkep, Kab. Lingga
19	SMAS BAITUL QURAN	Swasta	Kampung Telek Jalan Garuda Dabo Singkep, TANJUNG HARAPAN, Singkep, Kab. Lingga
20	SMK NEGERI 1 LINGGA	Negeri	DUSUN II MULYASARI, Bukit Langkap, Lingga Timur, Kab. Lingga
21	SMK NEGERI 1 SENAYANG	Negeri	PULAU SEBANGKA, SENAYANG, Senayang, Kab. Lingga
22	SMK NEGERI 1 SINGKEP	Negeri	JL. GERGAS, BATU BERDAUN, Singkep, Kab. Lingga
23	SMK NEGERI 2 LINGGA	Negeri	Gang Regas 1, Merawang, Lingga, Kab. Lingga
24	SMKS MAHARDIKA SINGKEP	Swasta	JL. NAVIGASI RT. 03 RW. 05, TANJUNG HARAPAN, Singkep, Kab. Lingga

7. Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Nama Satuan Pendidikan	Status	Alamat
1	Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 12 Kepulauan Anambas	Negeri	Jl Abdullah No.1, Ladan, Kec.Palmatak, Ladan, Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas
2	SLB NEGERI ANAMBAS	Negeri	Jl. M. Husni Tamrin, Tiangau, Siantan Selatan, Kab. Kepulauan Anambas
3	SMA INTEGRASI AS-SUNNIYAH	Swasta	Pondok Pesantren As-sunniyah Dua Palmatak, Jl. Air Tanah, Ladan, Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas

4	SMAN 1 JEMAJA	Negeri	JL. PADANG MELANG, BATU BERAPIT, Jemaja, Kab. Kepulauan Anambas
5	SMAN 1 PALMATAK	Negeri	JL M YUSUF, Tebang, Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas
6	SMAN 1 SIANTAN	Negeri	JL. SOEKARNO HATTA RINTIS, TAREMPA SELATAN, Siantan, Kab. Kepulauan Anambas
7	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	Negeri	JL. TANJUNG KARANG NO. 1 DESA NYAMUK, Nyamuk, Siantan Timur, Kab. Kepulauan Anambas
8	SMAN 1 SIANTAN UTARA	Negeri	MUBUR, Mubur, Siantan Utara, Kab. Kepulauan Anambas
9	SMK NEGERI 1 ANAMBAS	Negeri	JL. H. ALI NO.38 AIR ASUK, AIR ASUK, Siantan Tengah, Kab. Kepulauan Anambas
10	SMK NEGERI 2 ANAMBAS	Negeri	Jalan Tanjungmulia No. 24 Dusun Muntai, Teluk Siantan, Siantan Tengah, Kab. Kepulauan Anambas
11	SMK NEGERI 3 ANAMBAS	Negeri	ULU MARAS, Ulu Maras, Jemaja Timur, Kab. Kepulauan Anambas
12	SMK NEGERI 4 ANAMBAS	Negeri	Jl. M. Husni Tamrin No. 01, Tiangau, Siantan Selatan, Kab. Kepulauan Anambas